



BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT PERBUKUAN

SEJARAH PERBUKUAN

KRONIK PERBUKUAN
INDONESIA
MELEWATI TIGA ZAMAN



EDISI RINGKAS

Sejarah Perbukuan

Kronik Perbukuan Indonesia Melewati Tiga Zaman

@2022

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dilindungi Undang-Undang.

Pengarah

Anindito Aditomo (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan)

Penanggung Jawab

Supriyatno (Kepala Pusat Perbukuan)

Koordinator Penyusunan

Helga Kurnia

Penelaah

Abdurakhman

Penulis

Bambang Trimansyah

Editor

Irma Susilowati, Rafli Syahrizal, Emira Novitriani Yusuf

Desain

Deden Sopandi

Penerbit

Pusat Perbukuan

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan pertama, 2022

Isi buku ini menggunakan huruf Cormorant Family 11/15pt. Christian Thalmann
xiv, 138 hlm.: 14,8 X 21 cm

Kata Pengantar

Sudah selayaknya puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa saya sampaikan atas terbitnya buku *Sejarah Perbukuan: Kronik Perbukuan Indonesia Melewati Tiga Zaman* yang disusun oleh Tim Pusat Perbukuan. Sesungguhnya memang tidak mudah merajut kembali sejarah yang berserak pada lebih dari tiga abad sejarah perbukuan yang bergulir di Nusantara.

Buku di sini sebagaimana disampaikan di dalam materi buku merupakan buku modern hasil dari mesin cetak yang disempurnakan oleh Gutenberg pada tahun 1446 di Jerman. Penemuan mesin cetak ini yang kemudian mengalami penyempurnaan telah memicu munculnya media massa cetak sehingga membawa Eropa pada Zaman Pencerahan. Budaya cetak-mencetak, membaca, dan menulis inilah yang kemudian dibawa Kerajaan Belanda melalui kongsi dagang VOC ke Nusantara lalu dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sejarah panjang perbukuan di Indonesia menyiratkan bahwa budaya buku cetak (baca-tulis) juga sudah berkembang di Indonesia sejak pertengahan abad ke-17. Selanjutnya, budaya itu menguat pada awal abad ke-20 yang mendorong lahirnya kaum terpelajar di Indonesia. Sampai pada masa kini, penerbitan buku tetap mewarnai perjalanan bangsa, khususnya di dunia pendidikan.

Tahun 2017 menjadi tonggak bersejarah bagi dunia perbukuan di Indonesia ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017

tentang Sistem Perbukuan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah mendapat amanat menjadi induk dari dunia perbukuan di Indonesia. Untuk itu, lembaga perbukuan yang kini bernama Pusat Perbukuan berada di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan di Kemdikbudristek melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan ekosistem perbukuan.

Regulasi yang telah disahkan tersebut menyiratkan keseriusan pemerintah membangun dunia perbukuan demi meningkatkan keandalan literasi bangsa. Pemerintah menyadari peran buku sebagai basis dari kemajuan bangsa sehingga salah satu cara memahami kedudukan buku yang penting ialah menelusuri jejak sejarah perbukuan.

Pusat Perbukuan berharap kehadiran buku ini menguatkan optimisme kita mengembangkan perbukuan di Indonesia meskipun dalam beberapa survei internasional Indonesia ditempatkan sebagai negara yang lemah dalam keliterasian. Namun, di satu sisi kita dapat melihat semangat berliterasi yang tinggi pada masyarakat dan munculnya generasi baru yang gemar membaca buku. Buku-buku terus diterbitkan, bahkan meningkat setiap tahun. Hal ini menjadi modal awal untuk membangun daya literasi bangsa yang lebih kukuh pada tahun-tahun mendatang.

“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (jasmerah)” merupakan kalimat yang pernah dilontarkan oleh Bung Karno dalam pidato terakhirnya pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-46 tahun 1966. Sejarah memang penting sehingga buku edisi ringkas *Sejarah Perbukuan* ini pun diterbitkan dalam rangka peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2022. Selamat membaca dan menekuni sejarah perbukuan kita.

Jakarta, 16 Agustus 2022
Kepala Pusat Perbukuan

Supriyatno

Daftar Isi



Kata Pengantar	iii
Prakata	vii
Ucapan Terima Kasih	xiii
PROLOG BUDAYA BUKU PENDIRI BANGSA	1
Melacak Jejak Sejarah Perbukuan Indonesia.	9
Periodisasi Sejarah Perbukuan.	12
Inisiatif Pusat Perbukuan.	14
BAB 1 PERBUKUAN SEBELUM KEMERDEKAAN (1659-1945)	17
Perbukuan pada Masa VOC	18
Perbukuan pada Masa Pemerintah Hindia Belanda.	22
Penerbit Pemerintah Hindia Belanda	22
Penerbit Swasta Belanda.	23
Penerbit Tionghoa Peranakan.	27
Penerbit Bumiputra	30
BAB 2 PERBUKUAN SETELAH KEMERDEKAAN (1945-1998)	51
Perbukuan pada Awal Kemerdekaan	52
Penerbitan Pemerintah	53
Penerbitan Swasta	56
Perbukuan pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1960-1965).	59
Kebijakan Perbukuan Era Sukarno	61
Perbukuan pada Masa Orde Baru (1966-1998).	67
Penerbitan Pemerintah	68
Penerbitan Swasta	69
Dinamika Perbukuan pada Masa Orde Baru	80
Kongres Perbukuan Nasional I.	101
Dunia Perbukuan dan Krisis 1998	107

BAB 3	PERBUKUAN INDONESIA BARU (1999–SEKARANG)	111
	Perbukuan pada Masa Awal Reformasi.	112
	Penerbitan Buku pada Masa Krisis Moneter.	113
	Lahirnya Dewan Buku Nasional	113
	Lahirnya Badan Standar Nasional Pendidikan	115
	Perbukuan setelah Satu Dekade Reformasi	116
	Lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan	119
	Terbentuknya Lembaga Perbukuan	120
	Lahirnya Gerakan Literasi	121
	Buku Indonesia di Panggung Dunia	123
	Ketika Tiga Lembaga Mengurusi Perbukuan	125
	Tantangan Pembajakan Buku	126
	Berita Baik Pajak Perbukuan	127
EPILOG	MEMINTAL KEMBALI BUDAYA BUKU INDONESIA	129
	Harapan Perbukuan Indonesia	131
	Catatan Akhir	133
	Daftar Pustaka	135

Prakata



Timbul sebuah semangat ketika membaca buku yang ditulis oleh seorang sejarawan mumpuni. Bersemangat tentu karena baik judul maupun isinya memberi inspirasi tentang perjalanan bangsa ini yang terekam di dalam buku-buku. Buku bertajuk *Dari Buku ke Buku Sambung-Menyambung Menjadi Satu* karya P. Swantoro¹ tersusun dengan gaya penulisan yang memikat, sumber yang valid dan tertelusur, serta pemilihan kisah-kisah sejarah literasi bangsa yang luar biasa.

P. Swantoro memulai prakata pada bukunya sebagai “Perkenalan Memori Seorang Kakek”.

Buku ini lahir dari sebuah buku; bermula dari rasa heran seorang kakek, mengapa sebuah buku yang sering dilihat-lihatnya ketika ia masih di sekolah dasar, tidak jarang masih muncul dalam ingatannya. Padahal, buku kepunyaan Bapak itu sudah lama tidak ada, dan Bapak pun sudah lama tiada (Swantoro: 2017).

Buku terbitan Kepustakaan Populer Gramedia tersebut menjadi salah satu sumber penting dalam penulisan buku *Sejarah Perbukuan: Kronik Perbukuan Indonesia Melewati Tiga Zaman* ini. Saya sebagai penulis yang mewakili Generasi X, melalui buku itu jelas mendapatkan koneksi memori untuk memintal sejarah perbukuan di Indonesia, dunia yang telah saya tekuni sejak berada di bangku kuliah Prodi D-3 Editing² di Universitas Padjadjaran.

Membincangkan atau mengupas sebuah buku seperti mengarungi sebuah laut pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman berbagai sosok manusia. Membincangkan dan mengupas sejarah buku pada suatu bangsa seperti menguak samudra berikut cakrawala pengetahuan,

pemikiran, dan pengalaman yang tiada terkira. Karena itu, merupakan sebuah keharusan jika perjalanan bangsa Indonesia yang diwarnai oleh buku-buku patut dituliskan dan dibukukan sebagai mikrosejarah sebagaimana diungkapkan oleh sejarawan, Prof. Dr. Taufik Abdullah.

Saya bukanlah ahli sejarah atau berlatar belakang pendidikan sejarah, tetapi saya sangat mencintai sejarah. Semasa kecil saya bersyukur telah terpapar bahan bacaan begitu mewah. Saya beserta abang dan kakak sudah membaca *Bobo*, *Tomtom*, *Ananda*, dan *Kawanku* sebagai majalah anak yang tren pada zamannya tahun 1980-an. Begitu pula di rumah kami membanjir buku-buku anak dari karya penulis lokal hingga karya penulis luar yang memesona, seperti dongeng-dongeng H.C. Andersen dan *Lima Sekawan* karya Enid Blyton.

Sebuah novel anak dari Proyek Inpres berjudul *Taume Anak Mentawai* karya Nilakusuma terbitan Pustaka Jaya tahun 1976 hingga kini begitu membekas dalam ingatan saya. Novel itu menyajikan kehidupan anak-anak Mentawai yang begitu lekat dengan alam, setiap hari makanan pokoknya sagu, dan hanya seminggu sekali mereka memakan nasi—Taume dan adiknya begitu menantikan saat memakan nasi.

Kehidupan Taume dan adiknya di daerah terpencil yang terasingkan pada masa Orde Baru itu membuat saya begitu takjub. Sementara pada masa itu, saya tinggal di sebuah kota kecil bernama Tebing Tinggi Deli yang berjarak sekira 80 km dari Kota Medan. Di Tebing Tinggi pula saat SMP saya berkenalan dengan *Lupus* karya Hilman Hariwijaya pertengahan tahun 1980-an. Melalui *Lupus* saya mendapatkan mata baru, yakni dunia penulisan fiksi yang mengasyikkan. Lalu, hal ini berlanjut pada “kegilaan” saya membaca majalah *HAI* dan cerita-cerita dari para penulisnya, seperti Gola Gong (Gol A Gong) yang pada saat buku ini ditulis menjadi Duta Baca Perpustakaan Nasional RI.

Begitulah setiap orang seperti Pak Swantoro dan saya memiliki sejarah masing-masing terhadap buku. Setiap orang, saya kira disebut beruntung jika terpapar oleh buku dari orang tua mereka atau dari

guru dan orang-orang terdekat mereka semasa kecil. Maka dari itu, dalam lingkup lebih besar, segelintir anak bangsa yang telah meleak membaca juga terpapar buku dari guru-guru mereka yang pada masa itu umumnya adalah kaum penjajah. Belandalah yang membawa budaya buku modern ke Indonesia untuk suatu kepentingan yang tanpa diperkirakan menjadi salah satu pemicu kebangkitan intelektualitas bangsa Indonesia.

Segelintir orang Indonesia yang terpapar buku itu adalah nama-nama yang kukuh dalam sejarah pendirian Indonesia, seperti Tan Malaka, Sukarno, Hatta, Sjahrir, Natsir, dan beberapa lagi yang jika disusun, akan menjadi deret panjang dalam sejarah perbukuan Indonesia. Dengan demikian, jargon *jangan sekali-kali meninggalkan sejarah* (jasmerah) yang pernah disampaikan Bung Karno menjadi relevan dengan tujuan penulisan buku ini sebagai pengungkapan faktual terhadap budaya buku modern di Indonesia.

Tentu saja hal ini menjadi jawaban sebuah antitesis tentang rendahnya budaya membaca masyarakat Indonesia kini, terutama membaca buku. Fakta menarik diungkapkan oleh Ketua Umum Ikapi, Arys Hilman (2021) bahwa pada masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia, negara-negara lain mengalami surplus pembelian buku karena diberlakukannya masa bekerja dan bersekolah dari rumah. Namun, hal itu tidak terjadi di Indonesia. Penjualan buku melorot hampir ke titik nadir sehingga menegaskan asumsi bahwa orang Indonesia enggan membaca buku meski sekadar untuk membunuh waktu.

Akan tetapi, jika menyelisik sejarah perbukuan Indonesia maka terlihat bahwa berdirinya negara dan bangsa ini diiringi oleh kearifan dan ketangguhan buku-buku. Lahirnya para sastrawan yang menawan perhatian dari angkatan ke angkatan ialah sebuah perjalanan buku-buku yang berliku. Sastrawan telah menyemai bibit literasi melalui

buku-buku sehingga gerakan literasi yang sekarang digaungkan kembali, jelas tidak akan bermakna tanpa kehadiran sastra dan sastrawan.

Untuk itu, buku ini yang ditujukan kepada siapa pun yang mencintai buku dan meminati literasi ialah sebuah pernyataan bahwa budaya bangsa Indonesia yang terbentuk sebelum dan setelah perang kemerdekaan adalah budaya buku. Saya berani menyatakannya sebagai penulis setelah menyelidik masa lalu bagaimana buku begitu berpengaruh dalam alam pendidikan kita berikut gaya hidup masyarakat, terutama masyarakat terpelajar. Sebagaimana pepatah Latin mengatakan *Debita ab erudito quoque libris reverentia* (Kehormatan orang terpelajar berasal dari buku).

Sebuah perhelatan perbukuan akbar tingkat internasional beberapa tahun lalu telah sedikit menampakkan hal itu. Perhelatan itu bernama Frankfurt Book Fair pada tahun 2015 yang menempatkan Indonesia sebagai tamu kehormatan dalam ajang pameran buku tertua dan terbesar di dunia itu. Indonesia menyodorkan tema soal kekayaan budaya alih-alih kekayaan konten dari 17.000 pulau (*17.000 Islands of Imagination*). Namun, sayangnya pada saat itu belum sepenuhnya terkuak bagaimana sejarah bangsa ini yang dibangun oleh buku-buku dalam sebuah buku.

Tidak ada kata terlambat untuk memulai penulisan sejarah perbukuan sebagai awal yang baik, seperti yang diinisiasi oleh Pusat Perbukuan ini. Sebelumnya telah diterbitkan secara terbatas buku *Menguak Jendela Ilmu: Dinamika Penerbitan Buku Era Orde Baru hingga Reformasi* oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemdikbudristek. Kini, Pusat Perbukuan dalam format kelembagaan baru, kembali menerbitkan buku yang lebih komprehensif menyajikan sejarah perbukuan Indonesia.

Buku ini menyajikan teori tentang periodisasi sejarah perbukuan Indonesia ke dalam tiga zaman, yaitu (1) Perbukuan Sebelum Kemerdekaan; (2) Perbukuan Setelah Kemerdekaan; (3) Perbukuan

Indonesia Baru. Setiap zaman menunjukkan suatu ciri tersendiri dari budaya buku Indonesia. Karena itu, paparan buku ini menyajikan sebuah lintasan waktu kiprah pelaku perbukuan, institusi media yakni penerbit buku, aktivitas penerbitan buku, dan dunia perbukuan Indonesia secara umum.

Buku ini menguak juga sisi-sisi perbukuan yang penting untuk dijenguk sebagaimana disebut Kuntowijoyo (2008) sebagai penjelasan sejarah. Periodisasi ialah konsep sejarawan semata-mata, suatu produk mental yang hanya ada dalam pikiran sejarawan, suatu *ideal type*. Tentu periodisasi ini pun mungkin tidak sepenuhnya dapat berterima sebagai sebuah sejarah perbukuan.

Periodisasi perbukuan Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi percetakan, teknologi penerbitan, dan teknologi digital yang dapat dilihat impaknya kini. Salah satu titik penting adalah periode Perbukuan Indonesia Baru yang berangkat dari dua peristiwa penting, yaitu reformasi politik di Indonesia dan milenium ketiga. Sebuah kegiatan penting melatari periode ini, yaitu diselenggarakannya simposium perbukuan oleh pegiat industri perbukuan. Taryadi (2000) mengungkapkan pada bulan November 1998, Yayasan Obor Indonesia bersama dengan beberapa orang penerbit membentuk tim kecil.

Simposium perbukuan itu akhirnya diselenggarakan pada tanggal 10–11 Februari 1999 dengan sponsor the Japan Foundation menghadirkan “orang-orang buku” dan juga para intelektual di Indonesia. Tema yang dipilih ialah “Meningkatkan Peranan Buku dalam Upaya Membentuk Masyarakat Baru Indonesia”. Kejadian reformasi dan peralihan kekuasaan di Indonesia dari Orde Baru sangat memengaruhi suasana kebatinan pada masa itu sehingga semangat yang meletup ialah semangat bertransformasi buah dari reformasi. Selain itu, ada perasaan kuat menyongsong zaman baru seperti digitilisasi dan penetrasi internet.

Kegiatan penting perbukuan itu menghadirkan narasumber dan moderator yang menjadi ikon perbukuan Indonesia. Tercatat nama moderator, seperti Wandi S. Brata, Frans Meak Parera, Leila S. Chudori, Mula Harahap, Putut Widjanarko, dan Machfuddin. Adapun narasumber yang menyusun makalah, yaitu Arselan Harahap, Ignas Kleden, Karlina Leksono, Y.B. Mangunwijaya, Alfons Taryadi, Bondan Winarno, Mohammad Sobari, Wagiono Sunarto, P. M. Winarno, Teddy Suriyanto, Sapardi Djoko Damono, A. B. Susanto, Trasvin Jittidecharaks (Thailand), Phiangdun Paweenawath (Thailand), dan Masud Ashar (Pakistan). Pada awal perhelatan itu terbetik duka ketika Romo Mangun (Y. B. Mangunwijaya) mengembuskan napas terakhirnya, sekira sejam setelah menyajikan makalahnya bertajuk “Peran Buku Demi Kearifan dalam IPTEK”, tanggal 10 Februari 1999.

Simposium dan buku yang terbit setelahnya bertajuk *Buku dalam Indonesia Baru* terbitan Yayasan Obor Indonesia menjadi titik penting lahirnya zaman Perbukuan Indonesia Baru yang juga dilatari dengan menguatnya penggunaan internet dan mulai menyebarnya buku elektronik. Sebuah zaman baru perbukuan telah lahir yang juga memengaruhi budaya buku di Indonesia.

Akhirnya, semoga kerja kecil ini benar-benar bermanfaat sebagai “sekrup” di lambung kapal budaya bernama Indonesia. Sejarah perbukuan ini dapat menjadi cermin bahwa bangsa ini harus benar-benar serius mengurus perbukuan sebagai sebuah daya untuk berkiprah di dalam masyarakat ekonomi berbasis pengetahuan. Saya kembali mengutip pernyataan dari Ignas Kleden (2000) bahwa buku adalah perilaku budaya; buku adalah proses produksi budaya; dan buku adalah produk budaya. Bangsa yang berbudaya ialah bangsa yang menggunakan buku sebagai kendaraan kemajuannya.

Juli 2022
Bambang Trimansyah

Ucapan Terima Kasih

*B*uku ini sulit terbit atau bahkan mustahil tersusun tanpa bantuan berbagai pihak kepada penulis. Untuk itu, Pusat Perbukuan menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang terdiri atas pelaku sejarah, tokoh perbukuan, dan akademisi yang membagikan pengalamannya, pemikirannya, dan pandangan yang luas terhadap penulisan serta penyusunan buku edisi ringkas ini. Mereka adalah

- Abdurakhman (Fakultas Sejarah, Universitas Indonesia)
- Bahrul Hayat (Universitas Islam Internasional Indonesia)
- Frans M. Parera (Politeknik Negeri Media Kreatif)
- Fristalina (pelaku sejarah Pusat Perbukuan)
- Hendytio Rumbiono (pelaku sejarah Pusat Perbukuan)
- Kartini Nurdin (Yayasan Pustaka Obor)
- Lucy Andam Dewi (Bumi Aksara)
- Putut Widjanarko (Universitas Paramadina)
- Setia Dharma Madjid (Tokoh Perbukuan)
- Sofia Mansoor (Editor/Penerjemah/Praktisi Perbukuan)
- Wahyu Trihartati (pelaku sejarah Pusat Perbukuan)
- Wandu S. Brata (Kelompok Kompas Gramedia)
- Yohanes Santoso (pelaku sejarah Pusat Perbukuan)
- Zaim Uchrowi (Yayasan Karakter Pancasila)
- Zaki Su'ud (Institut Teknologi Bandung)

A black and white photograph of three men in white uniforms sitting on a bench. The man on the left is looking down, the man in the middle is looking forward, and the man on the right is looking to the side. They are all wearing white shirts and trousers, and the man on the right is wearing a white cap. The background shows a building with a window and some foliage.

PROLOG

BUDAYA BUKU PENDIRI BANGSA

*B*ibliofil alias pengila buku itu bernama Mohammad Hatta. Hidupnya ada di antara buku-buku. Kegundahannya adalah jauh dari buku-buku. Saat pemerintah kolonial Belanda mengasingkan Hatta ke Boven Digul, Papua, yang justru dipikirkannya bagaimana cara mengangkut buku-buku miliknya ke sana. Bagi Hatta tidak mengapa raganya terpenjara, tetapi pikirannya dapat bebas mengembara bersama buku-buku.

“Dalam peti buku yang berukuran $\frac{1}{4}$ meter kubik satu, jumlahnya 16 buah. Jadi, semuanya empat meter kubik. Mengepak buku itu paling sedikit memakan waktu tiga hari,” terang Hatta di dalam bukunya *Memoir*⁴.

Pemerintah Belanda akhirnya mengizinkan Hatta membawa serta bukunya dan hanya memberi waktu tiga hari untuk berkemas. Ia harus bolak-balik dari Penjara Glodok ke rumahnya di Jalan Sawah Besar, Jakarta. Hatta dibantu oleh kemenakan-kemenakannya mengemas buku ke dalam 16 peti besi.

Sesampai di Tanah Merah, Boven Digul, timbul masalah baru. Bagaimana Hatta dapat mengangkut 16 peti besi itu, sementara dirinya sendiri menenteng satu koper pakaian? Hatta harus menggotongnya dari kantor pemerintah ke daerah interniran—tempat Hatta diasingkan—berjarak sekira 1,5 km. Atas usul panitia penerimaan di sana, Hatta menggunakan jasa angkut dari orang Kaya-Kaya—suku lokal di Boven Digul.

Hatta mengungkapkan di dalam *Memoir*, “Kami berunding dengan seorang Kaya-Kaya yang kira-kira menjadi pemimpin mereka. Ia meminta sebagai ongkosnya satu uang kelip untuk tiap-tiap peti.” Uang kelip waktu itu nilainya 5 sen, berbentuk bundar dengan lubang di tengahnya.

Melalui buku-buku yang dibawanya Hatta mengisi hari-harinya di Boven Digul dengan mengajarkan ekonomi dan filsafat kepada sesama tahanan. Hal yang menunjukkan kadar tinggi intelektualitas Hatta ialah kemampuannya menulis. Pada usia 18 tahun, Hatta telah menulis cerita yang dimuat di majalah *Jong Sumatra* sekira tahun 1920 berjudul “Namaku Hindiana”.

Hatta pernah begitu intens menulis demi mengkritik Pemerintah Hindia Belanda Ketika Sukarno diasingkan ke Ende, Flores. Tersebab tulisan-tulisannya ini pula maka Hatta diasingkan ke Boven Digul.

Namun, di pengasingan Hatta Kembali rutin menulis untuk koran *Pemandangan* tentang nasib orang-orang buangan.

Tulisan Hatta tersebut memantik perhatian pejabat kementerian Belanda, Colin. Ia mengecam pemerintah Hindia Belanda lalu mengutus residen Ambon untuk menemui Hatta di Boven Digul.

Dari pengasingan di Boven Digul, bersama Soetan Sjahrir, Hatta dipindahkan ke Banda Neira, Kepulauan Maluku pada Desember 1936. Buku-buku Hatta turut kembali dibawa serta. Lagi, orang Kaya-Kaya membantu Hatta dengan meminta imbalan dua kali lipat dari sebelumnya. Di Banda Neira, Hatta kembali bersama buku-bukunya.



Gambar 1. Sjahrir, Sukarno, dan Hatta simbol budaya buku Indonesia. (Repro *Kilas Balik Revolusi* karya Aboe Bakar Lubis).

Hatta tetap menulis. Ia menulis artikel untuk majalah *Sin Tit Po* terbitan Surabaya dalam bahasa Melayu. Hatta juga menulis untuk *Nationale Commentaren* (Komentar Nasional) yang dipimpin oleh Sam Ratulangi.

Pengasingan Hatta dan Sjahrir berakhir pada 1 Februari 1942. Hatta dan Sjahrir beserta tiga anak angkatnya menumpang pesawat Catalina menuju Jakarta. Peti-peti buku Hatta tak muat diangkut oleh pesawat kecil yang dapat mendarat di air itu. Alhasil, Hatta berpisah dengan buku-bukunya. Namun, perpisahan itu hanya untuk sementara. Ketika Hatta menjadi wakil presiden, buku-buku itu kembali diangkut dari Banda Neira ke Jakarta atas bantuan pengusaha, Djohan Djohor⁵.

Sepanjang hayatnya, Hatta mengoleksi sekira sepuluh ribu judul buku. Ia juga menulis 180 judul buku. Suatu jumlah yang fantastis bagi seorang Indonesia. Saat menikah, bahkan Hatta ingin memberikan maskawin kepada sang istri berupa sebuah buku yang ditulisnya sendiri: *Alam Pikiran Yunani*⁶. Namun, ibunda Hatta tidak menyetujui maskawin itu.

Di samping Hatta yang penggila buku, tersebut juga nama Sukarno. Di dalam autobiografinya *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat* yang ditulis oleh Cindy Adams, Sukarno menyatakan, “Dan di sana (buku) aku bertemu dengan orang-orang besar. Buah pikiran mereka menjadi buah pikiranku. Cita-cita mereka adalah dasar pendirianku.”

Putri Bung Karno, Rachmawati, mengungkapkan kegemaran bapaknya terhadap buku. Jika tidak ada tamu di istana, Sukarno menghabiskan waktunya dengan membaca dan membaca. Kamar tidurnya penuh dengan buku. Tempat tidur, kursi, dan kamar mandi berubah fungsi menjadi perpustakaan.

Sukarno juga seorang penulis yang ulung. Ia sangat produktif menulis sejak belia, bahkan pernah menjadi editor di sebuah majalah terbitan Sarekat Islam. Sukarno menghasilkan karya buku, di antaranya *Mencapai Indonesia Merdeka* (1933), *Lahirnya Pancasila* (1945), *Sarinah* (1951), dan yang sangat monumental, yakni kumpulan tulisannya bertajuk *Di Bawah Bendera Revolusi* Jilid 1 (1959) dan Jilid 2 (1960).

Kekhasan Sukarno dalam menulis yang menunjukkan keseriusannya ialah pada banyaknya referensi yang digunakan. Ia selalu menuliskan

nama penulis dan judul buku secara lengkap yang menandakan luasnya bacaan Sang Proklamator Indonesia ini.

Soetan Sjahrir yang berjudul Bung Kecil, perdana menteri pertama Indonesia, juga seorang penggila buku. Dalam bukunya bertajuk *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*, sejarawan Rudolf Mrazek menggambarkan Sjahrir sebagai seorang kutu buku. Sjahrir mengaku telah membaca ratusan buku sejak remaja plus novel anak Belanda.

Tahun 1930, Sjahrir menempuh pendidikan tinggi di Universitas Leiden, Belanda. Ia mengambil jurusan Hukum Adat Hindia. Di Leiden Sjahrir kerap meminjam buku tentang kajian negeri Hindia (indologi) kepada seniornya, Joss Riekerk. Sjahrir tak pernah mengembalikan buku-buku itu yang dipinjam Joss dari perpustakaan Universitas Leiden.

Narasi tentang “kegilaan” terhadap buku dari tiga sekawan pendiri bangsa cukup membuktikan bagaimana budaya buku telah menjalar sebagai simbol intelektualitas di Indonesia pada awal abad ke-20. VOC secara langsung atau tidak langsung telah memboyong budaya buku sebagaimana yang berkembang di Eropa sejak abad ke-17 ketika mesin cetak semakin canggih.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan dibangun oleh budaya buku yang sangat memengaruhi pemikiran para pendiri bangsa, seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan banyak lagi. Mereka pembaca buku yang rakus sekaligus penulis yang ulung.

Sebagai contoh, Tan Malaka, menghasilkan sebuah risalah berjudul “*Massa Actie*” (Aksi Massa) pada tahun 1926. Dikisahkan bahwa tulisan tersebut dibuat secara tergesa-gesa di Singapura lalu dicetak dan diterbitkan di sana yang merupakan tanggapan terhadap seruan revolusi di Hindia Belanda. Ada 12 bagian pada risalah ini yang menampakkkan pemikiran Tan Malaka pada masa itu yang menentang revolusi prematur. Risalah tersebut dapat disebut sebagai sebuah buku yang juga menjadi pegangan para pejuang bangsa pada masa itu.

Setelah buku itu, dengan nama samaran Iljas Hussein, Tan Malaka menulis dan menerbitkan buku berjudul *Madilog (Materialisme Dialektika Logika)* pada tahun 1943 secara mandiri (*self-publishing*). Saat itu Tan Malaka bersembunyi di Batavia dari incaran pemerintah Jepang. Ia menyamar sebagai penjahit.

Ia menghabiskan tiga jam sehari untuk menulis *Madilog* atau total 720 jam selama lebih dari 8 bulan dari Juli 1942 hingga Maret 1943. Pada waktu bersamaan, ia juga menulis buku *Gabungan Aslia*. Buku *Madilog* tebalnya 568 halaman. Pascakemerdekaan, *Madilog* diterbitkan oleh Penerbit Widjaya, pada tahun 1951. *Madilog* diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Ted Sprague dan diterbitkan pada tahun 1962 di Den Haag.

Sosok Tan Malaka yang unik diabadikan dalam roman (campuran fiksi dan sejarah) yang ditulis Matu Mona (Hasbullah Parindoeri) berjudul *Rol Patjar Merah Indonesia*. Roman ini diterbitkan oleh Centrale Courant en Boekhandel tahun 1938 di Medan. Penerbitan roman seperti karya Matu Mona ini merupakan salah satu torehan sejarah perbukuan yang menempatkan Medan pernah terkenal sebagai kota buku di Indonesia. Medan adalah kota tempat persinggungan para intelektual bangsa dan para sastrawan pada masa lalu.

Sejatinya, budaya buku Indonesia dari sisi kaum terpelajar ini tumbuh bersamaan dengan budaya buku dari sisi kaum sastrawan. Tidak dimungkiri bahwa sastra atau karya sastra telah menyemai bibit-bibit budaya buku pada anak-anak Indonesia masa lalu yang kemudian berubah serius menjadi virus yang mendorong perilaku rakus membaca.

Melek aksara menjadi pintu masuk utama untuk melek bacaan. Karena itu, budaya buku Indonesia dapat ditelusuri dari tumbuhnya kesadaran pendidikan yang bermula dari kesadaran mengenal aksara

dan membaca. Kesadaran ini telah dipelopori oleh tokoh-tokoh pergerakan Indonesia pada era modern.

Namun, keberaksaraan sendiri telah tumbuh sejak zaman dahulu di berbagai daerah di Indonesia yang terpisah oleh laut. Budaya penulisan kitab—yang tentu saja dimulai dari membaca—telah pula ada sejak zaman kerajaan berdiri kukuh di Nusantara meskipun hanya dikuasai oleh segelintir orang, terutama kaum bangsawan.

Jika titik sejarah perbukuan itu ditarik dari tanggal kebangkitan nasional, yakni berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, dapat disebut budaya buku telah mulai berkembang pada awal abad ke-20 di Indonesia. Namun, Boedi Oetomo memang bukan satu-satunya aktor kebangkitan bangsa pada masa itu. Ia, seperti ungkapan Latif (2009) ialah sekadar monumen dari sejarah arus kebangkitan yang melewati fase persiapan (*gestation*), fase pembentukan (*formation*), dan fase pematangan (*consolidation*).

Kehadiran ruang (wacana) publik pada fase persiapan kebangkitan bangsa sebagaimana tradisi intelektual di Eropa, hadir pula di Indonesia. Bibit-bibit ini disemai oleh dampak ikutan dari penerapan ekonomi Liberal pada paruh akhir abad ke-19 yang mendorong lahirnya pers-pers vernakular (berbahasa lokal) serta dalam penyebarluasan klub-klub sosial bergaya Eropa (Latif, 2009).

Melalui proses pendidikan, “mimikri”, dan mengonsumsi bacaan dari pers vernakular yang didirikan oleh orang-orang Eropa lalu juga oleh orang-orang Tionghoa peranakan, serta dengan membentuk perhimpunan-perhimpunan, para intelektual pribumi akhirnya dapat membentuk ruang (wacana) publik sendiri.

Wacana utama pada fase persiapan ini adalah isu *kemadjoean*. Isu inilah yang kemudian diangkat oleh para guru yang pada masa itu menjadi profesi paling banyak ditekuni kaum terdidik. Para guru itu merasa terpanggil memberikan pencerahan kepada sesama saudara sebangsa dan setanah air.

Guru-guru penulis pada masa itu bermunculan menulis artikel di pers-pers pribumi (bumiputra) yang mulai hadir pada awal abad ke-20. Sebelumnya kaum bumiputra telah dilibatkan sebagai bagian dari redaksi di pers-pers vernakular milik orang-orang Eropa dan Tionghoa peranakan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa lahirnya penerbitan bumiputra merupakan peniruan dari apa yang telah dipelajari dari pers vernakular orang-orang Eropa dan Tionghoa peranakan.

Tokoh pers pribumi awal yang sangat populer pada masa itu, di antaranya Abdoel Rivai (1871–1937) dan Tirto Adhi Surjo (1880–1918). Mereka berasal dari pelajar atau mantan pelajar Sekolah Dokter Djawa—lembaga pendidikan selama tiga tahun yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda untuk menyiapkan tenaga mantri cacar dengan gelar Dokter Djawa.

Rivai dalam tulisan edisi perdana (1902) di majalah *Bintang Hindia*, mengenalkan istilah ‘bangsawan pikiran’. Ia menggugat perbincangan tentang ‘bangsawan usul’—bangsawan yang lahir karena keturunan. Meskipun disebut bangsawan, pengetahuan dan capaian hanya seperti katak di bawah tempurung, tak ada gunanya menurut Rivai.

“Pengetahuan dan pencapaianlah yang menentukan kehormatan seseorang,” begitu argumentasi Rivai sehingga ia memunculkan istilah ‘bangsawan pikiran’.

Bangsawan pikiran menjadi tonggak yang melahirkan Boedi Oetomo. Perjuangannya dilanjutkan seiring dengan praktik Politik Etis yang dijalankan oleh Belanda melalui pendidikan untuk bumiputra. Maka pada zaman dahulu dikenal HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), MULO (*Meer Uitgebreid Lager Ondewijs*), dan AMS (*Algemeene Middlebare School*). Orang-orang terdidik dari golongan priyayi rendahan atau nonbangsawan kemudian semakin banyak jumlahnya.

Kemajuan pemikiran menjadi peta jalan yang telah diwariskan sebelumnya. Namun, kata ‘bangsawan’ dibuang sehingga melahirkan istilah ‘kaum terpelajar’ atau ‘pemuda-pelajar’ atau dalam ungkapan

bahasa Belanda disebut *jong*. Dari kaum inilah lahir generasi Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan Natsir. Generasi yang memberi tanda pada kedekatan luar biasa mereka terhadap buku sebagai kompas dari pemikiran manusia-manusia terpelajar.

Kemajuan Eropa buah dari Renaisans pada masa itu menjadi kunci terbukanya akses mempelajari bahasa bagi kaum terpelajar, Generasi Sukarno-Hatta. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap bahan bacaan dengan mendirikan Komisi Bacaan Rakyat berpengaruh signifikan terhadap lahirnya budaya buku yang lebih masif di Nusantara.

Melacak Jejak Sejarah Perbukuan Indonesia

Beberapa literatur terdahulu telah menampilkan wajah sejarah perbukuan di Indonesia. Kajian awal yang terbilang lengkap dapat disebutkan adalah disertasi Zubaidah Isa tahun 1972 di Indiana University. Isa menyusun disertasi berjudul “*Printing and Publishing in Indonesia: 1602-1970*” yang mengungkap sejarah percetakan dan penerbitan di Indonesia dari pertengahan abad ke-17 hingga abad ke-20 (1970).

Praktis beberapa literatur yang menguak sejarah perbukuan di Indonesia mengutip disertasi ini, di antaranya *50 Tahun Ikapi: Membangun Masyarakat Cerdas* (2000) dan skripsi S-1 Ilmu Sejarah yang ditulis oleh Hilmar Farid berjudul “Politik, Bacaan dan Bahasa pada Masa Pergerakan”. Melalui buku *50 Tahun Ikapi* Hawe Setiawan, Dody Mardanus, dan Nur Zain Hae cukup lengkap memperlihatkan perspektif perbukuan dari sudut pandang Ikapi sebagai asosiasi profesi penerbit yang kali pertama lahir di Indonesia (17 Mei 1950).

Sebuah tulisan ringkas, tetapi sangat penting tentang sejarah perbukuan Indonesia ialah karya Alfons Taryadi dalam Albatch dan

Hoshino (2015). Taryadi menulis artikel berjudul “Indonesia” yang menjadi bagian dari *International Book Publishing: Encyclopedia*. Ia menyusun periodisasi sejarah perbukuan Indonesia sebagai berikut:

1. Periode Kolonial yang terbagi atas tiga masa, yaitu Masa VOC, Masa Pemerintahan Republik dan Kerajaan Belanda, dan Masa Indo-Cina (Cina Peranakan);
2. Periode Penerbitan Pribumi; dan
3. Periode Indonesia Merdeka yang terdiri atas Masa Awal Perusahaan Penerbitan, Masa Penerbitan Tahun 1960-an dan 1970-an, dan Masa Perkembangan 1980-an dan 1990-an (Albatch dan Hoshino, 2015).

Berdasarkan studi literatur dan wawancara dengan narasumber, buku ini disusun dengan tujuan menguraikan sejarah perbukuan Indonesia sebagai kajian lanjutan dari literatur yang telah terbit sebelumnya. Buku dalam konteks ini ialah buku cetak modern yang dikenal sejak ditemukannya mesin cetak (hasil penyempurnaan) oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1446.

Dua abad kemudian, yakni abad ke-17 (1600-an), teknologi mesin cetak semakin sempurna dan canggih sehingga memicu ledakan publikasi di Eropa. Institusi media yang kemudian dikenal dengan nama penerbit (*publisher*) muncul di mana-mana. Secara umum para penerbit pada masa itu menjalankan dua usaha sekaligus, yaitu penerbitan pers (media berkala) dan penerbitan buku.

Buku menjadi produk media massa dan menempati posisi penting dalam arus pemikiran di Eropa. Eropa mengalami demokratisasi pemikiran melalui buku yang memicu munculnya Zaman Pencerahan (Renaissance). Penerbit kemudian menjadi sebuah tren usaha berdampingan dengan pencetak (percetakan). Industri ini juga melahirkan para penulis buku, profesi editor buku, dan kemudian profesi perancang/desainer buku.

Awal perbukuan atau penerbitan buku di Indonesia dipelopori oleh orang-orang Belanda yang membuka usaha percetakan dan penerbitan di Indonesia serta juga oleh kaum Tionghoa peranakan yang membuka usaha percetakan dan penerbitan, baik media massa berkala (pers) maupun buku. Kaum bumiputra terpelajar kemudian mencontoh usaha penerbitan ini lalu membuka usaha percetakan dan penerbitan dengan manajemen seadanya.

Menilik sejarah pada akhir abad ke-19 di Hindia sebagaimana terjadi di Eropa maka penerbitan buku selalu bersanding dengan penerbitan pers. Kiprah para penulis buku tidak dapat dipisahkan dari kiprah mereka di dunia pers atau jurnalistik.

Di sisi lain, ada hal penting yang diungkap oleh Yudi Latif (2009) melalui bukunya *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan* bahwa kebangkitan Indonesia melalui budaya buku tidak dapat dipisahkan dari kesastraan. Ia menguraikan bahwa perjuangan kebangkitan selalu dimulai dari kerja wacana. Ibaratnya tanpa kata, perjuangan kehilangan arah.

Generasi Sukarno-Hatta praktis mengembangkan wacana melalui kelompok studi, kerja jurnalistik, dan kesastraan. Hatta sejak 1924, aktif di Perhimpunan Indonesia berikut penerbitan jurnal *Indonesia Merdeka*, ia pun menulis puisi-puisi patriotik. Sukarno pada 1926 mendirikan *Algemene Studieclub* berikut penerbitan jurnal *Indonesia Moeda*. Saat yang sama ia aktif sebagai editor di majalah Sarekat Islam, *Bendera Islam* (1924–1927), bahkan selama masa pembuangannya ia menulis naskah drama⁷.

Demikian pula dengan Sjahrir. Ia terlibat dalam penerbitan jurnal *Daulat Rakjat*. Sjahrir juga aktif bersastra sebagai pemain sandiwara.

Mohammad Natsir aktif mengikuti beberapa kelompok diskusi dan terlibat intens di Persatuan Islam. Sejak tahun 1929 ia menekuni bidang jurnalistik dengan menjadi ko-editor di jurnal *Pembela Islam*.

Budaya buku yang berkembang di dunia, termasuk juga di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari lahirnya profesi perbukuan, seperti penulis buku, penerjemah buku, dan para pengembang buku (editor, ilustrator, dan desainer). Profesi itu pula yang dilakoni oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh pergerakan bangsa pada masa lalu meskipun mereka belajar secara autodidak dan belajar dari mentor-mentor orang Belanda.

Periodisasi Sejarah Perbukuan

Periodisasi sejarah perbukuan modern Indonesia dibagi ke dalam tiga zaman sebagaimana disajikan di dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Periodisasi Sejarah Perbukuan Modern Indonesia

Periodisasi	Pembagian	Ciri
Perbukuan Sebelum Kemerdekaan (1659-1945)	<ul style="list-style-type: none"> o Perbukuan pada Masa VOC o Perbukuan pada Masa Hindia Belanda <ul style="list-style-type: none"> • Penerbit Pemerintah Hindia Belanda • Penerbit Swasta Belanda • Penerbit Tionghoa Peranakan • Penerbit Bumiputra o Perbukuan pada Masa Pendudukan Jepang 	Masa ini merupakan masa pertama pada abad ke-17 atau pertengahan tahun 1600-an yang ditandai dengan berdirinya institusi media (penerbit) mengiringi pencetak (percetakan) di Indonesia. Penerbitan awal didirikan oleh pengusaha Belanda, diikuti oleh pengusaha Tionghoa Peranakan, dan kemudian pengusaha pribumi. Masa ini berlangsung lama selama hampir tiga abad hingga masuk ke zaman pendudukan Jepang di Indonesia.

Periodisasi	Pembagian	Ciri
<p>Perbukuan Setelah Kemerdekaan (1945-1998)</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Perbukuan pada Awal Kemerdekaan <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Pemerintah • Penerbitan Swasta o Perbukuan pada Masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin o Perbukuan pada Masa Orde Baru <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Pemerintah • Penerbitan Swasta 	<p>Masa ini merupakan masa kedua setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945. Penerbit Belanda henggang dari Indonesia dan juga penerbit yang dikuasai pemerintah Jepang diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Penerbitan bumiputra mulai bertumbuh kembang hingga memasuki masa Orde Baru.</p> <p>Pada masa ini terdapat dua masa pemerintahan di Indonesia, yaitu pemerintahan Sukarno dan pemerintahan Soeharto. Perkembangan perbukuan secara signifikan terjadi pada masa Soeharto memimpin atau disebut era Orde Baru. Pembagian submasa dengan merujuk pada pemerintahan semata-mata menunjukkan ciri kemajuan perbukuan yang tidak terlepas dari kebijakan politik perbukuan pemerintah Indonesia.</p>

Periodisasi	Pembagian	Ciri
Perbukuan Indonesia Baru	<ul style="list-style-type: none"> o Perbukuan pada Awal Reformasi <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Pemerintah • Penerbitan Swasta o Perbukuan Satu Dekade setelah Reformasi 	Masa ini merupakan zaman ketiga yang ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu Reformasi Indonesia dan peralihan ke milenium ketiga tahun 2000. Pada masa ini mulai muncul media baru yang dipicu internet dan mulai berkembangnya teknologi percetakan seperti <i>print on demand</i> (POD), <i>computer to plate</i> , dan <i>digital printing</i> . Demikian pula telah berkembang teknologi penerbitan seperti buku elektronik/buku digital.

Inisiatif Pusat Perbukuan

Penulisan dan penyusunan buku sejarah perbukuan ini merupakan inisiatif dari Pusat Perbukuan yang kini berada di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Pusat Perbukuan pada tahun 2022 telah berusia 35 tahun.

Dalam sejarahnya Pusat Perbukuan dibentuk berdasarkan Keppres RI Nomor 4 Tahun 1987 pada tanggal 6 Februari 1987. Lalu, tugas dan fungsi Pusat Perbukuan diperkuat kembali oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0274/O/1987 tanggal 8 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sejatinya organisasi Pusat Perbukuan didirikan sebagai lembaga permanen pasca dilaksanakan Proyek Buku Terpadu yang dimulai sejak tahun 1981 di bawah kendali Daoed Jusuf sebagai Menteri P&K pada masa itu. Pada tahun keenam pelaksanaan PBT, yakni tahun 1987 ketika

Fuad Hassan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Perbukuan didirikan. Kedudukan Pusat Perbukuan pada masa itu sebagai pelaksana tugas di bidang perbukuan yang berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Tahun berganti tahun, peran Pusat Perbukuan sempat menyurut sehingga kemudian digabung dengan Pusat Kurikulum menjadi Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) pada masa Menteri Muhammad Nuh. Mendiknas Muhammad Nuh mengeluarkan Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 22 Desember 2010.

Tugas Puskurbuk ialah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Tugas terkait perbukuan pada masa itu menjadi lebih ditekankan, terutama sejak berdirinya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang memiliki kewenangan dalam penilaian buku pendidikan.

Sampai kemudian tahun 2017, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan disahkan oleh DPR dan pemerintah. Di dalam Pasal 37 terdapat ketentuan tentang wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri. Representasi lembaga sebagai perwakilan Pemerintah Pusat tersebut kemudian diemban oleh Pusat Perbukuan.

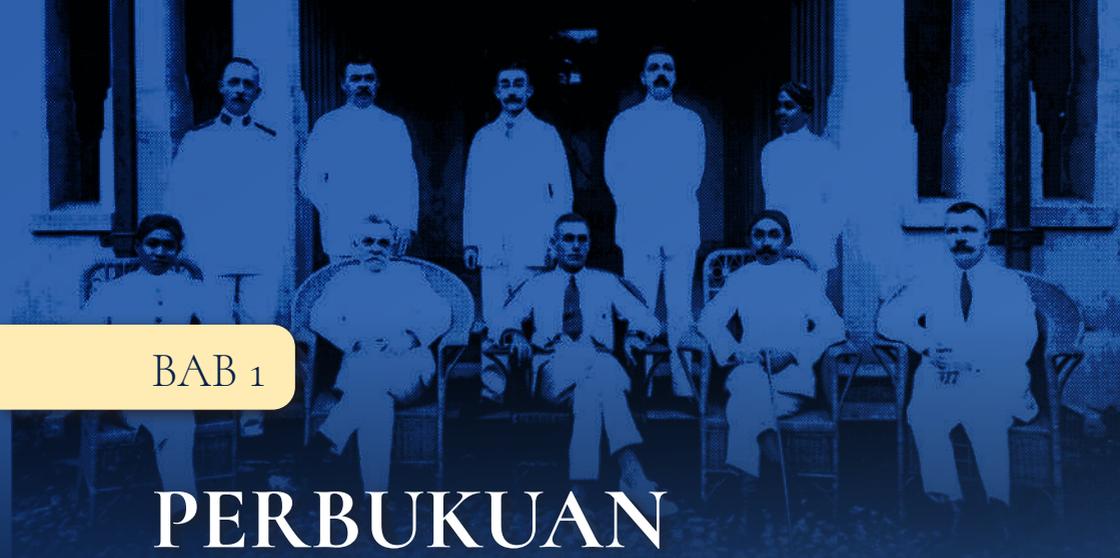
Perihal lembaga yang menangani urusan perbukuan ini juga diperkuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Lembaga perbukuan yang kini identik dengan Pusat Perbukuan mengemban fungsi berikut: (1) pembinaan dan perlindungan terhadap pelaku perbukuan; (2) riset dan pengembangan

sistem perbukuan nasional; (3) penilaian dan penerbitan buku; dan (4) pengawasan terhadap penerbitan buku dan pelaku perbukuan.

Sebelum keluarnya PP Nomor 75 Tahun 2019, Pusat Perbukuan sempat beralih di bawah Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (sebelumnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa). Keputusan ini dituangkan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Akan tetapi, organisasi Pusat Perbukuan pada tahun 2021 kembali berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk), Kemdikbudristek. Balitbangbuk kemudian berganti nomenklatur menjadi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Pusat Perbukuan berada di bawah BSKAP bersama dengan Pusat Kurikulum, Pusat Standar dan Kebijakan Perbukuan, serta Pusat Asesmen Pendidikan.

Buku ini menjadi sebuah ikhtiar Pusat Perbukuan sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap urusan perbukuan. Sejarah perbukuan menjadi penting untuk mengungkap jejak intelektualitas anak bangsa yang dibangun berbasis buku-buku pada masa lampau hingga masa kini.



BAB 1

PERBUKUAN SEBELUM KEMERDEKAAN (1659-1945)

*P*eriodo ini berlangsung cukup panjang antara tahun 1659 hingga 1944. Nuktah sejarah perbukuan Indonesia dapat ditelusuri dari berkembangnya Revolusi Industri di Barat yang ditandai salah satunya dengan penemuan mesin cetak bersejarah oleh Johannes Gensleich Zur Laden Zum Gutenberg di Jerman pada tahun 1446.

Setelah itu, pencetakan media massa, termasuk buku, secara besar-besaran pun terjadi. Eropa mengalami ledakan publikasi tercetak pada tahun 1600-an ketika mesin cetak hasil temuan Gutenberg semakin disempurnakan.

Awal munculnya perbukuan modern (buku tercetak) di Indonesia tidak terlepas dari peran VOC. Mereka memboyong mesin cetak, operator cetak, dan para ahli percetakan dan penerbitan untuk berkibrah di Indonesia demi menyiapkan publisitas bagi kepentingan kongsi dagang mereka.

Perbukuan pada Masa VOC

Titik tolak sejarah penerbitan dan pencetakan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas kongsi dagang Belanda yang bercokol di Nusantara. Tahun 1602 empat perusahaan dagang Belanda membentuk Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) sebagai kongsi dagang yang menguasai tanah jajahan. VOC didirikan dengan tujuan menghadapi persaingan dagang dengan Spanyol dan Portugis di Hindia.

Alhasil, kebutuhan akan dokumen-dokumen tercetak dan buku sebagai bahan pembelajaran tidak terhindarkan. Selain itu, diperlukan media publikasi untuk para pegawai VOC dan keluarganya di Hindia Belanda mengingat pada masa itu media cetak telah menjadi media massa yang digunakan juga untuk informasi dan hiburan.

Teknologi pencetakan saat itu telah berkembang di Eropa sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman pada tahun 1446. Mulai tahun 1462, teknik dan seni mencetak telah menyebar luas ke seluruh Eropa. Pada tahun 1500 sudah terdapat lebih dari 1.000 perusahaan pencetakan (percetakan) di Eropa (Scheder, 1983: 25).

Dua dekade setelah VOC menguatkan eksistensinya di Indonesia, mesin cetak kemudian didatangkan kali pertama pada tahun 1624 ke Indonesia Timur. Mesin cetak itu dibawa oleh Justus Heurnius dari Gereja Reformasi Belanda untuk tujuan mencetak naskah, risalah agama, dan buku teks bagi sekolah misionaris. Akan tetapi, mesin-mesin itu tidak berfungsi karena tidak ada operator cetak yang dapat menjalankannya (Hanna, 1988).

Kegiatan pencetakan sekaligus penerbitan baru benar-benar dimulai pada tahun 1659. Cornelis Pijl diketahui sebagai orang pertama yang terlibat dalam pencetakan dan penerbitan di Hindia Belanda. Ia memprakarsai penerbitan dan pencetakan almanak (buku berbasis waktu) *Tijdboek*. VOC menggiatkan aktivitas pencetakan dan penerbitan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah setempat, mendukung kegiatan misionaris, dan menyediakan bahan bacaan bagi pegawai VOC berkebangsaan Belanda yang melek huruf (Isa, 1972).

Pencetak dan penerbit pertama berada di Batavia yang sejak 1619 menjadi pusat perdagangan dan administrasi VOC. Pencetak dan penerbit tersebut pada dasarnya adalah subkontraktor VOC. Di antaranya, VOC membuat kontrak dengan Hendrik Brants, yang dikenal sebagai ahli penjilidan buku dari Amsterdam pada tahun 1668. Brants yang hanya menguasai penjilidan kemudian bekerja sama dengan Jan Bruyning yang dikenal sebagai juru cetak berpengalaman (Astraatmadja dan Pudjaatmaka, 1989: 88).

Dari kontrak tersebut didirikanlah City Printing House yang kemudian beralih ke swasta. Produk cetakan resmi di antaranya dua buku pelajaran sekolah Latin, yaitu *De Fabels van Aesop* dan *Zeede-Sangen voor de Bataviasche Jonkheijt* karya Steendam pada tahun 1671.

Pada tahun 1677, mereka mencetak kamus bahasa Belanda-Melayu dan pada tahun 1693, mereka mencetak Perjanjian Baru dalam bahasa Portugis—bahasa yang saat itu umum digunakan di Asia Timur.

Percetakan kedua yang didirikan VOC adalah Castle Printing House pada tahun 1718. Percetakan ini didedikasikan hanya mencetak keperluan VOC.

Selama kurun 1668–1795 publikasi tercetak yang diterbitkan oleh VOC mencakup publikasi pemerintahan (VOC)⁸, publikasi keagamaan, dan publikasi bervariasi. Total publikasi tercetak sebanyak 572. Publikasi pemerintahan (VOC) mendominasi, disusul oleh publikasi

keagamaan, dan publikasi bervariasi seperti ditampilkan di dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Publikasi VOC Periode 1679–1789 (Isa, 1972)

Produksi Publikasi Tercetak Pemerintahan, Keagamaan, dan Variasi selama Periode 1668–1795		
Jenis Publikasi	Jumlah Terbitan	Total
Pemerintahan		
Buku Daftar Nama	80	
Piutang dan Undang-Undang	297	
Lembaran Lelang	25	
Kontrak	18	
Transaksi	8	
Total		428
Keagamaan		
Buku Doa dan Katekismus	22	
Kotbah	52	
Lagu	4	
Mazmur	9	
Kisah-Kisah	10	
Total		97
Variasi		
Surat-Menyurat (Korespondensi)	13	
Belles-lettres	8	

Jenis Publikasi	Jumlah Terbitan	Total
Sejarah	6	
Kamus	15	
Almanak	3	
Surat Kabar	1	
Jurnal	1	
Total		47
Total Publikasi		57 ²

Semua publikasi tersebut terbit dalam bahasa Belanda, kecuali risalah agama dan kamus multibahasa. Pembacanya relatif sedikit. Pada tahun 1680, di seluruh Hindia Belanda, hanya ada 1.000 penduduk Belanda. Selama pertengahan abad ke-18, tentara Belanda berjumlah 10.000 orang, sementara pejabat pemerintah sipil Belanda berjumlah 8.000 orang.

Antara tahun 1659–1880, ada 27 pencetak/penerbit yang beroperasi yang semuanya berada di Batavia. Penerbitan pada masa kolonial sangat terbatas karena dibelenggu juga oleh peraturan *The Missionary Press* dengan pelayanan pada kegiatan misionaris hingga tahun 1814 di wilayah Timur, Amboina, dan Celebes, di bawah Gubernur Jenderal Daendels hingga tahun 1831. Adanya peraturan pers, penyensoran, dan persyaratan bahwa bahan cetak dibeli dari perusahaan semakin membatasi penerbitan komersial pada masa itu untuk berkembang.

VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 karena mengalami kebangkrutan. Tanggal 1 Januari 1800, pemerintah Kerajaan Belanda resmi mengambil alih kekuasaan VOC di Nusantara. Aset-aset percetakan milik VOC juga diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Perbukuan pada Masa Pemerintah Hindia Belanda

Pada periode 1795–1815 terjadi Revolusi Prancis dan perang Napoleon yang menyebabkan perubahan di Belanda. Hindia Belanda sempat terputus dari Negeri Belanda pada tahun 1795–1813. Pulau-pulau jajahan diambil alih kali pertama oleh Prancis (1810) dan kemudian oleh Inggris (1811–1814). Ketika terjadi perdamaian di Eropa, diadakan Kongres Wina (1814–1815). Hindia kemudian dikembalikan kepada Belanda dengan perjanjian.

Pasca-VOC, terbit beberapa surat kabar yang dicetak secara pribadi (pers vernakular), antara lain (1) *Bataviaasch Advertentieblad* (*Batavia Advertising Paper*), diterbitkan di Batavia pada tahun 1827; (2) *Nederlands-Indisch Handelsblad* (Kertas Komersial Hindia Belanda) terbit 1829. Surat kabar ini bagian dari perusahaan komersial swasta Belanda dipimpin Du Bus de Gisignies, sebelumnya Gubernur di Brabant Selatan (Belanda) ditunjuk pada tahun 1825 sebagai kepala dari Raad der Aziatische Bezittingen (Dewan Kepemilikan Asiatik) di Hindia Belanda.

Penerbit Pemerintah Hindia Belanda

City Printing House dan Castle Printing House kemudian dimerger menjadi Lands Drukkerij⁹ pada tanggal 21 September 1809 berkedudukan di Weltevreden—lokasi yang pernah menjadi kantor Balai Poestaka awal di Jakarta Pusat. Perusahaan ini merupakan cikal bakal perusahaan Percetakan Negara yang kemudian menjadi Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Lands-Drukkerij menjadi salah satu percetakan yang paling berkembang di Asia. Selain Lands-Drukkerij, terdapat pula percetakan milik misionaris, warga negara Belanda, dan pengusaha Tionghoa.

Antara tahun 1815–1942, setidaknya ada sepuluh percetakan misionaris yang menerbitkan traktat, Alkitab, dan materi sekuler untuk digunakan di sekolah misi. Bahasa yang digunakan dalam penerbitan, yaitu berbagai bahasa daerah, bahasa Melayu, bahasa Belanda, bahasa Tionghoa, dan bahasa Inggris.

Bahan-bahan cetak ini didistribusikan secara gratis. Namun, percetakan dan penerbit swasta terhambat oleh peraturan dan sensor yang diberlakukan oleh penguasa kolonial.

Penerbit Swasta Belanda

Pada tanggal 10 November 1856, “Reglement on de Drukwerken di Nederlands Indie” dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan bahwa semua pencetak, penerbit, dan penjual bahan cetakan harus mengajukan permohonan lisensi. Selain itu, sebelum diedarkan, salinan dari setiap bahan cetakan harus dikirimkan secara gratis kepada pemerintah. Sanksi bagi pelanggar peraturan ini adalah penyitaan barang cetakan, bahkan penutupan pabrik percetakan yang bersangkutan.

Pelaku penerbitan untuk materi apa pun yang dianggap berbahaya dalam kriteria Pemerintah Hindia Belanda diancam dengan hukuman penjara, bahkan dilarang menjalankan profesinya. Larangan tersebut bersifat umum dan tergolong “pasal karet”. Dengan demikian, segala publikasi yang dianggap tidak pantas dilarang beredar (Isa, 1972).

Pada tahun 1906, peraturan tersebut diubah. Oleh karena itu, penulis bertanggung jawab atas karya tulis tersebut, sedangkan distributor, penjual, dan penerbit hanya bertanggung jawab jika mereka menolak untuk mengidentifikasi penulisnya. Selain itu, materi cetak harus diserahkan kepada pemerintah setelah, bukan sebelum publikasi.

Akan tetapi, pada tahun 1931, peraturan tahun 1856 dipulihkan dengan peraturan baru, yang dikenal sebagai *Persbreidel Ordonnantie*,

yang memberikan hak kepada gubernur jenderal untuk melarang penerbitan yang dianggap mengganggu ketenteraman dan ketertiban (Farid, 1991).

Meninjau sejenak perkembangan teknologi mesin cetak, pada awal abad ke-19 adalah permulaan zaman industrialisasi atau disebut dengan istilah Revolusi Industri 1.0. Perusahaan percetakan berdiri di Eropa, begitu pula yang disebut dengan 'institusi media'.

Friedrich König menciptakan mesin cetak berkecepatan tinggi (*highspeed press*) pada tahun 1812. Dengan demikian, mesin-mesin cetak yang dikelola perusahaan Belanda juga sudah memasuki tahap teknologi yang lebih modern. Perkembangan selanjutnya menunjukkan perkembangan 'institusi media' di Indonesia yang diawali dengan industri pers bersamaan dengan industri buku. Percetakan berdiri bersamaan dengan penerbitan.

Nathaniel Ward, berkebangsaan Inggris, seorang agen perkumpulan Misionaris Baptis, mendirikan institusi media (penerbit) di Bencoolen (Bengkulu, Sumatra) pada tahun 1819. Saat lembaga pers itu didirikan, Bencoolen ialah pusat pemerintahan East India Company (Inggris) di bawah Thomas Stamford Raffles. Raffles tertarik pada lembaga pers sebagai alat pendidikan.

Mission Press, menerbitkan karya religius dan sekuler. Publikasi sekuler terdiri atas teknik pertanian lokal, buku teks sekolah dasar, dan publikasi resmi East India Company yang kebanyakan berbahasa Inggris. Publikasi religius paling ambisius adalah *Perjanjian Baru di Malay*, diterjemahkan Ward. Lembaga pers ini nonaktif pada tahun 1826, setelah Bencoolen dialihkan kepemilikannya ke Belanda pada tahun 1824 sebagai pertukaran kepemilikan Inggris dan Belanda atas tanah-tanah jajahan.

Pada tanggal 19 Februari 1835, keluar izin menjual buku sains dan sastra kepada publik. Firma buku pertama yang didirikan oleh swasta di Hindia Belanda ialah Cijfveer and Company pada tahun 1839.

Kemudian, tahun 1842 firma tersebut berganti nama menjadi Cijfveer & Knollaert. Melalui suksesi pemilik, diubah lagi menjadi Perusahaan Ukeno, pada 1846, digantikan Lange en Compagnie. Pada tahun 1869 kembali berubah menjadi Bruyning en Wijt.

Dalam referensi *Indeks Malay* disebutkan ada beberapa karya bidang grafika Hindia Belanda yang ditemukan. Telah tampak berbagai literatur Islami yang diterbitkan di berbagai daerah Hindia Belanda.

Pada tahun 1845 Oliphant en Compagnie, penerbit swasta di Semarang, Jawa Tengah (juga menerbitkan buku teks pertama) memulai penerbitan berkala mingguan, *Semarangsche Nieuwsen Advertentieblad* (*Semarang News Paper and Advertising*). Majalah ini digantikan pada tahun 1852 oleh *De Locomotief* menjadi harian dalam bahasa Belanda di Jawa Tengah.

De Locomotief ialah salah satu koran yang memiliki pelanggan di Belanda. Editor pertama *De Locomotief* pada tahun 1875 adalah C. E. van Kesteren, pemilik perusahaan kertas dan mesin cetak. Penerbitan *De Locomotief* ditangguhkan selama tahun perang 1942–1945, tetapi dilanjutkan publikasinya pada tanggal 1 September 1947–1955.

The Bataviaauch Advertentieblad terbit tahun 1851, tetapi 1852 diganti menjadi *Java Bode Java Messenger* dengan Conrad Busken Huet sebagai editor pertama. Majalah ini diterbitkan oleh W. Bruining, yang datang ke Batavia pada tahun 1848 sebagai pencetak. Surat kabar tidak diperkenankan memuat pengumuman lelang untuk menghindari persaingan dengan pemerintah. Hal itu bertahan selama hampir sembilan puluh tahun sampai terjadinya invasi Jepang.

Penerbit Belanda mulai memfokuskan pembaca sasaran pada masyarakat di luar bangsa Belanda atau masyarakat pribumi yang melek huruf. Bahasa Jawa dijadikan pilihan bahasa pengantar. Terbitlah kemudian *Bromartani*, surat kabar mingguan berbahasa Jawa pertama pada tanggal 25 Januari 1855. Selain itu, terbit pula surat kabar *Poespitamantjawarna* yang juga berbahasa Jawa.

Penggunaan bahasa Jawa dianggap terlalu sempit, sementara itu bahasa Melayu mulai berkembang luas pemakaiannya. Penerbit E. Fuhri dari Surabaya kemudian menerbitkan surat kabar dalam bahasa Melayu bernama *Soerat Kabar Bahasa Melaijoe* yang merupakan surat kabar pertama dalam bahasa Melayu (5 Januari 1856). Surat kabar ini hanya terbit 52 edisi.

Pada dasawarsa tersebut beberapa surat kabar berbahasa Melayu bermunculan, di antaranya bulanan *Bintang Oetara* (Rotterdam, 5 Februari 1856), *Soerat Chabar Betawi* (Batavia, 3 April 1858), mingguan *Selompret Melayoe* (Semarang, 3 Februari 1858), surat kabar *Bintang Timoor* (Surabaya, 10 Mei 1862), dan mingguan *Biang-Lala* (Batavia, 11 September 1867).

Pada paruh kedua abad ke-19 penerbitan surat kabar dimulai di pulau-pulau luar Jawa di Hindia Belanda. Di Sumatra, *Padangsch Nieuwsen Advertentieblad* (Padang News and Advertising Paper) diterbitkan selama tahun 1859–1862 lalu menjadi *Sumatra Courant* (Sumatra Paper) pada tahun 1862, dan berlanjut hingga 1870. Di Sulawesi penerbitan *Macassaarsch Weekblad* (*Macassar Weekly*) dimulai pada tahun 1861, berubah nama pada tahun 1862 menjadi *Makassaarsch Handelsen Advertentieblad* (*Makassar Trade and Advertising Paper*), dan dilanjutkan 1870. Semua surat kabar itu didanai dan dikelola oleh bangsa Belanda, termasuk reporter lokal dan reporter berita berasal dari Belanda.

Periode tahun 1900 memperlihatkan bahwa penerbitan dan percetakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan para pengusaha Belanda adalah semata untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri. Penerbitan dan percetakan tersebut untuk mendukung aktivitas bisnis dan misionaris di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Karena itu, publikasi masih relatif terkendali.

Beberapa publikasi keagamaan Islami tercetak mulai terbit menggunakan huruf pegon¹⁰, begitu pula publikasi dalam bahasa

Melayu. Materi yang dipublikasikan ke khayalak kebanyakan ialah berita, iklan, serta pendidikan misionaris dan keagamaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada awal abad ke-20 mulai berkembang dan meluas penggunaan bahasa Melayu. Banyak surat kabar berbahasa Melayu terbit di samping berbahasa daerah (Jawa). Surat kabar sebagai media informasi juga digunakan sebagai media iklan bagi para pedagang yang kebanyakan adalah kaum perantau dari Tiongkok.

Penggunaan bahasa Melayu ini kemudian mendorong Pemerintah Hindia Belanda menciptakan bahasa “Melayu Tinggi”¹¹ yang dalam istilah Ajip Rosidi (2000: 366) disebut sebagai bahasa Melayu rekayasa. Pemerintah Hindia Belanda enggan menggunakan istilah ‘bahasa Indonesia’ yang dicetuskan dalam Soempah Pemoeda tahun 1928.

Bahasa Melayu Tinggi merupakan bahasa yang distandardisasi melalui pemberlakuan Ejaan Van Ophuijsen. Penggunaan bahasa ini sebagai bahasa tulis dimaklumkan pada penerbitan Balai Poestaka.

Penerbit Tionghoa Peranakan

Pedagang dan pengusaha Tionghoa di Hindia Belanda merasa perlu menguasai bahasa Belanda, termasuk bahasa kaum pribumi yang tengah berkembang, yakni bahasa Melayu. Hal ini didorong berkembangnya publikasi tercetak sehingga mereka harus mengikuti informasi perdagangan yang dimuat di surat kabar. Para perantau Tionghoa ini kemudian mendorong keturunan mereka untuk belajar bahasa Belanda dan bahasa Melayu melalui pendidikan formal dan nonformal.

Selanjutnya, lahirlah generasi muda peranakan Tionghoa yang menguasai bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Mereka kemudian menjadi penulis/pengarang dan penerbit dengan mengalihbahasakan kisah-kisah dari Negeri Tiongkok ke dalam bahasa Melayu.

Yap Goan Ho, tokoh peranakan Tionghoa yang disebut sebagai orang pertama menjalankan usaha percetakan pada tahun 1883. Ia menerbitkan beberapa karya terjemahan dari buku-buku Tionghok. Selanjutnya, dua tahun kemudian Lie Kim Hok mendirikan usaha percetakan juga.

Lie Kim Hok: Bapak Melayu Tionghoa

Julukan tersebut pantas diberikan kepada Lie Kim Hok (LKH) atas jasanya menulis buku bertajuk *Kitab Darihal Perkataan-perkataan Melajoe* yang lebih dikenal dengan *Kitab Eja. A.B.C* (1884). Buku tersebut berisi aturan-aturan penggunaan bahasa Melayu Tionghoa peranakan atau bahasa Melayu rendah yang jamak digunakan di daerah Betawi (Melayu Betawi).

Pemerintah Hindia Belanda membuat dikotomi ragam bahasa Melayu menjadi dua: Melayu tinggi (dialek Riau) dan Melayu rendah (dialek non-Riau)—Melayu rendah diistilahkan juga Melayu pasar atau Melayu Cina.

LKH dilahirkan dan dibesarkan di Buitenzorg (Bogor). Awalnya, LKH mengembangkan bahasa Melayu rendah di daerah Jawa Barat, kemudian menyebar ke berbagai daerah meliputi Jawa Timur, Medan, Banjarmasin, hingga Palembang. Persebaran ini dipengaruhi oleh keterlibatan LKH dalam memopulerkan bahasa Melayu rendah sebagai bahasa pers di sejumlah surat kabar. Persebaran bahasa Melayu rendah dengan ragam ejaan yang dipelopori LKH, memosisikannya sebagai penyeimbang bahasa Melayu tinggi yang menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Dengan demikian, pers dan penerbitan berbahasa Melayu rendah menjadi media perlawanan terhadap Balai Poestaka dengan hegemoni bahasanya.

Perkenalan LKH dengan dunia pers dimulai ketika ia belajar di sekolah swasta Tionghoa di bawah bimbingan misionaris D.v.J. Van der Linden. Sang misionaris memiliki percetakan yang menerbitkan majalah *De Opwekker* dan *Bintang Djohar*.

Pada tahun 1886, LKH sempat memiliki saham surat kabar *Pemberita Betawi* di Batavia (Jakarta). Selama hidupnya, LKH menulis di beberapa surat kabar, seperti *Pemberita Betawi*, *Bintang Barat*, *Domingoe*, *Dinihari*, *Hindia Olanda*, *Taman Sarie*, dan *Bintang Betawi*.

LKH juga dikenal sebagai penulis novel *Thjit Liap Seng* atau *Bintang Toedjoe* pada tahun 1886. Novel ini dianggap sebagai novel pertama dalam dunia sastra Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu rendah. Hal ini karena karya-karya sastra lain yang terbit pada masa itu merupakan terjemahan dari karya berbahasa Eropa atau Arab.

Pada dasawarsa 1880-an, sedikitnya ada 40 karya terjemahan dari cerita-cerita asli Cina. Salah satu karya terjemahan yang terkenal ialah *Kisah Tiga Negara (Tjerita Dahoeloe kala di benoea Tjina)*, tersalin dari tjeritaan boekoe Sam Kok). Pada tahun 1903–1928, penerbitan peranakan Tionghoa mampu menghasilkan sekira seratus novel karya asli dari dua belas perarang Tionghoa peranakan.

Menjelang akhir abad kesembilan belas, sejumlah perusahaan percetakan lainnya mulai beroperasi, seperti Kho Tjeng Bie & Company dan Tjoei Tjoei Jang. Pada awal 1900-an, perusahaan percetakan Tionghoa peranakan mulai bermunculan di banyak kota.

Banyak dari perusahaan Tionghoa peranakan ini juga merupakan penerbit surat kabar. Pada tahun 1890, ada sebelas surat kabar di beberapa kota besar di Jawa; pada tahun 1912, jumlah surat kabar telah berkembang menjadi tiga puluh enam. Taryadi (2015) menyampaikan hal menarik untuk dicatat bahwa toko buku juga berperan dalam perkembangan penerbitan pada masa ini.

Sebagai contoh adalah Kwee Seng Tjoen, seorang penulis dan penerjemah yang memiliki toko buku dan terlibat dalam penerbitan buku. Kasus menarik lainnya adalah kasus Tan Tjan Nio, salah satu dari sedikit wanita di penerbitan, yang memiliki toko yang menjual pakaian

wanita di Batavia. Pada tahun 1919, ia mulai menerbitkan novel yang ditulis oleh penulis Tionghoa peranakan. Dia juga menggunakan publikasinya untuk menjalankan iklan untuk tokonya. Publikasi sastra penerbit Tionghoa peranakan pada abad XIX telah diakui sebagai cikal bakal sastra Indonesia modern.

Salah satu media publikasi dari Tionghoa peranakan yang berpengaruh adalah *Sin Po*, yang mulai diterbitkan pada tahun 1910 sebagai media berita mingguan. Pada tahun 1912, media publikasi ini menjadi harian dengan seorang Eropa, J. R. Razoux, sebagai editor utamanya, berlanjut sampai invasi Jepang hingga kemudian lahirnya Republik Indonesia. Media publikasi lain yang didanai Tionghoa peranakan dan berpengaruh ialah *Keng Po*, yang mulai diterbitkan pada tahun 1923 dan dilanjutkan publikasi setelah Indonesia merdeka.

Penerbit Bumiputra

Semangat nasionalisme yang berkembang pada akhir abad ke-19 juga menyebabkan munculnya pers pribumi, yaitu surat kabar yang diterbitkan dalam bahasa Melayu oleh orang Indonesia. Sebagai contoh jurnalisme yang matang, publikasi ini tidak signifikan. Akan tetapi, sebagai refleksi dari perasaan nasionalis yang tertekan, kehadirannya cukup mewakili.

Berbagai publikasi tidak semata ditujukan untuk menyebarkan pencerahan, tetapi dirancang untuk memelihara kesadaran nasionalis. Secara halus, mengingat sensor yang berat, publikasi ini menentang pemerintahan kolonial Belanda. Dapat dilihat beberapa nama dari surat kabar mencerminkan perasaan nasionalisme yang semakin meningkat. Misalnya, *Soeara Merdeka* (*Soeara Kebebasan*), *Soeara Rakjat*, *Soeara Perdjoeangan*, *Kilat* (Petir), *Api*, dan *Benih Merdeka* (*Seed of Freedom*).

Percetakan bumiputra pertama didirikan di Riau oleh Raja Muhammad Yusuf al Ahmadi (1858-1899) di Pulau Penyengat pada tahun 1894. Percetakan ini membedakan dua penerbitan. Jika

yang dicetak itu bukan untuk kepentingan langsung urusan dinas kerajaan Riau-Lingga, maka materi itu diberi cap dengan Mathba'at al Ahmadiyah. Sebaliknya, jika materi yang dicetak merupakan bahan-bahan kepentingan kerajaan, hasil cetakan diberi cap dengan Mathba'at al Riauwyah (Arman, 2014).

Di antara percetakan bumiputra pertama di Hindia Belanda yang sangat berpengaruh adalah NV¹² Javaansche Boekhandel en Drukkerij en handel in schrijffbehoefden (Medan Prijaji), yang didirikan oleh R. M. Tirto Adhi Soerjo dan Haji Samanhoedi. Perusahaan percetakan dan perdagangan buku ini memiliki cabang di Batavia, Bandung, dan Buitenzorg (sekarang Bogor).

Tirto Adhi Soerjo

Tirto Adhi Soerjo disebut sebagai perintis persuratkabaran dan kewartawanan nasional Indonesia. Tirto membidani kelahiran surat kabar *Soenda Berita* (1903-1905), *Medan Prijaji* (1907), dan *Putri Hindia* (1908). Selain itu, ia juga mendirikan Sarikat Dagang Islam.

Medan Prijaji dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu, dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan, dan wartawannya adalah bangsa pribumi.

Tirto disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan pembentuk pendapat umum. Dia juga berani menulis kecaman-kecaman pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Kiprah Tirto terhenti ketika ia ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara.

Selain Tirto, tokoh lain adalah Mohamad Misbach atau dikenal dengan sebutan Haji Misbach. Ia mendirikan surat kabar *Medan Moeslimin* (1915) dan *Islam Bergerak* (1917). Haji Misbach menggunakan surat kabar untuk mengkritik keras kebijakan pemerintah kolonial Belanda.

Koran terbitan perusahaan ini juga mengusung nama *Medan Prijaji*. Selanjutnya, banyak organisasi pribumi yang memiliki dan menjalankan perusahaan percetakan—misalnya, NV Sinar Djawa, yang dikelola oleh pimpinan Sarekat Islam di Semarang.

Dibandingkan dengan Lands Drukkerij, percetakan dan penerbit swasta bumiputra sangat tertinggal. Peredaran publikasi mereka terbatas, hanya berjumlah sekira 1.500 eksemplar sekali terbit. Mereka jarang memiliki agen distribusi yang andal dan efektif untuk memasarkan publikasi mereka di seluruh Hindia.

Karena kekurangan modal, percetakan swasta kesulitan bersaing dengan percetakan pemerintah Hindia Belanda dalam hal produksi dan distribusi. Namun, patut dicatat bahwa dari tahun 1880 hingga 1920, banyak karya fiksi prosa diterbitkan dalam bahasa Melayu. Jumlah karya-karya ini meningkat tajam setelah amandemen peraturan pers tahun 1856. Jurnal-jurnal dan majalah-majalah periode ini memuat cerita (roman) bersambung yang ditulis oleh para jurnalis, seperti R. M. Tirto Adhisoerjo, Mas Marco Kartodikromo, dan Abdoel Moeis.

Persaingan yang tidak seimbang memang mewarnai perkembangan penerbitan-percetakan Belanda dan penerbitan-percetakan bumiputra dengan berbagai faktor di dalamnya. Penerbitan-percetakan Belanda selain berbahasa Belanda yang banyak pembacanya pada masa itu, juga memuat iklan yang dapat menambah pemasukan. Tidak hanya orang asli Belanda yang membaca, tetapi kaum pribumi yang sudah melek huruf juga membaca publikasi dari penerbit Belanda yang jelas-jelas lebih profesional dan kuat secara permodalan.

Adapun penerbitan-percetakan bumiputra hanya memiliki sedikit pelanggan dan nyaris tanpa iklan. Dengan demikian, penerbitan-percetakan bumiputra kesulitan berkembang sekaligus juga tidak mampu lagi berlangganan informasi di kantor berita koran Belanda ANETA (Algemeen Nieuwsen Telegraaf Agentschap) yang terbentuk pada tahun 1917. ANETA sendiri berfungsi ganda, yaitu untuk memberi

informasi kepada Hindia Belanda tentang berita dari Belanda, dan sebaliknya memberi Belanda berita tentang Hindia Belanda.

Selain persoalan teknis dan pemasaran, penerbitan-percetakan bumiputra juga kekurangan bahan baku naskah dari para penulis pribumi karena kebanyakan penulis pribumi direkrut untuk menulis di penerbit dan pencetak milik Belanda. Hal ini terlihat pada kemajuan Balai Poestaka yang menjadi salah satu penerbit elit karya sastra pada zaman itu.

Pada masa tersebut juga terjadi kesulitan dalam pengadaan bahan baku kertas. Untuk memenuhi kebutuhan kertas, pemerintah Belanda terpaksa mengimpor kertas dari Tiongkok sampai kemudian didirikanlah pabrik kertas di Hindia Belanda pada tahun 1920. Namun, impor dan produksi bahan baku kertas ini tentu lebih diprioritaskan bagi penerbit-pencetak pemerintah kolonial dan milik bangsa Belanda.

Pada masa 1900-an awal ini juga muncul percetakan-penerbitan lokal seperti di Sumatra (Medan, Padang, Bukittinggi). Setelah muncul penerbitan media berkala (koran), muncul pula penerbit-penerbit majalah dan buku roman sekitar tahun 1930-an. Selain itu, ada juga penerbit-penerbit buku sastra, seperti Sarkawi, Loekisan Poedjangga, dan beberapa yang lain.

Di Jawa Barat beberapa penerbit kecil menerbitkan buku bacaan dan buku berbahasa Sunda, di antaranya adalah penerbit Dachlan Bektie, Koesradie, dan Economic. Di Jawa Tengah (Semarang) ada penerbit Masman & Stroink yang menerbitkan buku roman, di antaranya karya Marco Kartohadikromo. Di Jawa Timur (Surabaya) muncul penerbit Pembela Islam yang dipimpin oleh A. Hasan yang menerbitkan majalah *Pembela Islam* dan buku-buku agama, termasuk tafsir Al-Qur'an berjudul *Al-Furqon*.

Pada tanggal 26 Januari 1922 berdiri Canisius Drukkerij dengan 2 mesin dan 3 orang pegawai di gudang bekas pabrik besi kompleks Bruderan FIC, Yogyakarta. Pendirinya Br. Bellinus, FIC. Delapan

mesin baru kemudian didatangkan. Percetakan ini didirikan untuk mendukung misi penyebaran agama Katolik. Percetakan ini menjadi cikal bakal Penerbit Kanisius setelah kemerdekaan.

Di Ende, Flores pada tahun 1926 didirikan percetakan dan penerbitan bernama Arnoldus yang didirikan oleh Pater Petrus Noyen. Percetakan ini kemudian menjadi cikal bakal dari percetakan dan penerbitan Nusa Indah yang berdiri pada tahun 1976 di Indonesia bagian Timur.

Adapun percetakan dan penerbitan milik Belanda sudah lebih dulu berdiri, seperti J.B. Wolters, W. Versluys, Noordhoff-Kolff, dan H. Storm yang kemudian menguasai dunia penerbitan di Tanah Air.

Pada tahun 1933, Soetan Takdir Alisjahbana bersama teman-temannya dalam “Grand Old Man of Letters” mendirikan sebuah perusahaan penerbitan yang diberi nama Poedjangga Baroe yang khusus menerbitkan majalah sastra berbahasa Indonesia. Poedjangga Baroe juga menerbitkan buku-buku sastra, dongeng, dan legenda. Poedjangga Baroe semakin berkembang lalu berubah menjadi Penerbit Dian Rakyat setelah kemerdekaan.

Di Parijs van Soematra alias Kota Medan, muncul penerbit-penerbit partikelir yang menyemarakkan penerbitan roman. Lubis (2020) mengungkapkan bahwa pada awal abad ke-20, Kota Medan merupakan tempat tinggal, tempat persinggahan, tempat belajar, dan berjuang bagi banyak tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Para perantau yang pernah belajar di Jawa dan Belanda datang dengan semangat pembaruan. Tercatat tokoh-tokoh nasional yang pernah bersentuhan dengan Medan, yaitu Raden Soetoko, Tan Malaka, Abdoel Moeis, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Soetan Sjahrir.

Hamka, seorang mubalig dari Sumatra Barat, dianggap punya andil dalam penerbitan buku roman di Medan. Setelah menunaikan haji pada tahun 1927, Hamka singgah di Kota Medan dan menulis roman yang legendaris berjudul *Si Sabariah*. Hamka memang berniat memasuki

dunia karang-mengarang. Ia menemui redaktur Pelita Andalas yang dimiliki oleh orang Tionghoa peranakan. Ketua pengarangnya pada masa itu adalah J. Koning (orang Belanda) dan Yunus Is. Hamka kemudian memimpin majalah *Pedoman Masyarakat* yang membuatnya bolak-balik Padang-Medan (Lubis, 2020).

Roman Medan awalnya muncul sebagai cerita bersambung di majalah berukuran kecil. Roman-roman ini mulai muncul pada tahun 1930-an yang diterbitkan oleh penerbit dari Sumatra (Medan, Padang, Bukittinggi) dan Jawa (Solo). Roman itu terbit sekali, dua kali, atau tiga kali dalam sebulan. Penerbitan roman ini menunjukkan budaya baca-tulis yang telah berkembang di Hindia Belanda sebagai pemantik keliterasian masyarakat meskipun dicibir sebagai “bacaan liar” dan “bacaan picisan”. Roman Medan merupakan antitesis dari novel-novel atau roman Balai Poestaka.

Penerbitan Roman Medan

Telah disampaikan sebelumnya bagaimana beleid (kebijakan) Pemerintah Hindia Belanda membuat “diskriminasi” terhadap bahasa Melayu. Pemerintah Hindia Belanda melalui ahli bahasa Melayunya, C. A. van Ophuijzen, menetapkan bahasa Melayu-Riau-Johor sebagai bahasa Melayu Tinggi.

Perlawanan terhadap penggunaan bahasa Melayu tinggi yang diterapkan pada buku-buku terbitan Balai Poestaka dilakukan oleh penerbit Tionghoa peranakan dan penerbit bumiputra. Dari Medan muncul penerbitan roman yang diprakarsasi penerbit partikelir (Lubis, 2018).

Roman merupakan karya sastra yang menjadi ciri sastra Indonesia sebelum perang. Faizah Soenoto dalam Lubis (2020) membagi roman Indonesia pada tiga kutub besar, yaitu Roman Balai Poestaka, Roman Picisan, dan Roman Melayu-Tionghoa.

Pemerintah Belanda menganggap “sepi” penerbitan roman oleh penerbit-penerbit partikelir yang relatif bermodal kecil. Sampai kemudian terjadi konferensi roman pada tanggal 18 Desember 1939 di Medan. Konferensi itu dihadiri oleh perwakilan pengarang roman, wartawan, dan penerbit, di antaranya Joesoef Sou’yb, Hasan Noel Arifin, M. Yunan Nasution, Mahals, Tamar Djaja, Hamka, A. W. Rata, Mutu Mona, Si Uma, A. Damhoeri, Yusuf Achmad, M. Dien Yatim, Loetan Gani, dan Husein. Kemudian, Adi Negoro ditunjuk sebagai ketua konferensi yang melahirkan kesepakatan penting bahwa penerbitan roman dianggap perlu untuk kepentingan kemajuan bacaan rakyat dan mutunya perlu diperbaiki sehingga roman-roman yang bersifat “cabul dan merusak susila” dapat dihentikan riwayatnya (Lubis, 2018).

Konferensi ini menyadarkan Pemerintah Hindia Belanda sebagai sebuah “perlawanan” penerbit terhadap hegemoni Balai Poestaka sebagai “pusat buku” pemerintah kala itu. Roman Medan menjadi sangat terkenal sebagai bacaan rakyat yang menyajikan kehidupan faktual masyarakat Medan pada masa itu.

Komisi Bacaan Rakyat dan Balai Poestaka

Politik etis sangat berpengaruh pada aktivitas penerbitan dan pencetakan di Hindia Belanda meskipun aktivitas ini masih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Bahasa Melayu sudah mulai digunakan, tetapi hanya untuk tujuan instruksional di sekolah, selebihnya menggunakan bahasa Belanda.

Referensi *Index Malay* menyebutkan beberapa karya yang terbit pada periode ini, di antaranya (1) *Husn al-Akhlak* 1900 di Surabaya;

(2) Panjsurah 1903 (Straits Settlements dan Netherlands India); (3) *Burdah* 1904 (Straits Settlement, Netherlands India, dan British India); (4) Kalender tahun 1920 (Netherlands East Indies & Singapore); (5) *Pelajaran Hal Kejadian* 1920 (Jawa and Sumatra); (6) **Bible: Luke** 1910 di Bali; (7) *Perukunan* 1901 di Banjar Kalimantan. Di Riau-Lingga terdapat (1) *Ghayat al-Muna* 1902; (8) *Ali Syar* 1904 (Pulau Penyengat); (9) *Maulud* 1909 (Pulau Penyengat); (10) Surat Bruinkops 1911 (Tanjung Pinang); (11) *Primbunan Sembahyang* 1911 (Tanjung Pinang), (12) *Primbunan Sembahyang* 1914 (Tanjung Pinang). Di Sumatra terdapat (1) *Kurrat al-Ain* 1900 (Jambi), (2) *Parsiajaran* 1900 (Pansur na Pitu); (3) *Immanuel* 1900 (Pansur na Pitu); (4) *Jamita Kuria* 1901-1902 (Pansur na Pitu, or Si Poholon), (5) *Bab al-Kawaid* 1901 (Siak Seri Inderapura), (6) *Taj al-Hafi* 1903 (Siak Seri Inderapura); (7) *Hasan Masri* 1905 (Palembang); (8) *Asas al-Din* 1908 (Langkat).

Salah satu wujud kebijakan Politik Etis, Pemerintah Hindia Belanda membentuk *Commissie voor de Volkslectuur* (Komisi Bacaan Rakyat) pada tanggal 15 Agustus 1908 di Batavia. Pembentukan komisi itu berdasarkan keputusan *Departement van Onderwijs en Eeredienst* (Departemen Departemen Pengajaran, Ibadah, dan Pariwisata) No. 12. Komisi Bacaan Rakyat berada di bawah wewenang *Adviseur voor Inlandsche Zaken* atau Biro Penasihat Urusan Pribumi. Komisi ini ditugaskan untuk memberikan masukan kepada Direktur Pendidikan dan Keagamaan dalam memilih buku yang baik untuk bacaan di sekolah dan bacaan rakyat pada umumnya.

Dr. G. A. J. Hazeu, penasihat pemerintah kolonial untuk urusan pribumi, ditunjuk sebagai ketua komisi, dibantu oleh enam orang anggota. Pada masa ini tidak banyak aktivitas yang dilakukan oleh komisi. Meskipun melaksanakan Politik Etis, pemerintah kolonial Belanda masih mengkhawatirkan dampak pendidikan dan pengajaran kepada bumiputra. Maka dari itu, disusunlah peraturan yang membatasi penerbitan buku. Buku bacaan rakyat yang diterbitkan harus sesuai

dengan peraturan pemerintah Hindia Belanda sehingga para penulis pun tidak leluasa menulis. Sensor ketat dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Komisi Bacaan Rakyat diarahkan menerbitkan dan mencetak buku-buku yang dapat meredam kesadaran bumiputra untuk merdeka. Pada periode ini buku-buku sastra klasik dari Eropa diterjemahkan, seperti *Tom Sawyer*, *Gulliver's Travels*, *Ivan the Fool*, dan *The Three Musketeers*. Jenis-jenis bacaan itu dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat bumiputra dari isu-isu politik.

Kehadiran tokoh semacam Tirta dan Haji Misbach beserta surat kabarnya menjadikan pendirian Komisi Bacaan Rakyat sangat penting bagi Belanda guna meredam tulisan-tulisan propaganda yang menentang pemerintahan Hindia Belanda. Hal inilah yang diperhatikan benar oleh Douwe Adolf Rinkes alias D. A. Rinkes. Kali pertama Rinkes menggunakan istilah “bacaan liar” untuk menyebut publikasi oleh kaum pribumi yang mengkritik Belanda. Ia mengungkapkannya di *De Imhemse Pers* pada tahun 1914.

“Sebagai seseorang yang kemudian akan menjadi Penasihat Urusan Bumiputra dan dekat dengan orang pergerakan Agus Salim dan Tjokroaminoto, ia (D. A. Rinkes) tahu persis bagaimana surat kabar, novel, buku, dan pamflet-pamflet dari kalangan pergerakan menimbulkan ‘*shedelijke invloeden*’—pengaruh berbahaya.” (Farid, 1991).

Komisi Bacaan Rakyat baru benar-benar bekerja pada masa kepemimpinan D. A. Rinkes pada tahun 1910. Tugas komisi ini diperluas bukan hanya memberikan rekomendasi, melainkan juga menerbitkan buku bacaan rakyat untuk umum. Pada masa D. A. Rinkes memimpin komisi tersebut selama enam tahun (1910–1916), telah terbit sebanyak 598 naskah. Naskah yang diterbitkan itu berasal dari berbagai bahasa daerah dengan perincian 117 naskah berbahasa Jawa, 68 naskah berbahasa Sunda, 33 naskah berbahasa Melayu, dan 1 naskah berbahasa Madura. Jenis cerita yang diterbitkan mencakup cerita rakyat, cerita

wayang, ringkasan hikayat, cerita nasihat, dan buku pengetahuan umum.

Pada tanggal 22 September 1917, tugas Komisi Bacaan Rakyat dialihkan ke lembaga baru bernama *Kantoor voor de Volkslectuur* atau Kantor Bacaan Rakyat—lembaga yang kemudian menjadi cikal bakal Penerbit Balai Poestaka. Rinkes menjadi pemimpin pertama Kantor Bacaan Rakyat ini. Dialah yang merumuskan kategori bacaan yang baik untuk rakyat. Sejumlah tema yang dianggap baik itu, di antaranya pelajaran keterampilan, pertanian dan ilmu alam, serta budi pekerti yang bersifat sekuler. Balai Poestaka juga menerbitkan naskah-naskah dari berbagai bahasa daerah. Tema yang paling sering diangkat genre cerita rakyat, seperti cerita panji, hikayat, dan cerita rakyat lainnya yang harus ditulis ulang senada dan sejalan dengan kepentingan kolonial.

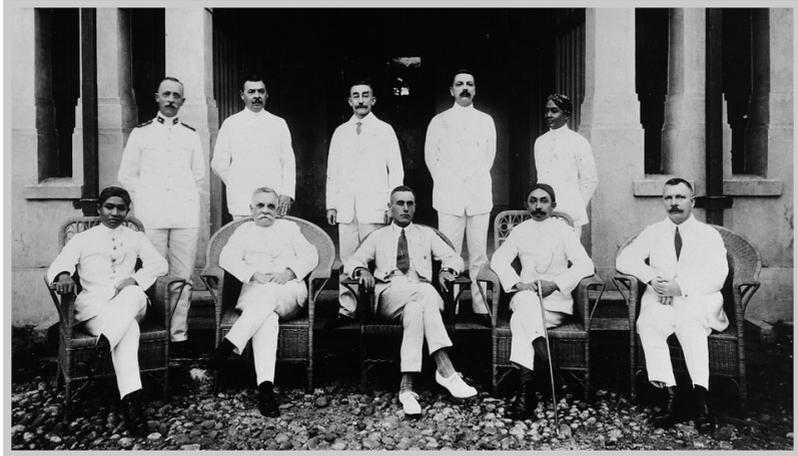
Balai Poestaka mendapatkan sokongan finansial penuh dari Pemerintah Hindia Belanda. Harga buku-buku Balai Poestaka dapat ditekan serendah mungkin dengan subsidi Pemerintah Belanda sebesar 100.000–400.000 gulden setiap tahun (Swantoro, 2002).

Pada mulanya buku-buku terbitan Balai Poestaka dicetak oleh percetakan swasta dan dijual di toko-toko buku sekolah milik pemerintah. Hal ini menimbulkan beban biaya tersendiri.

Menurut Rinkes, dengan dana yang tersedia, *Volkslectuur* dapat memiliki bagian pemasaran dan administrasi sendiri, bahkan percetakan sendiri. Selain itu, menurutnya, kantor ini juga dapat menggarap tinjauan atas pers Indonesia dan Melayu-Tionghoa yang sampai saat itu dikerjakan oleh Departemen Urusan Pribumi.

Rinkes kemudian menghimpun penulis, editor, penerjemah, dan korektor bumiputra yang kompeten. Dia mendirikan departemen penjualan, membuat gudang, dan mendirikan dua ribu perpustakaan lagi. Rinkes juga membeli bahan pencetakan sendiri, lalu mendirikan percetakan di tanah bekas kantor percetakan pemerintah pada tahun

1921. Di sana dia juga mendirikan kantor redaksi dan administratif. Balai Poestaka pada masa Rinkes benar-benar mengalami kemajuan yang berarti.



Gambar 2. Komisi Bacaan Rakyat di Batavia 1920, duduk dari kiri: Raden Adipati Ario Wiranatakoesoema, H.C.H. de Bie, Dr. D.A. Rinkes, Raden Mas Ario Dhipokoesoemo, Mr. A. Neytzell de Wilde; berdiri dari kiri: Mayor R.F. van Gent, A. de Geus A.F. Folkersma, L.Th.J. Wolterbeek-Muller, Hoesein Djajadiningrat. (Rinkes, 2001)

Patut dicatat pula peranan Balai Poestaka mendirikan Volksbibliotheek atau Taman Poestaka, yakni perpustakaan yang ditempatkan di sekolah-sekolah negeri yang ditangani oleh kepala sekolah sendiri. Peraturan Taman Poestaka ditetapkan dengan G.B. tanggal 1916, No. 37. Pada tahun 1912 perpustakaan telah didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda hanya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jumlah total perpustakaan tersebut ialah 700. Pada tahun 1918, 75 perpustakaan didirikan di daerah Madura, dan pada tahun 1919 sebanyak 371 di daerah Sumatra. Jumlah total perpustakaan pada saat itu meningkat menjadi 1.388 dengan perincian: 712 perpustakaan berbahasa Jawa, 229 perpustakaan berbahasa Sunda, 76 perpustakaan berbahasa Madura, dan 371 perpustakaan berbahasa Melayu. Angka

total sebanyak 2.525: 725 Melayu, 1200 Jawa, 450 Sunda, dan 150 Madura. Jumlah perpustakaan Belanda (untuk sekolah-sekolah Belanda) juga meningkat meskipun tidak sepesat perpustakaan untuk sekolah pribumi.

Balai Poestaka menerbitkan publikasi bulanan *Sri Poestaka* pada tahun 1918, diikuti publikasi mingguan *Pandji Pustaka* pada tahun 1923. Jumlah pelanggan untuk mingguan baru meningkat dengan cepat dan pada Januari 1926 pengaturan dibuat untuk menerbitkannya dua kali seminggu. Majalah *Kedjawen* diterbitkan pada tahun yang sama, dan sejak Januari 1928, mingguan Jawa ini telah diterbitkan dua kali seminggu juga. Jumlah pelanggan untuk kedua terbitan dua mingguan tersebut terus meningkat. Selanjutnya, *Parahiangan*, publikasi mingguan berbahasa Sunda diterbitkan pada Januari 1929.

Pada masa kepemimpinan Rinkes terbit karya sastra yang dianggap sebagai tonggak kesusastraan Indonesia modern, yaitu novel *Azab dan Sengsara* karya Merari Siregar tahun 1920. Novel ini dianggap sebagai novel modern pertama dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1922, terbit novel *Sitti Nurbaya* karya Marah Rusli. Novel ini juga sangat populer dan berpengaruh pada sastra Indonesia.

Terbitan Balai Poestaka yang sangat penting sejak zaman Rinkes ialah *Volksalmanak (Almanak Rakyat)* yang terbit setahun sekali dalam tiga bahasa: Melayu, Jawa, dan Sunda. Setiap terbit bertiras seratus ribu eksemplar, dengan tebal sekira 300 halaman, dan harga jual 64 sen per eksemplarnya (Swantara, 2002).

Almanak ini sama dengan buku pintar pada zaman kini yang memuat ragam pengetahuan umum. Isi almanak, yaitu informasi pemerintahan, pembinaan kesehatan dan obat-obatan, masalah-masalah pertanian, biaya sekolah, dan berbagai pengetahuan umum lainnya, seperti jenis dan umur binatang.

D. A. Rinkes pensiun pada tahun 1927, lalu menetap di Nice, Prancis. Dr. G.W.J. Drewes selanjutnya memimpin Balai Poestaka

menggantikan Rinkes. Drewes hanya melanjutkan kebijakan Rinkes. Pada masa Drewes terbit novel *Salah Asuhan* karya Abdoel Moeis yang dianggap sebagai karya sastra Indonesia modern terbaik pada periode awal. Selanjutnya, tahun 1929 terbit novel *Sengsara Membawa Nikmat* karya Tulis Soetan Sati.



Gambar 3. Suasana kerja redaksi Balai Poestaka (Balai Poestaka)

Drewes juga disebut-sebut sebagai tokoh yang menemukan bakat Soetan Takdir Alisjahbana (STA) serta menjadikannya redaktur *Pandji Poestaka*. Majalah ini sebagaimana disebutkan terbit dua kali seminggu dengan tiras 4.500 eksemplar. STA direkrut Balai Poestaka pada usianya baru 22 tahun.

Pada tahun 1930, Taman Poestaka sudah berdiri di 2.528 titik dengan jumlah peminjaman buku mencapai 2,7 juta. Balai Poestaka telah menunjukkan pengaruhnya dalam mewarnai bacaan rakyat Hindia Belanda meskipun tetap dicurigai sebagai alat propaganda Belanda.

Meskipun Balai Poestaka milik Pemerintah Hindia Belanda, Drewes berhasil melawan tekanan-tekanan dari unsur-unsur kolonial konservatif yang mendesaknya agar menggunakan Balai Poestaka sebagai alat propaganda pemerintah. Drewes menerbitkan buku-buku yang “aman”, bukan sebagai alat propaganda dan bukan pula memuat karya yang menentang pemerintah.

Tahun 1935, Dr. K. A. H. Hidding menggantikan G. W. J. Drewes sebagai pemimpin Balai Poestaka hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda. Hidding menyampaikan kebanggaannya terhadap kiprah Balai Poestaka di dalam *Bulletin of the Colonial Institute of Amsterdam*, volume I, 1937–1938, halaman 185–194. Ia menulis artikel berjudul “*The Bureau of Popular Literature*”. Ia melihat bahwa Balai Poestaka tidak saja sebagai sebuah lembaga penerbitan dan penyebaran buku-buku yang dinilai dapat membantu pengembangan masyarakat, tetapi juga lembaga yang dapat mewujudkan sinergi Timur dan Barat.



Gambar 4. Sebuah kios penjualan buku-buku Balai Poestaka (Collectie Tropenmuseum/CC BY-SA 3.0)

Balai Poestaka bertanggung jawab atas penerbitan buku-buku sastra Indonesia, buku anak-anak, seperti tahun awal, ditambah menerbitkan buku pelajaran sekolah dasar dan menengah mata

pelajaran berhitung dan seri bahasa Inggris. Sejak 1964–1966 Balai Poestaka menghasilkan 1,3 juta eksemplar buku aritmatika. Pada tahun 1969, Balai Poestaka memproduksi dan menjual 1,4 juta buku lebih terdiri atas 90% buku teks, menerbitkan 35 judul, dan meningkat sampai tahun 1970 menjadi 56 judul. Penjualan tahun 1970 diharapkan meningkat hingga 10 juta kopi.

Debat Tertulis Polemik Kebudayaan

Polemik Kebudayaan merupakan polemik yang terjadi pada tahun 1930-an di kalangan cendekiawan dan kebudayaan Indonesia. Polemik ini bermula dari artikel Soetan Takdir Alisjahbana berjudul “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia-Pra-Indonesia” (*Poejangga Baroe*, 2 Agustus 1935). Ia membedakan “Zaman pra-Indonesia” (yang berlangsung hingga akhir abad ke-19) dan “Zaman Indonesia” (yang mulai pada awal abad ke-20). Ia menegaskan tentang lahirnya Zaman Indonesia Baru, yang bukan sekali-kali dianggap sambungan dari generasi sambungan Mataram, Minangkabau atau Melayu, Banjarmasin atau Sunda. Karena itu, tiba waktunya mengarahkan mata ke Barat.

Artikel ini mendapat tanggapan dari Sanusi Pane dan Poerbatjaraka. Dalam tulisannya yang berjudul “Persatuan Indonesia” (*Suara Umum*, 4 September 1935), Sanusi Pane menulis: “Zaman sekarang ialah terusan zaman dahulu Haluan yang sempurna ialah menyatukan Faust dan Arjuna, memesrakan materialisme, intelektualisme dan individulisme dengan spiritualisme, perasaan dan kolektivisme.”

Lain lagi yang Poerbatjaraka tulis, yakni artikel berjudul “Sambungan Zaman”, “Pada perasaan saya, yang manfaat buat tanah dan bangsa kita ini, ialah mengetahui jalan sejarah dari dulu-dulu sampai sekarang ini. Dengan pengetahuan ini kita seboleholehnya berusaha mengatur hari yang akan datang Dengan pendek kata, janganlah mabuk kebudayaan kuno, tetapi jangan mabuk kebaratan juga; ketahuilah dua-duanya itu supaya kita bisa memakainya dengan selamat di dalam hari yang akan datang kelak.”

Selanjutnya, terjadi polemik mengenai dunia pendidikan yang melibatkan sejumlah besar tokoh, yaitu S. Takdir Alisjahbana, Soetomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M. Amir, dan Ki Hajar Dewantara. Tulisan mereka inilah yang kemudian dihimpun Achdiah K. Mihardja dalam buku *Polemik Kebudayaan* yang terbit pada tahun 1948.

Polemik kebudayaan menunjukkan bahwa tradisi mengemukakan pemikiran dan saling kritik melalui tulisan telah mewarnai zaman sebelum kemerdekaan. Hal ini sungguh sebuah kemajuan berarti dalam rangka perjuangan melalui kekuatan pena.

Perbukuan pada Zaman Jepang

Masa ini adalah masa ketika Belanda mengalami konflik internal di negaranya. Pada Perang Dunia II, Belanda mengalami kekalahan dan Hindia Belanda berhasil dikuasai oleh Jepang. Hal ini pun mengubah peta industri penerbitan dan percetakan di Nusantara.

Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan penerbitan-percetakan dikerjakan oleh Balai Poestaka demi memenuhi kebutuhan publikasi. Balai Poestaka diubah namanya menjadi Gunseikanbu Kokumin

Tosyokyoku yang bermakna “Biro Pustaka Rakyat, Pemerintah Militer Jepang” dan merupakan terjemahan dari nama Belanda *Commissie voor de Volkslectuur*. Jepang mengeluarkan majalah propaganda bernama *Djawa Baru*.

Buku-buku teks berbahasa Belanda yang selama ini diimpor dari Belanda praktis terhenti dengan pecahnya Perang Dunia II. Karena itu, Balai Poestaka berusaha memenuhi permintaan buku untuk mencetaknya secara lokal.

Selain kantor-kantor reguler untuk pemerintahan, Pemerintah Jepang membutuhkan departemen baru, yakni Sendenbu (Departemen Propaganda). Departemen Propaganda adalah departemen penguasa Jepang untuk menyebarkan dan mengendalikan informasi. Semua publikasi berbahasa Belanda dilarang dan semua percetakan pemerintah Hindia Belanda diambil alih Sendenbu. Terbitan berbahasa Indonesia diizinkan untuk melanjutkan publikasi, tetapi dengan menunjuk orang Jepang sebagai *chief editor*. Semua berita dikontrol ketat.

Kantor berita Belanda ANETA digantikan oleh kantor berita Jepang Domei. Kantor penasihat ditugaskan memeriksa publikasi, surat kabar, dan siaran ulang radio. Hukuman mati dijatuhkan bagi setiap orang yang mendengar suara siaran radio asing.

Di bawah sistem pendidikan Jepang, banyak waktu dicurahkan untuk aspek sosial pendidikan dan memasukkan budaya Jepang dalam program pendidikan, namun tetap memberikan ruang untuk bahasa Indonesia. Buku teks Jepang dirancang dengan sangat hati-hati oleh administrasi Jepang yang pro-Jepang.

Perubahan bahasa pengantar tidak menimbulkan masalah besar karena bahasa Melayu menjadi *lingua franca* di pulau-pulau di Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan dan merupakan bahasa yang digunakan partai-partai pergerakan nasional setelah Soempah Pemoeda tahun 1928.

Jepang seolah memfasilitasi semangat nasionalisme terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesungguhnya. Akan tetapi, di sisi lain otoritas Jepang mengamanatkan pengajaran bahasa Jepang di tingkat sekolah dasar dan menengah. Transformasi besar terjadi di dalam kurikulum sekolah.

Secara umum, kurikulum baru yang anti-Barat, pro-Jepang, dan condong untuk menekankan doktrin pan-Asia yang sejalan dengan propaganda “Kemakmuran bersama Asia Timur Raya” diberlakukan. Balai Poestaka difungsikan sebagai penerbit buku teks, Semua buku dalam bahasa Indonesia untuk sistem sekolah diproduksi dan didistribusikan oleh agen penerbitan ini. Sebagian besar buku berbahasa Jepang untuk studi bahasa Jepang diimpor dari Jepang. Buku tersebut ditulis dengan huruf katakana atau hiragana yang dikombinasikan dengan huruf kanji, diproduksi di Jepang atau Singapura.

Tidak ada catatan lengkap publikasi selama tahun perang (1942-1945) di Indonesia. Bibliografi berharga yang dikumpulkan di dalam *Preliminary Checklist of Indonesian Imprints* selama Periode Jepang (Maret 1942–Agustus 1945) menurut penjelasan John M. Echols, dari Cornell University sekira 16 surat kabar dan 13 terbitan berkala.

Daftar surat kabar yang diterbitkan, antara lain (1) *Asia Raya* (*Great Asia*) diterbitkan awal sejak 29 April 1942 di Djakarta. Ini adalah organ resmi dari Propaganda Service; (2) *Tjahaja* (*Cahaya*) diterbitkan awal sejak 10 September 1942, di Bandung; (3) *Sinar Matahari* (*Sun Shine*) diterbitkan pada tahun 1942 di Yogyakarta; (4) *Sinar Baru* (*Cahaya Baru*) diterbitkan pada tahun 1942 di Bandung; (5) *Soerabaiasch Handelsblad* (*Surabaya Trade Paper*, dalam bahasa Belanda sebelumnya) diperintahkan diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Perwarta Perniagaan* (*Commercial News*) pada tanggal 17 Juni 1942 di Surabaya; (6) *Soera Asia* (*The Voice of Asia*) diterbitkan pada tahun 1942 di Surabaya; (7) Selain *Asia Raya* di Jakarta, ada dua publikasi diterbitkan pada 1942: *Perbangoen* (*Pembangun* atau *Reformator*) sebagai

kelanjutan dari *Pemandangan* (Pemandangan) dan surat kabar kedua adalah *Kung Yung Po* (*Harian Jenderal*) sebagai kelanjutan dari bekas *Hong Pao* (*Berita Sumber*).

Pada bulan Agustus 1942, Panglima Tertinggi Jepang di Jawa mengeluarkan perintah untuk mendirikan asosiasi surat kabar disebut *Djawa Shinbun Kai* (Asosiasi Surat Kabar Jawa). Asosiasi ini mengawasi semua surat kabar yang terbit selanjutnya. Akhirnya, *Djawa Shinbun Kai* menjadi distributor resmi dari semua berita yang ingin dirilis oleh Departemen Propaganda kepada masyarakat.

Semua publikasi diperlakukan secara seragam. Satu-satunya terbitan periode Belanda yang dibiarkan berlanjut selama pemerintahan Jepang adalah *Pandji Poestaka* (sebelumnya diterbitkan Balai Poestaka), tetapi namanya diubah menjadi *Indonesia Merdeka*. Sensor ketat diberlakukan oleh Badan Sensor Militer serta Departemen Propaganda (bermarkas di Jakarta), yang memiliki cabang Layanan di Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.

Pada periode yang singkat ini, masyarakat Indonesia mendapatkan kesempatan belajar penerbitan, baik penerbitan buku maupun terbitan berkala meskipun dikontrol ketat oleh otoritas Pemerintah Jepang. Untuk kali pertama kaum pribumi diberi kewenangan dalam editorial dan produksi di dalam penerbitan.

Periode Perbukuan Sebelum Kemerdekaan menunjukkan betapa perjalanan sejarah pencetakan dan penerbitan di Indonesia seturut dengan kemajuan pencetakan dan penerbitan yang terjadi di Eropa. Pada saat itu belum lahir apa yang disebut ilmu penerbitan atau editologi. Namun, pakar-pakar pencetakan dan penerbitan lahir di Eropa dengan pengalaman autodidak.

Pembelajaran secara autodidak ini pula yang dilakukan oleh kaum Tionghoa peranakan dan kaum bumiputra dalam hal menulis dan

mengelola institusi media. Beberapa orang Tiongho peranakan dan bumiputra (pribumi) Indonesia beruntung mendapatkan pendidikan langsung secara nonformal dan informal dari mentor-mentor mereka orang Belanda.

Salah seorang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah Nur Sutan Iskandar yang direkrut awal sebagai korektor di Balai Poestaka. Nur Sutan Iskandar berada langsung di bawah koordinasi Sutan Muhammad Zain yang menjadi Ketua Sidang Pengarang di Balai Poestaka. Karier Nur Sutan Iskandar melesat hingga menjadi redaktur kepala lalu pemimpin redaksi.

Nur Sutan Iskandar tidak hanya berkiprah sebagai “orang redaksi” Balai Poestaka, tetapi ia juga menjadi penulis novel yang produktif. Selain sebagai penyunting (editor) dan penulis, ia juga dikenal sebagai penerjemah dan penyadur karya sastra. Kepada Nur Sutan Iskandar disematkan gelar “Raja Balai Poestaka” karena kiprahnya yang multidimensi dalam penerbitan tahun 1920-an. Ia juga dianggap berjasa mengembangkan bahasa Indonesia yang standar.



BAB 2

PERBUKUAN SETELAH KEMERDEKAAN (1945–1998)

Tahun 1945 ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia secara *de facto* pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun sudah menyatakan kemerdekaannya dengan bayang-bayang agresi militer Belanda, penerbitan-pencetakan di Indonesia yang dikelola bumiputra masih mengalami kesulitan. Mesin-mesin cetak peninggalan Belanda sudah usang di samping tidak tersedianya teknisi terampil yang mampu menjalankan mesin-mesin itu. Kaum bumiputra memang tidak dilibatkan penuh dalam operasional penerbitan dan percetakan pada masa Hindia Belanda.

Perbukuan pada Awal Kemerdekaan

Bahan baku kertas dan tinta juga sulit diperoleh. Kemampuan impor tidak dimiliki Indonesia sebagai negara yang baru lahir. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia tetap berusaha mengandalkan penerbitan-percetakan peninggalan Belanda. Percetakan yang masih berlanjut adalah Lands Drukkerij yang pada bagian sebelumnya dijelaskan sebagai hasil penggabungan antara Castle Printing House dan City Printing milik Pemerintah Hindia Belanda.

Dengan keterbatasan tersebut, buku-buku tetap diterbitkan dan dicetak. Berdasarkan data terbitan tahun 1945–1949 diklasifikasikan penerbitan terdiri atas buku umum, filsafat, agama, ilmu sosial, filologi, ilmu murni, ilmu terapan, seni, sastra, serta geografi dan sejarah. Buku-buku yang diterbitkan ialah buku yang diperlukan oleh masyarakat dengan jumlah sangat terbatas.

Tabel 3. Penerbitan-Pencetakan Buku Periode 1945–1949 (Isa, 1972)

Tahun	Total	Umum	Filsafat	Agama	Ilmu Sosial	Filologi	Ilmu Murni	Ilmu Terapan	Seni	Sastra	Geografi & Sejarah
1945 s.d. 1949	800*	29	13	114	278	35	20	94	10	196	11

*Rata-rata penerbitan tiap tahun pada period tersebut.

Perkembangan teknologi grafika pascakemerdekaan di Indonesia tahun 1949–1970 tidak terlepas dari sejarah panjang penerbitan dan percetakan media berkala dan buku-buku sejak zaman Hindia

Belanda. Penerbitan dan percetakan turut mewarnai kesadaran sosial, budaya, dan politik bangsa Indonesia. Tradisi keliterasian yang dibawa oleh teknologi penerbitan dan percetakan telah melahirkan generasi intelektual dan sastrawan di Indonesia sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Akan tetapi, jika dibandingkan negara jajahan lain di Asia, industri penerbitan-percetakan Indonesia yang ditinggalkan penjajah Belanda dalam kondisi terpuruk. Mesin-mesin cetak yang ditinggalkan Belanda sudah kuno dan aus, terlebih lagi tidak didukung ketersediaan suku cadang mesin.

Dari segi bahan baku cetak juga demikian. Semuanya bergantung pada pasokan dari luar negeri sehingga mesin-mesin itu terancam tidak berfungsi. Dari segi SDM penerbitan-percetakan, seperti penulis, editor, penata letak, dan operator cetak, jumlahnya juga tidak memadai dan kurang terlatih.

Kondisi ini menjadi ujian tersendiri bagi pengembangan industri penerbitan dan percetakan di Indonesia yang baru merdeka. Sementara itu, sebagai negara yang baru terbentuk, Indonesia sangat memerlukan publikasi tercetak, baik sebagai dokumen negara maupun sebagai bahan pengajaran untuk pendidikan bangsa.

Penerbitan Pemerintah

Balai Poestaka beroperasi secara terbatas pada masa pendudukan Jepang. Selama dua tahun setelah Indonesia merdeka (1945–1947) Balai Poestaka masih beroperasi. Namun, beberapa bulan menjelang tahun 1948 kegiatannya terhenti karena situasi politik selama revolusi. Pada tanggal 1 Mei 1948, akhirnya Balai Poestaka dihidupkan kembali sebagai penerbit di bawah Kementerian Pendidikan dan Pengajaran.

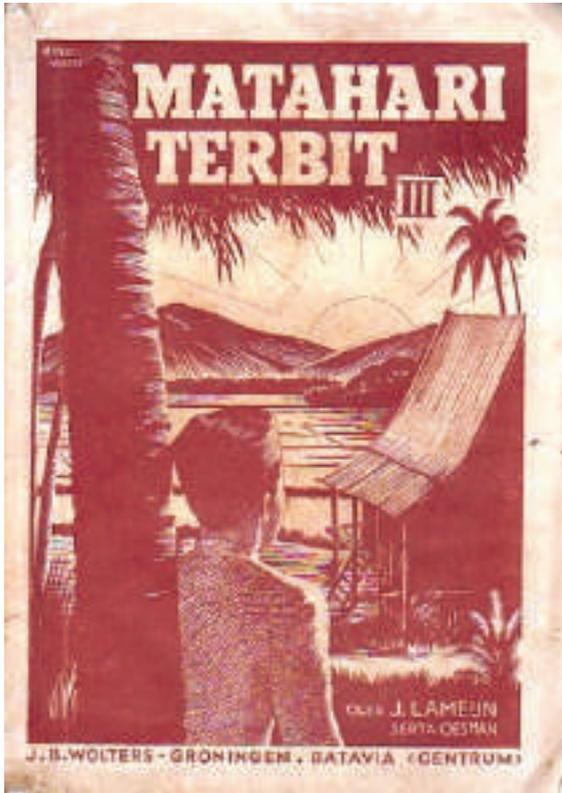
Setelah kemerdekaan, pemerintahan sementara menguraikan fungsi Balai Poestaka sebagai berikut: (1) mengerjakan kembali *backlog*

yang menumpuk selama pendudukan Jepang. Buku-buku yang dinilai bermanfaat bagi Republik Indonesia dicetak ulang; (2) memilih karya sastra asing yang bermanfaat, lalu menerjemahkan serta menerbitkannya dalam bahasa Indonesia; (3) menerbitkan karya penulis Indonesia dalam bidang sastra, sains, dan budaya; (4) memublikasikan literatur (sastra) anak-anak.

Jumlah naskah yang diproduksi Balai Poestaka tahun 1948–1950, yaitu (1) 1948: 40.115 eksemplar; (2) 1949: 430.800 eksemplar; dan (3) 1950: 603.000 eksemplar. Tahun 1917–1968 (ketika menerbitkan buku anak-anak pribumi), Balai Poestaka menerbitkan 2.300 judul buku sastra. Antara tahun 1964–1966 Balai Poestaka menerbitkan rata-rata enam puluh judul tiap tahun dan 40%-nya merupakan cetak ulang. Total sekira 2,7 juta eksemplar diproduksi setiap tahun.

Sebuah kebijakan berani dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1958 terkait dengan industri perbukuan. Pemerintah mengeluarkan UU No. 86/1958 yang menasionalisasi penerbit-penerbit milik Belanda di Indonesia. Empat penerbit asing, yaitu J.B. Wolters, W. Verslujs, Noordhoff Kolff, H. Stam kemudian dilebur menjadi PN Pradnya Paramita, yang pada 1973 menjadi PT Pradnya Paramita (Persero).

Atas saran Ikapi, Pemerintah juga sempat mengeluarkan Surat Edaran Bersama (Kementerian PPK NO. 53353/Kab. dan Kementerian Perekonomian No. 16.592/M) pada 23 November 1958 yang melarang kegiatan impor buku-buku berbahasa Indonesia dan bahasa daerah (terbitan penerbit luar negeri) ke Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melindungi usaha penerbit dan percetakan bumiputra. Saat itu memang penerbit Belanda memonopoli perdagangan buku-buku tersebut. Namun, Surat Edaran Bersama tidak berjalan efektif karena para penerbit Belanda sudah lebih dulu hengkang dari Indonesia disebabkan kebijakan nasionalisasi.



Gambar 5. Buku pelajaran dalam bahasa Melayu terbitan J. B. Wolters pernah merajai penjualan buku pelajaran tahun 1940-an. (repro kover J. B. Wolters).

Pada periode 1951–1961 Pemerintah Indonesia berupaya mengimpor suku cadang mesin cetak, peralatan dan perlengkapan percetakan, serta bahan baku guna memenuhi kebutuhan penerbitan dan percetakan, baik bagi pemerintah maupun bagi perusahaan swasta. Selama tahun 1951–1955 rata-rata Pemerintah Indonesia mengeluarkan biaya 10.000.000 dalam mata uang Indonesia untuk keperluan impor tersebut.

Kementerian Penerangan melaporkan bahwa terdapat 524 perusahaan percetakan di Indonesia pada awal tahun 1950, termasuk percetakan dengan satu mesin dan banyak mesin serta peralatan cetak lainnya. Indikasi statistik menunjukkan bahwa kapasitas negara tahun 1950 sangat terbatas. Selanjutnya, 50% dari perlengkapan percetakan berada di Jawa dan 30% ada di Jakarta.

Inventarisasi akurat pertama mengenai kapasitas percetakan disajikan oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 1955 yakni total dari 554 percetakan yang sudah mapan dilaporkan sebagai berikut: 206 di Jawa Barat, 111 di Jawa Tengah, 123 di Jawa Timur, 47 di Sumatra Utara, 11 di Sumatra Tengah, 113 di Sumatra Selatan, 21 di Kalimantan, 15 di Sulawesi, 3 di Maluku dan 4 di Nusa Tenggara. Industri percetakan menurun pada tahun 1960 seperti dilaporkan Biro Pusat Statistik menjadi 500 pekerja dan total kekuatan industri percetakan 17.778.

Tahun 1956 tercatat ada 793 pencetak di Indonesia dengan perincian 339 dimiliki pengusaha bumiputra, 378 dimiliki pengusaha Tionghoa peranakan, dan 76 dimiliki pengusaha Belanda. Kondisi percetakan pada masa itu digambarkan sangat pincang karena masih kuatnya monopoli asing (perusahaan Belanda) dalam percetakan karena kapasitas produksi mereka yang sangat besar.

Penerbitan Swasta

Tidak banyak penerbit swasta nasional didirikan pada masa awal-awal kemerdekaan. Hal yang patut dicatat ialah bergabungnya beberapa penerbit swasta nasional membentuk organisasi bernama Ikatan Penerbit Indonesia pada tahun 1950. Berikut ini adalah beberapa penerbit swasta nasional yang berdiri pada masa awal kemerdekaan RI.

Penerbit Djambatan

Penerbit NV Uitgeversbedrijf Djambatan merupakan salah satu penerbit yang besar di Negeri Belanda. Penerbit ini berpusat di Kota Amsterdam lalu mencoba pasar Asia. Karena itu, mereka membuka cabang pertama di Burma. Setelah Pemerintah Belanda berhasil menguasai dan menjajah Indonesia, kantor penerbit NV Uitgeversbedrijf berpindah ke Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, penerbit ini dialihkan kepemilikannya kepada orang Indonesia. Pada awalnya melalui akta notaris Soewandi, terdaftar para pendiri terdiri atas K. St. Pamoentjak, Djamaluddin Adinegoro, dan Dr.med. Ahmad Rama yang mewakili pihak Indonesia. Kemudian, ada H. M. Van Randwijk dan C. de Koning mewakili pihak Belanda. Pada tahun 1956, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, semua saham Belanda dialihkan ke Indonesia.

Sejak itu, penerbit NV Uitgeversbedrijf Djambatan dipimpin oleh K. St. Pamoentjak. Namun, pada tahun 1962, K. St. Pamoentjak meninggal dunia. Tongkat estafet penerbitan dialihkan ke putrinya, Roswhita Pamoentjak.

Penerbit Pustaka Antara

Penerbit Pustaka Antara merupakan perusahaan keluarga yang didirikan tahun 1952. Pendirinya seorang wartawan bernama Joesoef Ahmad yang dalam manajemen sehari-hari dibantu oleh istrinya. Perusahaan ini awalnya menempati kantor di Jalan Majapahit No. 28, Jakarta. Lalu, kantor dipindahkan ke Jalan Taman Kebon Sirih III, No. 13, Jakarta.

Penerbit Erlangga

Penerbit Erlangga didirikan oleh M. Hoetahoeroek. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Inspeksi SMA seluruh Indonesia (1957–1962) dan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta (1968–1972). Hutauruk juga sempat menjadi Direktur Utama PN Balai Poestaka (1962–1967) dan Ketua Ikapi dua periode berturut-turut (1963–1965 dan 1965–1968).

Ia memimpin PN Balai Poestaka dalam kondisi anggaran yang minim dan mesin-mesin sudah beranjak tua. Akhirnya, jabatan Dirut PN Balai Poestaka diletakkannya setelah tidak memperoleh lagi mandat dari presiden.

Hoetahoeroek merintis Penerbit Erlangga sebagai penerbit buku pelajaran. Ia sendiri menjadi penulis yang andal untuk buku-buku ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya.

Penerbit Tiga Serangkai

Penerbit Tiga Serangkai didirikan oleh pasangan suami-istri guru SD, yaitu H. Abdullah Marzuki dan Hj. Siti Aminah Abdullah. Penerbit ini resmi berdiri pada tanggal 5 Januari 1959 di Surakarta (Solo) dengan badan usaha CV. Nama Tiga Serangkai diambil dari nama toko buku Tiga yang berjasa membantu mereka pada awal-awal memasarkan buku.

Penerbit TS sejak awal didirikan mengalami kesuksesan dengan penerbitan buku *Himpunan Pengetahuan Umum* dan *Himpunan Pengetahuan Alam*—konsep buku yang mirip buku pintar. Ide buku ini tercetus disebabkan sulitnya para guru mendapatkan buku-buku teks pada masa itu sehingga satu buku dapat menghimpun banyak pengetahuan.

Perbukuan pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1960-1965)

Tonggak penting dalam industri penerbitan di Indonesia adalah berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) pada tanggal 17 Mei 1950 yang dipelopori Soetan Takdir Alisjahbana, M. Joesoef Ahmad, dan Nyonya A. Notosoetardjo. Ikapi dibentuk berlandaskan Pancasila dengan pendiri pertama sebagai berikut: Achmad Notosoetardjo (ketua), Ny. Soetan Takdir Alisjahbana (wakil ketua), Machmoed (sekretaris), M. Jusuf Ahmad (bendahara), dan John Sirie (komisaris).

Pada awal pembentukan Ikapi dalam versi Mahbud Djunaidi (1975) terdapat 13 penerbit yang bergabung, sedangkan dalam versi Zubaidah Isa ada 14 penerbit. Baik Mahbud maupun Zubaidah tidak memerinci nama-nama penerbit tersebut karena ketiadaan data untuk melacak peristiwa tersebut.

Pasca pendirian, pengurus dan anggota Ikapi bertekad memajukan pendidikan dan pencerdasan bangsa melalui perbukuan. Karena itu, para pengurus pusat Ikapi terus “bergerilya” menambah jumlah keanggotaan di daerah. Salah satu yang menjadi tonggak sejarah adalah penyelenggaraan pameran buku Ikapi pertama di Medan.

Pada tahun 1952 di Medan sudah berdiri organisasi penerbit lokal yang menghimpun penerbit sekaligus pedagang buku. Nama organisasi itu adalah Gabungan Penerbit Medan (Gapim) yang beranggotakan 40 dan 24 di antaranya adalah pedagang buku. Gapim inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Ikapi Cabang Sumut yang juga merupakan cabang Ikapi pertama di Indonesia sejak Ikapi didirikan pada 17 Mei 1950.

Ikapi Cabang Sumut terbentuk pada bulan Oktober 1953 beranggotakan 16 orang. Kurang dari setahun, Ikapi Cabang Sumut berhasil menyelenggarakan pameran buku pertama di Indonesia pada

bulan April 1954. Acara ini menghadirkan Menteri PP dan K kala itu, Moh. Yamin.

Sebagai salah satu kiprah awal, Ikapi menyarankan pemerintah untuk mengeluarkan Surat Edaran Bersama (Kementerian PPK No. 55353/Kab. dan Kementerian Perekonomian No. 16.592/M) pada tanggal 23 November 1958 yang melarang kegiatan impor buku-buku berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah (terbitan penerbit luar negeri) ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi usaha penerbitan-percetakan bumiputra. Akan tetapi, surat edaran tersebut tidak berpengaruh karena para penerbit Belanda sudah lebih dulu hengkang dari Indonesia disebabkan kebijakan nasionalisasi.

Pameran Buku Pertama di Medan

Pameran buku pertama yang digelar oleh cabang Ikapi Sumatra Utara. Dengan demikian, pameran buku pertama di Indonesia digelar di Medan pada bulan April 1954. Kegiatan ini menghadirkan Menteri P & K kala itu, Moh. Yamin.

Kota Medan memang tidak dapat dilepaskan dari sejarah perbukuan Indonesia. Kota ini merupakan kota penghasil sastrawan dan penulis andal pada masa-masa perjuangan kemerdekaan dan juga mewarnai zaman keemasan roman-roman sehingga Medan mendapat julukan “kota pengarang roman”.

Kebijakan Perbukuan Era Sukarno

Sistem Demokrasi Terpimpin yang diterapkan Pemerintahan Sukarno memengaruhi juga industri perbukuan, khususnya Ikapi yang telah berdiri pada masa itu. Nama Ikapi diubah menjadi Ikapi-OPS Penerbitan. OPS adalah singkatan dari Organisasi Perusahaan Sejenis—suatu bentuk organisasi yang diharuskan pada masa itu. Nama itu berlaku sejak tanggal 23 November 1964 berdasarkan SK Menteri Penerangan No. 44/S.K./M/64 setelah badan hukum sebagai perkumpulan disahkan oleh SK Menteri Kehamikan Nomor J.A.5/15/5M tanggal 10 April 1964. Dengan demikian, kemandirian dan otoritas tertentu yang dimiliki oleh organisasi sebelumnya menjadi beralih ke tangan negara (Setiawan, 2000)

Departemen Penerangan bertindak sebagai “induk” Ikapi yang ditetapkan tanggal 23 November 1964—setelah sebelumnya Ikapi kesulitan menemukan kementerian yang bersedia menjadi “pengasuh” organisasi ini. OPS mengharuskan setiap organisasi perusahaan bernaung di bawah satu kementerian yang relevan.



Gambar 6. Ketua Ikapi, Hoetaeroek mendukung kebijakan Presiden Sukarno (Ikapi, 1966)

Susunan pengurus pusat baru IKAPI-O.P.S. Penerbitan Periode 1966 - 1968

PENGURUS HARIAN :

Ketua Umum : M. Hoetaeroek S.H.
Wakil Ketua I : Nj. P. Rochmat Sumitro.
Wakil Ketua II : Harris Muda Nasution.
Sekretaris Umum : Soeripto.
Bendahara : Hanasuddia Z.

SEKSI-SEKSI :

Seksi Pendidikan/Bimbingan : Dr. Umar Kayam.
Seksi Hukum : Dr. Rochmat Soemitro S.H.
Badan Usaha : Drs. Hazil Tanzil.
Grafika : J. Sirie.
Hubungan Masyarakat/Madjalah : Drs. K. Zainal Ihsan
A.A. Djohan Sjach
Kertas : Soetardjo.
Organisasi/Pengawasan : H. Cazali Thaib.
Bibliografi : Ali Amran B.A.

Noot : Dalam pada itu diharapkan dengan sangat hendaknya Tiabang² Ikapi O.P.S. Penerbitan segera membaharui susunan Pengurus masing² dengan teleksaja dan melaporkansaja ke Pusat sehingga dengan lekas pula dapat di-sjahkan oleh jang berwadjih.

Gambar 8. Susunan Pengurus Ikapi-OPS (Suara Penerbit Indonesia, 1966)

BULLETIN No. 1/1966

**RENTJANA Kerdja IKAPI-O.P.S. PENERBITAN
UNTUK MENURUNKAN HARGA BUKU**

Mulai dari djangka pendek hingga djangka pandjang :

1. Pembelian buku²-wadji**b** buku²-peladjaran oleh Peme-
rintah untuk dipinjaman kepada mahasiswa/peladjar.
2. Sistim bon-buku dihidupkan kembali.
3. Subsidi penerbitan buku-buku peladjaran.
4. Import djatah kertas untuk buku-buku jang tjukup.
5. Penambahan pertjetakan-perjetakan untuk buku-buku.
6. Dana Penerbitan Buku.

Djakarta, 17 Maret 1966.

Pengurus Pusat

IKAPI—O.P.S. PENERBITAN
djalan H.A. Salim 25 pav.
D J A K A R T A

Gambar 9. Rencana kerja Ikapi-OPS (Suara Penerbit Ikapi, 1966)

Hal yang terasa bagi industri perbukuan pada masa pemerintahan Sukarno ialah terjadinya paceklik kertas. Tahun 1960-an, terutama tahun 1966 dianggap tahun tersulit bagi penerbit. Ikapi mempermasalahkan “keadilan” dalam pembagian jatah kertas yang dibagi oleh Yayasan Lektur.

Kertas yang langka menyebabkan harga buku naik tidak terjangkau masyarakat. Situasi ekonomi yang sulit pada masa itu juga menyebabkan masyarakat lebih memikirkan bahan pokok lain daripada buku.

Di tengah kesulitan yang melanda, Ikapi pada tahun 1965 berhasil menyelenggarakan pameran buku yang menandai juga HUT ke-20 Ikapi. Perhelatan acara ini di Hotel Duta Indonesia (Des Indes) mendapatkan serangan dari PKI. Melalui harian *Bintang Timoer* dan *Harian Rakyat*, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) menuduh Ikapi ditunggangi oleh kaum kapitalis birokrat (Kabir) serta bersikap kontrarevolusi, dengan sasaran menggagalkan/menyabotase pameran.

Pelarangan buku juga terjadi di tengah tensi politik yang tinggi pada masa Demokrasi Terpimpin. Presiden Sukarno memberi wewenang kepada militer untuk melarang buku dan menutup percetakan. Jatuhlah beberapa korban buku atas peraturan tersebut, di antaranya novel *Hoakiau* karya Pramoedya Ananta Toer dilarang beredar. Pramoedya kemudian dipenjara selama satu tahun.

Tiga buku kumpulan puisi juga dilarang beredar pada waktu itu. Salah satu buku kumpulan puisi karya Sabar Anantaguna yang berjudul *Yang Bertanah air tapi Tak Bertanah*, sementara dua lainnya karya Agam Wispi yang berjudul *Yang Tak Terbungkamkan* dan *Matinya Seorang Petani* (Lekra, 1961).

Buklet *Demokrasi Kita* karya Mohammad Hatta juga dilarang beredar yang ditulis Hatta setelah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Buklet itu berisi kritik terhadap Sukarno. Pelarangan buklet juga menyebabkan Hamka ditangkap dan dipenjara karena memublikasikan isi buklet di majalah *Pandji Masyarakat*. Sebelumnya (sepanjang 1957), penguasa melarang penerbitan dari 33 penerbitan dan menutup tiga kantor berita, termasuk di antaranya Kantor Berita Antara.

Pada periode Maret 1957–1 Mei 1963, Penguasa Perang memiliki kekuasaan tak terbatas untuk memberlakukan sensor dan pelarangan terbitan. Dunia penerbitan, termasuk perbukuan semakin terpuruk karena para penguasa militer di berbagai daerah leluasa melakukan sensor dan melarang penerbitan.

Status keamanan negara diubah dari “keadaan perang” ke “keadaan bahaya” dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam Perpu tersebut, Penguasa Perang berhak mengontrol berbagai bentuk ekspresi dan menutup percetakan.



Gambar 10. Presiden Sukarno berkunjung ke Pekan Buku Indonesia
(Pekan Buku Indonesia, 1954)

Perbukuan pada Masa Orde Baru (1966–1998)

Awal Orde Baru berkuasa memberi setitik cerah bagi dunia perbukuan. Pemerintahan Soeharto menggenjot aktivitas penerbitan buku dengan mengadakan Proyek Penyediaan Buku Bacaan Sekolah Dasar (PPBASD) yang dikenal dengan nama Proyek Inpres karena didasarkan pada Instruksi Presiden. Ajip Rosidi yang menjabat sebagai Ketua Ikapi kala itu melakukan perbincangan dengan Direktur Jenderal Pendidikan, Prof. Dr. M. Makagiansar. Ajip menyampaikan saran tentang pentingnya sekolah-sekolah memiliki perpustakaan. Tampaknya saran itu diterima Dirjen, lalu dibawa ke Sidang Kabinet.

Saran Ikapi melalui Dirjen Pendidikan itu bersambut baik karena pada masa itu Pemerintah Indonesia juga tengah menikmati berkah dari surplus kenaikan harga minyak. Karena itu, keluarlah Inpres No. 10 Tahun 1973 yang mulai dilaksanakan tahun 1974. Tercatat pada tahun 1974, pemerintah membeli 25.000 eksemplar buku per judul dan pada tahun 1983/1984 meningkat menjadi 160.000 eksemplar per judul. (Setiawan, 2000)

Proyek Inpres yang berlanjut dengan Inpres No. 10/1974 memang memicu gairah penerbitan, termasuk munculnya para penerbit baru. Ikapi sendiri sebagai organisasi penerbit yang turut menjadi lokomotif dalam proyek itu mendapatkan “berkah” dari sumbangan dana para anggota Ikapi yang bukunya dibeli pemerintah.

Di luar buku proyek yang digagas pemerintah, penerbitan buku umum juga mengalami peningkatan pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Penerbit-penerbit moderat mulai bermunculan mengusung konsep modern, di samping raksasa yang telah lebih dulu ada seperti Kelompok Kompas Gramedia. Pada masa itu muncul Grup Penebar Swadaya yang menerbitkan buku-buku pertanian, buku hobi, dan buku umum. Muncul pula Grup Mizan yang mengusung buku-buku

religi Islam dan Penerbit Gema Insani Press. Dua penerbit ini menjadi ikon semaraknya buku religi Islam dengan kemasan kontemporer. Lalu, disusul Grup Agromedia pada tahun 2000-an yang menerbitkan buku pertanian-peternakan dan buku umum.

Barometer perbukuan nasional pada fase modern berpusat di empat kota, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Solo. Di Yogyakarta muncul banyak penerbit kecil dan penerbit swakelola (*self-publisher*) yang dipelopori para mahasiswa. Penerbit-penerbit kecil ini mampu unjuk gigi dengan beberapa karya yang menarik perhatian masyarakat pembaca di Indonesia. Di Solo berkembang penerbit buku-buku pendidikan, terutama buku LKS yang dikerjakan sebagai produksi rumahan.

Penerbitan Pemerintah

Tahun 1968, UNESCO yang tengah melakukan riset perbukuan menganjurkan kepada negara-negara ASEAN untuk membentuk lembaga pengembangan perbukuan di negara masing-masing. Negara yang merespons langsung adalah Singapura yang mendirikan National Book Development Council of Singapore (NBDCS) dan Malaysia yang mendirikan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia (MBKM). Indonesia pada waktu itu belum mendirikan lembaga perbukuan semacam itu mengingat Indonesia baru mengalami suatu peristiwa kelam dalam sejarahnya setelah merdeka hingga berujung pada terjadinya suksesi kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Walaupun demikian, sejarah mencatat bahwa pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pembangunan SDM melalui pendidikan mulai mendapat perhatian serius. Meskipun menghadapi kekacauan karena krisis ekonomi dan pemberontakan G.30-S/PKI, pada awal 1970-an, Indonesia mulai mampu bangkit dengan adanya surplus pendapatan dari sektor migas karena kenaikan harga minyak dunia.

Kehadiran buku, terutama buku teks pelajaran, langsung mendapat perhatian pemerintah karena disadari jumlah dan mutunya tidak memenuhi harapan untuk mendukung pembangunan. Pada masa itu, Pemerintah telah memutuskan memilih skala prioritas mengembangkan buku teks pelajaran untuk mata pelajaran pokok di pendidikan dasar dan menengah yang diusahakan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan swasta. Adapun mata pelajaran lain (yang bukan mata pelajaran pokok) diserahkan kepada penerbit swasta. Buku teks pelajaran terbitan pemerintah tersebut dikenal dengan sebutan *buku teks utama*.

Buku teks utama menjadi ranah pemerintah untuk menerbitkannya. Dalam hal ini pemerintah menggandeng PN Balai Pustaka sebagai perusahaan pemerintah untuk menerbitkan dan mencetak buku teks utama tersebut yang populer disebut **buku paket**. Terpilihnya PN Balai Pustaka untuk menerbitkan buku paket secara tunggal pada masa itu mendapat respons dari pihak (penerbit) swasta yang merasa terhambat dalam pemasaran buku secara bebas.

Meskipun demikian, pada periode ini pemerintah telah menjadikan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) yang terbentuk pada 1950 sebagai mitra strategis dalam pembangunan perbukuan. Banyak kebijakan perbukuan periode ini dipengaruhi juga oleh saran-saran Ikapi yang dimotori ketuanya, Ajip Rosidi, kala itu.

Penerbitan Swasta

Tanggal 2 Mei 1973, tepat pada Hari Pendidikan Nasional, menjadi hari yang istimewa bagi dunia perbukuan Indonesia. Bertempat di Istana Bogor, Presiden Soeharto mengadakan jamuan makan siang yang dihadiri juga oleh Wakil Presiden, Adam Malik, dan para pejabat negara terkait dirayakannya Tahun Buku Internasional.



Gambar 11. Peringatan Tahun Buku Internasional 1972 di Istana Bogor diresmikan oleh Presiden Soeharto (Repro 50 Tahun Ikapi, 2000)

Dalam kesempatan jamuan makan siang yang penting itu, Presiden Soeharto juga mengundang para pengurus Ikapi. Hasil dari kegiatan yang dimaksudkan untuk menggalang dana bagi kegiatan Tahun Buku Internasional 1972 di Indonesia itu berbuah modal pendirian Yayasan Buku Utama. Bunga dari modal deposito Yayasan Buku Utama digunakan untuk memberi hadiah tahunan bagi buku remaja terbaik yang diterbitkan setiap tahun.

Kegiatan penerbitan buku yang dipelopori Ikapi pun terasa mendapatkan suntikan serum yang memacu semangat menerbitkan buku bermutu. Kala itu, Ikapi dipimpin oleh Ajip Rosidi, salah seorang sastrawan dan penulis produktif yang hidupnya disebut-sebut telah menyatu dengan buku.

Peran Ajip Rosidi sebagai Ketua Ikapi pada tahun-tahun penting digenotnya pembangunan di Indonesia memberi arti tersendiri bagi Ikapi dan dunia perbukuan Indonesia. Ajip mampu memainkan

diplomasi yang baik dengan pemerintah. Terbukti dari berbagai usulannya diterima dan diamini oleh pemerintah masa itu, khususnya Kementerian P & K.

Prof. Dr. M. Makagiansar baru saja diangkat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan. Saat berlangsung obrolan antara ia dan Ajip Rosidi yang mewakili Ikapi Pusat, terlontar saran Ajip tentang betapa pentingnya sekolah-sekolah memiliki perpustakaan. Saran itu sepertinya dibawa oleh Departemen P&K ke dalam Sidang Kabinet.

Gayung bersambut, Pemerintah Indonesia yang saat itu mendapatkan surplus penghasilan dari kenaikan harga minyak dunia menyambut baik saran itu dengan mengeluarkan suatu kebijakan penting. Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 10/1973 yang mulai dilaksanakan pada tahun 1974. Selain itu, kemudian dikeluarkan juga Inpres No. 6/1974 tentang Program Bantuan Pembangunan SD yang di dalamnya termasuk proyek pengadaan buku.

Inpres ini memaklumkan proyek bernama Proyek Penyediaan Buku Bacaan Sekolah Dasar (PPBASD). Apa yang dimaksud buku bacaan di sini adalah buku nonteks (bukan buku pelajaran), terutama yang berupa cerita (fiksi). Proyek ini kemudian lebih populer disebut sebagai Proyek Inpres.

Setiap tahun sejak 1974, pemerintah membeli buku-buku bacaan dari penerbit swasta. Pada periode 1973/1974 buku yang dibeli sebanyak 25.000 eksemplar per judul. Sepuluh tahun kemudian pada 1983/1984, buku yang dibeli meningkat menjadi 160.000 eksemplar per judul (Setiawan, 1999).

Dunia buku Indonesia pun bergairah. Banyak penerbit “dadakan” dan penulis “dadakan” mendapatkan “berkah” Proyek Inpres. Pertama, para penerbit dan penulis itu mendadak berdiri dan muncul. Kedua, para penerbit dan penulis itu banyak yang kaya mendadak akibat mendapatkan keuntungan besar dari pembelian buku Proyek Inpres yang jumlahnya mencapai puluhan ribu untuk satu judul buku.

Kondisi tersebut lumrah terjadi ibarat ada gula ada semut. Namun, dampaknya ternyata kurang baik karena para penerbit musiman itu dapat dikatakan banyak menciptakan buku “asal jadi” yang juga dibeli oleh Proyek Inpres.

Produksi buku nasional memang meningkat akibat pengaruh proyek Inpres menjadi 2.500-3.000 judul buku per tahun dibandingkan masa sebelum proyek yaitu hanya berkisar 1.500 judul buku per tahun (riset BPPBN). Namun, dari jumlah tersebut, 70% adalah buku pelajaran dan sisanya buku umum (Business News, 22 Mei 1981 dalam Setiawan, 1999).

Gagasan Buku Ajip Rosidi

Pada dasawarsa 1970-an Ajip Rosidi boleh disebut seorang “bintang” dalam pembicaraan soal buku di Indonesia. Selain sebagai Ketua Ikapi, Ajip juga adalah pelaku sejati di dunia buku itu sendiri sebagai penulis, editor, dan juga penerbit.

Saat Proyek Inpres ibarat transfusi darah baru bagi para penerbit buku yang mengalami kelesuan, Ikapi di bawah kepemimpinan Ajip masih tetap kritis terhadap penerbit yang hanya coba-coba memanfaatkan situasi tersebut. Ajip melayangkan surat ke Menteri P&K *ad interim* kala itu, Drs. Umar Ali.

Ikapi memberi saran kepada pemerintah agar Proyek Inpres tidak membagikan buku ke setiap sekolah sebab tidak semua sekolah siap untuk memiliki perpustakaan. Buku-buku tersebut dikhawatirkan akan mubazir atau rusak. Ikapi menyarankan agar buku dikirim bertahap bagi sekolah yang sudah siap sarana perpustakaannya. Adapun bagi yang belum, dibina terlebih dahulu.

Usul itu tentu saja bertolak belakang dengan niat pengadaan buku secara besar-besaran. Ajip menyarankan pemerintah untuk lebih selektif.

Ikapi juga menganjurkan agar pemerintah tidak langsung membeli buku ke penerbit, tetapi melalui mekanisme pasar melewati toko buku. Dengan demikian, toko buku tetap dapat hidup dari keuntungan yang mereka peroleh.

Saran tersebut diterima oleh Menteri, tetapi penerbit tertentu ternyata punya “seribu satu” akal. Mereka membuka toko-toko buku sendiri di daerah untuk menampung order dari Pusat. Tentu saja yang diprioritaskan adalah buku terbitan mereka.

Hal yang sudah dipikirkan lagi oleh Ikapi adalah saran ketiga agar pemerintah memberi keleluasaan bagi daerah untuk memilih buku sesuai dengan kebutuhan dan cocok untuk daerahnya serta diprioritaskan membeli buku dari penerbit setempat. Saran ini bermaksud menjadikan buku tepat sasaran dan menjadikan penerbit daerah tetap mendapatkan kesempatan bertumbuh kembang.

Walaupun saran itu positif dan dapat diterima, seorang Ajip tidak mampu membendung praktik kolusi yang telanjur terjadi di antara para pejabat pemerintah dan penerbit. Meskipun Proyek Inpres dapat disebut “berkah” bagi dunia perbukuan di Tanah Air, dampak buruknya juga menghasilkan praktik kolusi dan korupsi di di dunia perbukuan.

Suatu hari tanggal 19 September 1975, Ajip Rosidi diundang untuk berbicara di depan Parlemen Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Ajip sudah membawa gagasan tentang Undang-Undang Buku. Ajip membandingkan industri buku dengan industri pers. Dunia pers menurut Ajip sudah jelas undang- undangnyanya dan sudah jelas tempat bernaungnyanya. Ada Undang-Undang Pokok Pers dan ada Departemen Penerangan. Adapun industri buku adalah kebalikannya, yaitu tidak ada UU dan tidak jelas pula tempat bernaungnyanya.

Kegalauan Ajip Rosidi merepresentasikan kegalauan Ikapi yang saat itu menjadi satu-satunya organisasi penerbit di Indonesia. Industri penerbitan buku meskipun sudah digadang-gadang sebagai industri penting dalam pembangunan oleh Presiden Soeharto, tetap tidak mendapatkan kejelasan untuk beraktivitas dengan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Beberapa penerbit swasta nasional lahir pada masa Orde Baru berkuasa. Berikut sejarah ringkas pendirian beberapa penerbit.

Penerbit Ghalia Indonesia

Penerbit Ghalia Indonesia didirikan tahun 1972 dengan akta notaris Sukandar, No. 13. Pendiri penerbit adalah Lukman Saad yang mengarahkan penerbitannya menerbitkan buku-buku pendidikan. Penerbit Ghalia Indonesia berlokasi di Jakarta Timur. Kelak Penerbit Ghalia Indonesia menjadi usaha percetakan dan penerbitan buku diteruskan melalui PT Yudhistira.

Penerbit Yayasan Obor Indonesia

Kelahiran Yayasan Obor Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fenomena “*book starvation*”. Istilah itu merujuk pada ketiadaan buku terbit pada tahun 1970-an di Indonesia. Fenomena “*book starvation*” di Indonesia kali pertama disampaikan oleh UNESCO pada tahun 1973. Pernyataan dari UNESCO itu membawa kegelisahan bagi para cendekiawan. Dari sinilah Yayasan Obor Indonesia kemudian lahir (Nurdin, 2020)

Ivan Kats (berkebangsaan Belanda) merupakan salah satu tokoh penting dalam proses kelahiran Yayasan Obor Indonesia. Sebelum Yayasan Obor Indonesia terbentuk, Obor telah terlebih dahulu hadir sebagai jaringan kerja perusahaan The International Book Institute. Ivan Kats memiliki kepedulian yang besar terhadap Indonesia. Ia memiliki jaringan pertemanan dengan para cendekiawan di Indonesia.

Ivan berperan aktif dalam membantu para pelajar Indonesia yang tengah melaksanakan studi di negeri Amerika Serikat maupun Eropa. Ia juga mendorong para pelajar Indonesia untuk menulis perspektif mereka mengenai kondisi budaya dan politik di Indonesia. Selain itu, ia ikut serta mencari dan menyeleksi buku-buku yang akan diterbitkan Obor, kemudian juga mencari sumber pendanaan operasional Obor.

Untuk mengisi kekosongan buku yang dinilai masih kurang tadi, Obor merasa buku terjemahan sebagai pilihan yang tepat. Melalui buku terjemahan diharapkan akan mendorong lahirnya karya-karya tentang Indonesia. Di sinilah awal Obor berperan sebagai *literary agent*. Ia menjadi perintis bagi penerbit-penerbit Indonesia untuk menerbitkan karya-karya terpilih dalam bidang ilmu sosial, politik, budaya, sastra, lingkungan hidup, teknologi dan informasi, serta lainnya. Selain itu, Obor juga kerap kali menyertai buku terbitannya dengan kata pengantar kritis dari para cendekiawan Indonesia.

Obor memulai aktivitasnya di Indonesia sejak 1973. Sebagai *literary agent*, Obor melakukan aktivitasnya secara kolaboratif. Obor pernah bekerja sama dengan beberapa penerbit, di antaranya Penerbit Indonesia Raya, Gramedia, Tintamas Indonesia, Bharata Karya Aksara, Pustaka Sinar Harapan, dan penerbit lainnya.

Baru pada tahun 1983, Yayasan Obor Indonesia memulai kiprahnya sebagai sebuah penerbitan. Penerbit Yayasan Obor Indonesia menerbitkan buku pertamanya dengan judul *The Poverty Curtain* atau *Tirai Kemiskinan* karya Mahbub Ulhaq. Terbitan kedua ialah karya Romo Mangunwijaya berjudul *Teknologi dan Dampak Kebudayaannya*. Pada kurun waktu 1980-an Penerbit Yayasan Obor Indonesia menerbitkan buku-buku bertema kemiskinan, lingkungan, pembangunan desa, hukum dan hak asasi manusia, serta sastra.

Penerbit Bumi Aksara

Penerbit Bumi Aksara bermula dari sebuah usaha toko buku yang meningkat menjadi grosir buku. Lalu, usaha ini ditingkatkan menjadi penerbitan buku dengan pendirian Penerbit Aksara Baru pada tahun 1970-an berbentuk firma. Tahun 1980-an dikembangkan lagi usaha penerbitan berbadan hukum PT yakni PT Bina Aksara. Kedua penerbit ini tidak bertahan lama.

Salah seorang pendiri tetap memiliki idealisme dalam bidang perbukuan. Karena itu, berdirilah PT Bumi Aksara pada tahun 1990. Jadi, Penerbit Bumi Aksara merupakan usaha terusan dari penerbitan sebelumnya. Dua orang pendiri Lucy Andam Dewi dan H. Amir Hamzah bersepakat menjalankan usaha penerbitan Bumi Aksara. Penerbit Bumi Aksara bergerak dalam bidang penerbitan buku-buku pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi. Penerbit Bumi Aksara memiliki beberapa lini usaha penerbitan.

Penerbit Pustaka Jaya

Penerbitan buku-buku pada periode awal 1970-an sempat mengalami kemandekan disertai rendahnya minat baca masyarakat. Dari kegelisahan akan hal itu, Asrul Sani dan beberapa anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) terdorong untuk menggagas suatu penerbit yang mampu menerbitkan buku-buku bermutu. Lahirlah kemudian Pustaka Jaya (Dunia Pustaka Jaya) pada tanggal 15 Mei 1971. Pada awal kiprahnya, Penerbit Pustaka Jaya berkolaborasi dengan DKJ untuk menerbitkan buku-buku hasil sayembara DKJ, berupa tulisan roman dan naskah sandiwara. Karya-karya yang meraih penghargaan sayembara itu diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Kemudian, Pustaka Jaya mulai menerbitkan buku-buku sastra Indonesia klasik (cetak ulang). Selain itu, Pustaka Jaya juga menerbitkan buku-buku terjemahan sastra dunia.

Pustaka Jaya memulai aktivitasnya dengan berbekal modal pinjaman dua puluh juta rupiah. Struktur kepengurusan PT Pustaka Jaya diisi oleh Ajip Rosidi (presiden direktur), Rachmat Marta (direksi), dan komisaris Ir. Ciputra (ketua yayasan); Adnan Rusdi Surjadi; dan Iravati Sudiarso. Kemudian, jajaran dewan pengawas terdiri atas delapan orang (empat tokoh DKJ dan empat dari Yayasan Jaya Raya), di antaranya Ir. Ciputra (ketua), Ajip Rosidi, H. B. Jassin, Ramadhan K. H., Asrul Sani,

Budiman Kusika, Ali Audah, dan Soeparno. Pada kurun waktu 1971–1981, Ajip Rosidi menjadi Direktur Utama PT Pustaka Jaya.

Kehadiran Pustaka Jaya membawa misi menerbitkan buku-buku baik (terkhusus buku sastra) dan meningkatkan minat baca masyarakat. Salah satu upaya itu dilakukan melalui penerbitan buku anak dengan harapan dapat menstimulus generasi sejak dini untuk memiliki kebiasaan membaca. Impaknya, pada tahun 1975 terbitan buku anak-anak jauh berada di atas terbitan buku-buku berkategori pembaca remaja dan di atasnya (empat banding satu). Pada tahun 1981, kondisi terbitan buku kategori pembaca dewasa kembali lebih banyak dibandingkan terbitan buku-buku anak.

Pustaka Jaya menargetkan seluruh masyarakat kota dan daerah sebagai pembacanya. Artinya, Pustaka Jaya hadir untuk seluruh pembaca di tingkat nasional. Buku-buku terbitannya tersebar di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, buku-buku Pustaka Jaya paling laku terjual di beberapa kota besar, yakni Medan, Padang, dan Palembang. Pustaka Jaya melakukan penjualan dengan sistem mandiri, tidak memasarkannya melalui perwakilan (*reseller*).

Kedudukan Pustaka Jaya kukuh dalam menerbitkan karya-karya bermutu, khususnya karya sastra. Adapun beberapa karya yang telah diterbitkannya berikut ini.

1. Kumpulan cerita pendek, seperti *Keajaiban di Pasar Senen* (Misbach Jusa Biran, 1971), *Icih* (Ali Audah, 1972), *Dari Suatu Masa dari Suatu Tempat* (Asrul Sani, 1972), *Seribu Kunang-Kunang di Manhattan* (Umar Kayam, 1972), *Oh, Film* (Misbach Jusa Biran, 1973), *Malam Pengantin* (Putu Arya Tirtawira, 1974), dan sebagainya.
2. Novel, antara lain *Bila Malam Bertambah Malam* (Putu Wijaya, 1971), *Orang Buangan* (Harijadi S. Hartowardojo, 1971), *Pada Sebuah Kapal* (Nh. Dini, 1973), *Sang Guru* (Gerson Poyk, 1973), *Telegram* (Putu

- Wijaya, 1973), *Hadiah Ulang Tahun* (Totilawati Tjitrawasita, 1974), dan karya novel lainnya.
3. Kumpulan puisi, di antaranya *Sajak-Sajak Sepatu Tua* (Rendra, 1972), *Selembur Daun* (Wing Kardjo, 1974), *Cermin* (Abdul Hadi W.M., 1975), *Mantera* (Asrul Sani, 1975), *Romansa Perjalanan* (Kirjomulyo, 1976), *Isyarat* (Kuntowijoyo, 1976), dan sebagainya.
 4. Karya umum berupa esai dan kritik sastra, di antaranya *Bakat Alam dan Intelektualisme* (Subagio Sastrowardoyo, 1972), *Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang* (Goenawan Mohamad, 1972), *Berkenalan dengan Existensialisme* (Fuad Hassan, 1973), *Perjuangan dan Tanggung Jawab dalam Kesusastraan* (Soetan Takdir Alisjahbana, 1976), *Chairil Anwar: Sebuah Pertemuan* (Arif Budiman, 1976), dan masih banyak karya umum lainnya.

Penerbit Gramedia Pustaka Utama

Penerbit Gramedia Pustaka Utama lahir dari sebuah pendirian PT pada tanggal 12 Maret 1970. Dua orang pendirinya, P. K. Ojong dan Jakob Oetama lebih dulu mendirikan toko buku pada tahun 1969.

Pada tanggal 7 Agustus 1972 menjadi hari yang bersejarah ketika Adisubrata, direktur pertama Penerbit Gramedia menandatangani kontrak perdana dengan pengarang. Buku pertama yang diterbitkan adalah novel berjudul *Karmila* karangan Marga T yang sebelumnya merupakan cerita bersambung di harian *Kompas*. Selanjutnya, menyusul buku nonfiksi terjemahan *Hanya Satu Bumi* yang ditulis oleh Barbara Wako dan Rene Dubos, tawaran dari Yayasan Obor. Buku ini merupakan laporan persiapan untuk konferensi lingkungan pertama tingkat dunia di Stockholm pada tahun 1972 yang mendasari munculnya ide pembangunan berkelanjutan dalam konferensi tingkat dunia lanjutannya pada tahun 1987.

Pendirian Penerbit Gramedia makin dikukuhkan dengan Surat Keputusan bertanggal 25 Maret 1974 yang ditandatangani oleh

Jakob Oetama (selaku Pimpinan PT Gramedia), yang memberikan kewenangan kepada Adisubrata untuk menandatangani perjanjian kepada pihak luar/pengarang atas nama PT Gramedia Pustaka Utama. Tanggal inilah yang kemudian menjadi “hari lahir” penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Gramedia Pustaka Utama kemudian menjadi penerbit besar yang menerbitkan berbagai jenis buku. Banyak sekali buku-buku berpengaruh terbit di antaranya buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* karya Prof. Miriam Budiardjo. Buku ini menjadi buku teks pertama di perguruan tinggi tentang ilmu politik yang sangat membantu jutaan mahasiswa politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya di Indonesia. Buku tersebut ditulis secara sistematis dan komprehensif. Hingga kini buku itu masih digunakan dan terus dicetak ulang. Perevisian buku dilakukan oleh murid-murid Prof. Miriam Budiardjo sehingga terdapat penyesuaian pada edisi revisi.

Penerbit Penebar Swadaya

Penerbit awal di Indonesia yang menetapkan haluan khusus dalam penerbitan buku ialah Penebar Swadaya. Penerbit yang berdiri tanggal 10 Desember 1980 ini khusus menerbitkan buku-buku pertanian mengingat Indonesia menyebut dirinya sebagai negara agraris. Penebar Swadaya muncul karena permintaan dari para pembaca majalah *Trubus* yang telah lebih dulu menancapkan eksistensinya. Penebar Swadaya “adik” dari majalah *Trubus* sama-sama berada di bawah naungan Yayasan Bina Swadaya.

Penerbit Penebar Swadaya berkantor di Jalan Gunung Sahari III/7, Jakarta Pusat. Setelah Penebar Swadaya, muncul pula Penerbit Puspaswara yang masih satu grup.

Dinamika Perbukuan pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru sebagai masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Indonesia memunculkan berbagai dinamika di dalam bidang perbukuan. Presiden Soeharto menaruh perhatian terhadap bidang pendidikan, khususnya penerbitan buku. Hal ini direspons dengan berbagai program dan proyek perbukuan.

Impak positif dari program dan proyek perbukuan ialah menggerakkan industri perbukuan nasional. Indonesia dibanjiri oleh buku-buku dari berbagai penulis dan penerbit. Bahkan, proyek perbukuan juga mendorong berdirinya penerbitan swasta yang tidak lagi dipelopori oleh para sastrawan, wartawan, atau pendidik. Beberapa pengusaha mulai melirik penerbitan buku sebagai bidang usaha yang menjanjikan pada masa ini.

Impak negatif dari program dan proyek perbukuan pada masa Orde Baru ialah bertumbuh kembangnya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana lazim terjadi pada masa-masa Orde Baru.

“Paceklik Buku”

Tahun 1973, UNESCO menyebut Indonesia mengalami *book starvation* alias paceklik buku. Hampir tidak ada buku baru yang terbit di Indonesia. Kondisi tersebut dapat ditelusuri dari kondisi tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 1967, pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang sehingga berbagai subsidi perlahan ditiadakan, termasuk subsidi harga kertas. Sampai dengan tahun 1966 para penerbit menerima subsidi kertas melalui Yayasan Lektur. Nilai subsidi pada waktu itu sangat fantastis yakni 75% dari harga normal.

Pencabutan subsidi kertas membuat sejumlah penerbit di Jakarta dan di daerah gulung tikar. Selain itu, penerbit juga menghadapi kondisi naiknya harga komoditas, termasuk jasa.

Pemerintah melalui Departemen PDK berusaha turun tangan dengan membentuk Komisi Kertas yang menyertakan Ikapi di dalamnya. Departemen PDK mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti pengesahan dan penyediaan buku pelajaran, termasuk memberlakukan Surat Izin Pembelian Kertas. Aturan terakhir ini dikeluarkan oleh Biro Perpustakaan dan Pembinaan Buku Departemen PDK yang membebaskan siapa pun untuk mengimpor kertas koran. Liberalisasi tersebut menurut Ikapi sangat memukul para anggotanya yang lemah modal (Setiawan, 2000).

Pihak asing coba membantu para penerbit, seperti badan-badan PBB (WHO, FAO, ECAFE, UNESCO, UNICEF) serta lembaga seperti Colombo Plan, Ford Foundation, dan USAID. Mereka memasok kertas untuk para penerbit. Namun, sayangnya kertas yang dipasok terhenti di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Departemen PDK. Kertas hibah tersebut ada yang digunakan di luar ketentuan Komisi Kertas.

Kondisi di Indonesia mendorong United States Agency for International Development (USAID) mengirimkan ahlinya sebanyak 7 orang untuk memantau perkembangan penerbitan dan percetakan di Indonesia. Hasilnya setelah 40 hari, tim pakar USAID menyimpulkan hal berikut: (1) produksi buku berjalan dalam kondisi yang tidak ekonomis; (2) kertas sangat susah diperoleh; (3) kondisi percetakan secara umum mengkhawatirkan (mesin-mesin tua dan lamban); (4) pendidikan tenaga ahli tidak memadai; (5) komponen percetakan yang makin aus menuju kehancuran; (6) segelintir penerbit yang semula efisien dan kreatif menjadi ekstra hati-hati berkalkulasi dan hanya mencetak buku yang diprediksi benar-benar dapat terjual.

Lahirnya Pusat Grafika Indonesia

Peralihan pemerintahan dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru turut memengaruhi perkembangan industri penerbitan dan percetakan di Indonesia. Menyadari pentingnya pencetakan media pada masa

itu untuk mendukung dunia pendidikan, Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Belanda di Den Haag pada tanggal 3 April 1964. Kerja sama itu disebut *Agreement of Technical Cooperation*.

Situasi politik Indonesia tidak stabil pada masa itu menyebabkan kerja sama tersebut belum dapat terlaksana. Pada akhir tahun 1966, Menteri P & K pada masa itu, Dr. Sarino Mangunpranoto telah menyampaikan adanya kebutuhan buku pelajaran dan buku tulis yang harus dipenuhi untuk mendukung aktivitas pendidikan di Indonesia. Ia telah mencoba meminta bantuan kepada Pemerintah Kerajaan Belanda.

Gayung bersambut dari Pemerintah Kerajaan Belanda. Belanda mengirimkan tim yang dipimpin seorang ahli grafika internasional bernama Th. H. Oltheten pada bulan Mei 1967 untuk meninjau kebutuhan percetakan di Indonesia, terutama dalam pengadaan buku pelajaran dan buku tulis. Th. H. Oltheten pada masa itu menjabat sebagai Dirjen Percetakan dan Penerbitan Belanda.

Tim menyampaikan laporan hasil survei bahwa ada kebutuhan jutaan eksemplar buku pelajaran dan buku tulis. Namun, kebutuhan ini dipandang bersifat konsumtif sehingga tidak efisien jika mengirim langsung dari Negeri Belanda. Survei ini juga menunjukkan kondisi industri grafika di Indonesia yang sangat parah saat itu, baik dari segi teknologi maupun dari segi SDM kegrafikaan. Karena itu, tim pimpinan Th. H. Oltheten itu merekomendasikan didirikan pusat pengembangan kegrafikaan (*graphic development center*) dan membina sebuah program dalam bentuk proyek kerja sama teknis sehingga dalam jangka waktu tidak terlalu lama akan tercipta situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah Indonesia mengembangkan sendiri industri percetakan.

Dengan demikian, Pemerintah Belanda akan memberikan “kail” dalam bentuk pendidikan dan pelatihan tenaga ahli kegrafikaan, berikut

sarana dan prasarana pencetakan kepada Indonesia. Proyek pembinaan ini disetujui oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan ditindaklanjuti oleh Menteri P & K pada masa itu yang telah beralih ke Prof. Sanusi Hardjadinata, lalu beralih lagi ke Mashuri, S.H.

Pada tanggal 19 Agustus 1968 dimulailah masa persiapan kerja sama dengan pengoperasian Mobile Printing Unit (MPU). MPU adalah sebuah unit percetakan kecil dalam sebuah mobil yang dapat berpindah-pindah.

Akhir Oktober 1968 mulai berdatangan mesin-mesin cetak canggih dan peralatan pendukungnya secara bertahap. Tenaga ahli grafika dari Belanda juga mulai berdatangan yang dipimpin oleh Ir. H.J.C. Voorwald.

Pada tanggal 26 April 1969, Proyek Grafika Indonesia yang disebut sebagai fase pertama resmi dilaksanakan. Proyek ini dipusatkan di sebuah lokasi di Jakarta yang disebut Pusat Grafika Indonesia, tepatnya beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kaveling No. 40, Jakarta. Pengelolaan Pusgrafin dipercayakan kepada Soeparmono yang tercatat sebagai Kepala Pusgrafin pertama periode 1969–1973.



Gambar 12. Papan nama Pusat Grafika Indonesia (Tangkapan layar video dari Arsip Nasional)

Hadir dalam peresmian tersebut Duta Besar Kerajaan Belanda dan Menteri P & K, Mashuri, S.H. yang juga menandatangani perjanjian kerja sama. Menteri Mashuri Saleh meninjau mesin-mesin cetak dan peralatan pendukungnya yang didatangkan langsung dari Negeri Belanda.



Gambar 13. Menteri P & K, Mashuri Saleh meninjau fasilitas di Pusat Grafika Indonesia (Tangkapan layar video dari Arsip Nasional)

Pada saat didirikan tahun 1969 Pusat Grafika Indonesia menempati gedung yang disebut pre-fab dengan luas lebih kurang 600 m². Luas gedung sebesar itu tentu belum memadai untuk sebuah proyek berskala nasional pada masa itu.

Selanjutnya, pada tanggal 26 April 1973 ditandatangani kembali perjanjian kerja sama (*administrative agreement*) fase kedua oleh Menteri P dan K Mashuri, S.H. dengan Duta Besar Belanda di Pusat Grafika Indonesia. Proyek ini dijadwalkan berakhir pada tanggal 27 Maret 1976.

Pada tanggal 20 Agustus 1973 Menko Kesra Prof. Sunawar Sukowati dan Menteri P dan K Prof. Dr. Ir. Sumantri Brodjonegoro meresmikan gedung baru Pusat Grafika Indonesia. Namun, Menteri P & K berhalangan hadir karena sakit.

Proyek ini dinilai berhasil dan Pemerintah Republik Indonesia sehingga memberikan anugerah Bintang Jasa Nararya kepada Th. Oltheten, sebagai orang yang berjasa mewujudkan Pusgrafin. Selanjutnya, Pusgrafin masuk ke lembaga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen Pendidikan Nasional.

Perlu disampaikan bahwa Pusgrafin ialah peneroka munculnya penerbitan universitas (*university press*) di Indonesia. Pusgrafin memfasilitasi pendirian penerbitan universitas dengan memberikan bantuan mesin-mesin cetak dari Belanda yang dilaksanakan pada tahun 1971.

Masa-masa awal pengembangan penerbitan universitas ini dimulai untuk lima universitas negeri di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Semarang, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin.

Pada awal tahun 1990-an keberadaan Pusgrafin semakin dianggap penting sebagai lembaga diklat di bidang kegrafikaan. Sementara itu, dunia penerbitan (buku dan media massa) serta percetakan berkembang pesat. Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan diklat dengan membagi wilayah Indonesia menjadi tiga bagian, yaitu wilayah barat, tengah, dan timur. Wilayah barat diwakili oleh Kota Medan, tengah oleh DKI Jakarta, dan timur oleh Kota Makassar.

Pada tanggal 7 September 1995 diresmikan dua Unit Pelayanan Teknik (UPT) Pusat Grafika Indonesia, yakni Balai Pelatihan Grafika Medan dan Balai Pelatihan Grafika Makassar. Momentum tersebut mengawali perpindahan kantor pusat Pusgrafin dari Jalan Gatot Subroto ke Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Perpindahan kantor Pusgrafin merujuk pada surat tanggal 11 Februari 1991 Nomor 8454/A/4/V/12 sebagai peristiwa “tukar guling” tanah Pusat Grafika Indonesia (Depdiknas) dengan PT Bimantara Siti Wisesa. Perpindahan ini dengan alasan karena gedung untuk pelatihan di Jalan Gatot Subroto sudah tidak dapat memenuhi standar sebagai tempat diklat. Dengan demikian, harus dicari yang lebih besar dan luas dan jika memungkinkan, dapat pula memberikan fasilitas terhadap seluruh wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur.

Melalui UPT Balai Pelatihan Grafika Medan, Pusgrafin menyelenggarakan kerja sama diklat untuk sembilan provinsi dan melalui UPT Balai Pelatihan Grafika Makassar diselenggarakan kerja sama diklat untuk empat belas provinsi. Pada tahun 2005 berubah menjadi Balai Grafika Makassar dan Medan sesuai Kepmendiknas Nomor 023/U/2005.

Kelahiran BPPBN

Pemerintah akhirnya menjawab “kegalauan” Ketua Ikapi melalui SK Menteri P & K No. 0399/0/1977 tanggal 6 September 1977. SK itu berisikan bahwa Ikapi dan para penerbit lainnya berada di bawah pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Departemen P & K. Meskipun demikian, Ikapi tidak terlalu senang dengan keputusan tersebut karena pemerintah juga tetap memberi tempat bagi para penerbit non-Ikapi. Artinya, Ikapi tidak diakui sebagai satu-satunya organisasi penerbit di Indonesia.

Selain itu, pada tanggal 31 Maret 1978 keluar Keppres No. 5/1978 tentang Pendirian Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN). Inilah untuk kali pertama Indonesia memiliki sebuah badan perbukuan yang dibentuk pemerintah. BPPBN merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Menteri P & K.

Tugas BPPBN adalah melakukan berbagai kajian dan merumuskan konsep-konsep kebijakan di bidang perbukuan nasional dengan

kewenangan memberikan hasil kajian dan konsep kebijakan perbukuan. Menjawab saran Ajip Rosidi, BPPBN juga mendapatkan tugas untuk mengkaji dan mengidentifikasi perlunya undang-undang perbukuan.

Selama satu dasawarsa, Pemerintah Orba telah memberikan warna tersendiri bagi dunia perbukuan Indonesia, terutama adanya Proyek Inpres. Dalam catatan BPPBN bahwa pada tahun 1972, sekira 90% penerbit Indonesia tergolong bermodal lemah. Dalam rentang 1964-1972, jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia hanya mencapai rata-rata 1.500 judul per tahun.

Setelah adanya Proyek Inpres, jumlah produk buku meningkat menjadi 2.500-3.000 judul per tahun. Namun, 70% dari jumlah itu masih merupakan buku pelajaran sekolah dan sisanya adalah buku umum.

Angka produk 3.000 judul itu kemudian sering dipakai oleh kalangan pemerintah ataupun non- pemerintah zaman Orba untuk menggambarkan terpuruknya perbukuan kita dibandingkan negara lain. Sebuah data dari Unesco Statistical Yearbook 1980 menyebutkan bahwa pada tahun 1977 produksi buku Indonesia hanya mencapai 2.265 judul. Bandingkan hal ini dengan India yang pada tahun 1977 telah menghasilkan 12.932 judul per tahun. Adapun Korea Selatan telah mencapai 16.364 judul. Bahkan, Indonesia tertinggal dari Muangthai (Thailand) yang berhasil memproduksi 3.390 judul (*Kompas*, 19 Mei 1981 dalam Setiawan, 1999).

Penilaian Buku Sekolah Tahun 1979

Dirjen Dikdasmen Depdikbud, Prof. Darji Darmodiharo, S.H., mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 042/C/1/Kep/79 tentang Prosedur dan Mekanisme Penilaian Buku Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini melegitimasi peran penerbit swasta dalam pengadaan buku sekolah.

Definisi buku sekolah adalah buku yang dipergunakan di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan, baik untuk murid dan/atau guru, dan dipakai sebagai salah satu sarana dalam proses belajar mengajar. Buku sekolah terbagi lagi atas buku teks utama, buku teks pelengkap, buku bacaan/kepuustakaan, buku sumber, dan bacaan lainnya. Tentang definisi buku ini perlu diungkapkan di sini karena pada perkembangan selanjutnya, definisi buku pendidikan berubah-ubah pada masa beberapa menteri pendidikan.

Istilah buku teks utama, bahkan kemudian digunakan lagi kelak di dalam Undang-Undang No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan. Adapun buku teks pelengkap berubah namanya menjadi buku teks pendamping. Perhatikan definisi tiap jenis buku pada Tabel 1.

Direktorat Jenderal Dikdasmen juga menerbitkan Pedoman Penilaian Buku Sekolah dengan melibatkan tim penilai yang terdiri atas Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Daerah. Tim Penilai Daerah bertugas menilai buku-buku yang sifatnya khas untuk digunakan di daerah yang bersangkutan dan buku-buku yang bersifat mengembangkan kebudayaan tradisional.

Buku-buku yang digunakan di sekolah harus mendapatkan pengesahan dari Dirjen Dikdasmen. Dengan demikian, program penilaian buku diadakan dengan melibatkan tim penilai. Penilaian buku sekolah ini hanya diadakan satu kali dalam setahun.

Jadi, pada era ini, penerbit swasta telah diperkenankan terlibat untuk menerbitkan buku sekolah melalui pengesahan yang dilakukan Dirjen Depdikbud. Namun, era ini akhirnya berakhir ketika muncul gagasan Proyek Buku Terpadu (PBT).

Studi Kelayakan Buku Teks

Dalam Repelita I (1969-1974) pengkajian terhadap buku teks (pelajaran) lebih diorientasikan pada penyediaan kekurangan buku di lapangan sehingga dampaknya dari sisi aspek kualitas agak terabaikan. Selanjutnya, pemerintah masuk ke tahap kedua pada penyempurnaan dan peningkatan kualitas, terutama untuk buku teks utama. Pengadaan buku tersebar dalam berbagai proyek buku sehingga bersifat parsial, seperti buku pelajaran untuk SD ditangani dengan Proyek P3D. Adapun buku-buku pelajaran untuk SMP dan SMA ditangani melalui Proyek SLU, sedangkan buku-buku pelajaran sekolah kejuruan ditangani oleh proyek-proyek di lingkungan Ditmenjur.

Penerbitan dan pencetakan buku teks yang dilakukan oleh pemerintah juga menjadi perhatian Ikapi. Ikapi kemudian mengeluarkan apa yang disebut “Memorandum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) tentang Mempertimbangkan Industri Perbukuan yang Sehat di Indonesia”. Ada tiga pokok soal yang dituangkan di dalam memorandum tersebut.

Salah satunya Ikapi ingin penerbit swasta diberi kesempatan dalam pengadaan buku paket yang selama ini memang hanya diterbitkan oleh pemerintah. Bukan hanya Ikapi, Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) yang saat itu diketuai oleh Sukamdani Sahid Gitosardjono juga menyuarakan pelibatan swasta dalam produksi buku teks utama.

Sukamdani berkeberatan dengan rencana Menteri P & K Daed Joesoef untuk menyerahkan pencetakan dan pendistribusian buku-buku kepada PN Balai Poestaka (*Berita Buana*, 3 Maret 1980 dalam Setiawan, 1999). PPGI mendesak pemerintah untuk melibatkan pencetak swasta dalam pengadaan buku yang akan dibeli Proyek Inpres itu. Keluhan PPGI ditampung sehingga dalam Proyek Buku Terpadu pencetakan buku dilakukan secara lelang.

Tahun 1979 dilakukan studi kelayakan terkait perbukuan yang dikerjakan oleh sebuah tim gabungan terdiri atas UNESCO, Bank Dunia, dan Depdikbud. Hasil studi kelayakan itu melahirkan gagasan bahwa sudah saatnya diperlukan suatu lembaga permanen yang menangani masalah perbukuan di lingkungan Depdikbud. Gagasan ini dijadikan dasar untuk menyelenggarakan Proyek Buku Terpadu (Integrated Textbook Project) pada tahun 1981/1982.

Studi kelayakan seperti yang telah disebutkan sebelumnya didasarkan pada kelemahan-kelemahan dari hasil proyek pengadaan buku pada tahun-tahun sebelumnya. Pusat Perbukuan (1995) menyebutkan beberapa kelemahan berikut ini:

1. kesenjangan isi buku dengan kurikulum;
2. kesenjangan isi buku antarjenjang pendidikan dalam bidang studi yang sama;
3. tumpang tindih beberapa isi buku antara bidang studi yang sama;
4. ketidaksesuaian dalam pembahasan materi yang sama dalam mata pelajaran/bidang studi yang berbeda; dan
5. penanganan yang kurang profesional dalam beberapa proyek mengakibatkan mutu isi dan fisik buku belum mencapai tingkat yang diharapkan dan pemanfaatan dana belum seefisien mungkin.

Proyek Buku Terpadu

Proyek Buku Terpadu (PBT) yang diselenggarakan pada masa kepemimpinan Menteri Daoed Joesoef di Departemen P & K dapat dikatakan sebagai proyek buku teks yang komprehensif dan ambisius sekaligus sentralistik karena semua dikerjakan secara terpusat di Jakarta. Hal ini tergambar di dalam buku *Proyek Buku Terpadu: Latar Belakang, Ruang Lingkup, dan Program Kerja* yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986—lima tahun setelah PBT dilaksanakan.



Gambar 14. Menteri P & K Daoed Joesoef bersama dengan Ketua Ikapi, Ismi Hadad (repro 50 Tahun Ikapi, 2000)

Proyek Buku Terpadu atau PBT dimulai pada tahun 1981 atau pada masa Repelita III (1979–1984) berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0138/8/1981 tanggal 11 April 1981 tentang Pembentukan Proyek Buku Terpadu. Proyek ini dibiayai dari dana Dikdasmen dalam bentuk DIP (APBN) dan juga pinjaman Bank Dunia yang tertuang dalam Loan Agreement Nomor 2102 IND.

Dalam perjanjian antara Pemerintah dan Bank Dunia disebutkan bahwa target produksi buku teks selama lima tahun (1981–1986) adalah 80.000.000 eksemplar. Proyek Buku Terpadu bertujuan

1. mempersiapkan pembentukan lembaga tetap (permanen) di bidang pengadaan buku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi;
2. menyusun konsep analisis kebijakan tentang pengembangan buku di sekolah-sekolah;

3. menyediakan buku-buku SD, SLTP, SLTA yang meliputi buku murid dan buku pegangan guru, serta mengadakan buku-buku yang diperlukan pada tingkat pendidikan tinggi;
4. pada tahap permulaan mengoordinasikan proyek-proyek buku pada lingkup Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedang pada tahap selanjutnya pengadaan buku dilakukan secara terpadu; dan
5. mengembangkan dan memantapkan sistem pengadaan dan distribusi buku.

PBT diselenggarakan dengan manajemen terpadu mulai manajemen editorial (pengadaan naskah, penyuntingan, perwajahan), manajemen produksi (pracetak dan cetak), manajemen pergudangan, manajemen distribusi hingga manajemen administrasi kesekretariatan dan keuangan. PBT sebagaimana tujuan awalnya menjadi cikal bakal terbentuknya lembaga perbukuan permanen yang disebut Pusat Perbukuan.

Kelahiran Pusat Perbukuan

Dapat dikatakan bahwa embrio lahirnya Pusat Perbukuan atau sering disingkat Pusbuk adalah penyelenggaraan Proyek Buku Terpadu yang dilaksanakan sejak 1981 pada masa kepemimpinan Menteri P & K Daoed Joesoef yang lalu beralih ke Nugroho Notosusanto pada kabinet periode selanjutnya.

PBT sendiri sudah merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri P & K. Baru kemudian pada tahun keenam pelaksanaan PBT (1986/1987) lembaga permanen bernama Pusat Perbukuan (Pusbuk) dibentuk, tepatnya pada tahun 1987 di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang kala itu dipimpin oleh Prof. Dr. Fuad Hassan sebagai Mendikbud. Adapun yang ditunjuk mengepalai Pusat Perbukuan pada tahun pertama pendiriannya adalah Drs. Taya Paembonan.

Pusat Perbukuan diharapkan dapat menangani berbagai masalah perbukuan yang terjadi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keppres RI Nomor 4 Tahun 1987 pada tanggal 6 Februari 1987. Lalu, tugas dan fungsinya dikuatkan kembali melalui Keputusan Mendikbud No. 0274/O/1987 tanggal 8 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedudukan Pusat Perbukuan adalah sebagai pelaksana tugas di bidang perbukuan yang berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Perbukuan sehari-hari dipimpin seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal dan teknis fungsional di bidang penulisan, penerjemahan, penilaian, seleksi, pengadaan dan produksi, serta distribusi buku berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Mendikbud.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perbukuan menjalankan fungsi-fungsi berikut ini:

1. merumuskan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kebijaksanaan teknis di bidang perbukuan;
2. mengurus dan melaksanakan koordinasi penulisan dan penerjemahan serta melaksanakan penilaian, seleksi, dan teknis produksi buku;
3. mengurus dan melaksanakan pengadaan dan distribusi buku; dan
4. melaksanakan urusan tata usaha.

Ruang lingkup dan sasaran tugas serta fungsi Pusat Perbukuan meliputi buku-buku pendidikan dan kebudayaan yang perencanaan, pengadaan, penyaluran, serta pengawasannya menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Atas dasar wawasan tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat Perbukuan melakukan konsultasi dan meminta pengarahannya kepada setiap Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud sesuai dengan bidang isi buku yang ditangani.

Kewenangan Pusat Perbukuan kemudian diatur di dalam Keputusan Mendikbud No. 0787/O/1987 Tanggal 11 Desember 1987 tentang Koordinasi Kegiatan Perbukuan di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan perbukuan yang dikoordinasikan sebagaimana diatur dalam keputusan tersebut adalah meliputi 1) penulisan naskah; 2) penerjemahan buku; 3) penilaian buku; 4) seleksi buku; 5) produksi buku; 6) pengadaan buku; dan 7) distribusi buku.

Kedudukan Pusat Perbukuan juga sangat kuat karena secara tidak langsung tertuang di dalam amanat GBHN 1993 yang merupakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang pendidikan sebagai berikut.

“Penulisan, penerjemahan, dan pengadaan buku pelajaran, buku bacaan, khususnya bacaan anak yang berisikan cerita rakyat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terbitan buku pendidikan lainnya digalakkan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca. Jumlah dan kualitasnya perlu terus ditingkatkan serta disebarakan merata ke seluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bersamaan dengan itu dikembangkan iklim yang dapat mendorong penulisan dan penerjemahan buku dengan penghargaan yang memadai dan jaminan perlindungan hak cipta.”

Pusat Perbukuan menempati kantor yang mentereng di lokasi yang dulunya bekas Kompleks Siliwangi, Jln. Dr. Wahidin (sekarang Jln. Gunung Sahari Raya, No. 4), Jakarta. Gedung delapan lantai itu menempati area seluas 7.000 m² dengan luas gedung 7.500 m² (seluruh lantai). Di sana juga berkantor Pusat Kurikulum. Pusat Perbukuan juga memiliki gudang pusat seluas 10.200 m² di daerah Bekasi.

Hadirnya Pusat Perbukuan sangat mewarnai kebijakan perbukuan di Tanah Air, khususnya buku pendidikan. Walaupun begitu, terjadi juga dinamika perbukuan yang sangat dipengaruhi oleh Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan yang menjabat pada era itu, yaitu Prof. Dr. Fuad Hassan.

Kelahiran Perpustakaan Nasional

Sejarah perpustakaan secara kelembagaan sejatinya sama tuanya dengan sejarah perbukuan Indonesia. Namun, terbentuknya Perpustakaan Nasional dianggap bermula dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 17 Mei 1980 di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dari itu, tanggal 17 Mei ditetapkan sebagai hari lahir Perpustakaan Nasional. Sebuah kebetulan jika tanggal 17 Mei itu sama dengan hari kelahiran Ikapi dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Buku Nasional.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI/Perpusnas RI) kemudian dikukuhkan pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989. Pada Pasal 19 dinyatakan bahwa Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perpustakaan Wilayah di Provinsi merupakan satuan organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugas perpustakaan nasional.

Basuki (2008) menjelaskan Pasal 19 dapat ditafsirkan bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan gabungan tiga lembaga. Dengan melihat gabungan ketiga lembaga tersebut maka sejarah Perpustakaan Nasional RI dapat dirunut berdasarkan pendekatan kelembagaan.

Dengan demikian, Perpustakaan Nasional merupakan integrasi Pusat Pembinaan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Perpustakaan Wilayah. Pusat Pembinaan Perpustakaan sendiri didirikan tahun 1975, sebelumnya bernama Lembaga Perpustakaan yang berdiri tahun 1967. Lembaga Perpustakaan merupakan kelanjutan dari Biro Perpustakaan yang berdiri pada tahun 1951 walaupun baru aktif pada tahun 1954.

Perpustakaan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan didirikan tahun 1980 merupakan gabungan Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Wilayah DKI, dan Bidang Bibliografi dari Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Apabila dirunut sejarah keempat lembaga, dari segi kelembagaan yang tertua adalah Perpustakaan Museum Nasional sebagai kelanjutan dari Perpustakaan Museum. Adapun Perpustakaan Museum merupakan lanjutan dari Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). LKI sendiri merupakan lanjutan Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang mulai menggunakan nama itu sejak tahun 1924 sebagai penghargaan atas karyanya.

Sebelum menggunakan tambahan nama Koninklijk, nama yang digunakan adalah Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen didirikan di Batavia tahun 1778.

Menurut Basuki (2008) dengan melihat sejarah kelembagaan maka sejarah Perpustakaan Nasional RI yang sekarang ini dapat dirunut ke tahun 1778 berdasarkan sejarah kelembagaan yang membentuk Perpustakaan Nasional RI. Artinya, sejarah perpustakaan nasional mundur lebih dari 250 tahun ke belakang, didirikan oleh tokoh VOC. Sejarah itu pun bergulir sebagaimana sejarah perbukuan di Indonesia. Lembaga perpustakaan sendiri tidak dapat dipisahkan dari sejarah perbukuan Indonesia.

Perkembangan Buku Umum

Perkembangan perbukuan pada dasawarsa 1980-an tidak lebih baik daripada 1970-an. Masalah yang dihadapi penerbit masih seputar harga bahan baku kertas yang tinggi. Bagi pengurus Ikapi, harga kertas di Indonesia yang masih mahal dianggap menjadi faktor penyebab tingginya harga buku.

Pada masa kepemimpinan Ajip Rosidi di Ikapi, ia dapat mengusahakan jenis kertas murah bernama HVO dari pabrik kertas Leces. Adapun untuk kertas impor, tarif bea masuk dan PPN belum dapat diturunkan, apalagi ditiadakan oleh pemerintah. Hal ini membuat Ketua Ikapi Ismid Hadad yang menggantikan Ajip bersuara lantang terkait persoalan kertas ini.

Pada saat Pameran Buku Nasional dan dalam rangka ulang tahun Ikapi ke-30 di Jakarta, Ismid menyampaikan kritiknya bahwa pemerintah kurang berupaya meringankan beban penerbit. Pemerintah masih memandang penerbit sebagai produk industri semata. Sebagai industri pun, kata Ismid pula, penerbit yang tergolong industri bermodal lemah dan masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh bahan baku berupa kertas, tidak memperoleh bantuan ataupun perhatian pemerintah. Ismid lalu mendesak pemerintah agar melakukan stabilisasi harga kertas sebagaimana stabilisasi harga semen (*Kompas*, 13 Mei 1980 dalam Setiawan, 1999).

Kritik Ismid konon menyinggung Menteri P&K kala itu, Daoed Joesoef. Sang Menteri sebelumnya sempat menyatakan pihaknya belum begitu mantap untuk mengakui Ikapi sebagai satu-satunya wadah penerbit Indonesia. Daoed mengusulkan agar Ikapi memberikan keleluasaan kepada penerbit baru dan para pengarang (*Suara Karya*, 21 Mei 1979 dalam Setiawan, 1999). Situasi ini ditengarai sebagai awal renggangnya hubungan Pemerintah, dalam hal ini Departemen P&K dan Ikapi.

Meskipun begitu, proyek Inpres masih mengalirkan keuntungan bagi banyak penerbit. Tercatat untuk tahun anggaran 1979/1980, Proyek Inpres telah menyediakan buku sebanyak 107 judul dengan total cetakan 13.375.000 eksemplar. Pada tahun anggaran 1980/1981, proyek tersebut ditargetkan membeli sebanyak 100 judul buku dengan total tiras 14.000.000 eksemplar. Melalui Inpres No. 6/1980, pemerintah menyediakan dana Rp4,5 miliar untuk proyek tersebut (Antara, 23 September 1981 dalam Setiawan, 1999).

Angka Kutukan 3.000 Eksemplar

Istilah angka “kutukan” sempat muncul di harian *Kompas* yang menunjukkan betapa terpuruknya dunia perbukuan kita. Banyak buku yang tidak mampu beranjak dari angka tiras 3.000 eksemplar yang kadang tidak laku terjual dalam setahun. Angka 3.000 eksemplar adalah angka umum pencetakan buku kali pertama yang memenuhi skala ekonomis.

Di samping tiras 3.000 eksemplar, ternyata angka 3.000 judul juga menjadi acuan terbitan buku di Indonesia setiap tahun. Angka cetakan pertama buku itu disampaikan oleh Ikapi dan bertahun-tahun dijadikan acuan.

Produksi buku yang kecil dibandingkan jumlah penduduk tahun 1995 yang mencapai 195 juta jiwa memang selalu diungkit. Belum lagi jika berbicara masalah kualitas buku. Indonesia makin terpuruk ketika dibandingkan negara lain, yaitu Malaysia yang produksi bukunya tahun itu sudah mencapai 8.000 judul/tahun, demikian pula Thailand. Apalagi jika dibandingkan Jepang yang sudah mencapai 36.346 judul/tahun dan Korea Selatan sebanyak 43.000/tahun.

Ada kejadian menarik terkait dengan produksi buku di Indonesia ini. Pada kesempatan HUT Ikapi ke-46 di Jakarta, tepatnya 17 Mei 1996, Ketua Umum Ikapi, Rozali Usman menyatakan bahwa selama 1994 buku-buku yang dimohonkan PPN ditanggung pemerintah sebanyak 4.000 judul. Jika jumlah itu ditambahkan dengan buku-buku yang tidak dimohonkan PPN-nya ditanggung pemerintah, dipastikan jumlahnya tidak kurang dari 5.000 judul.

Tahun 1995, PPn buku yang ditanggung pemerintah mencapai 5.942 judul. Angka itu sekali lagi di luar buku yang PPN-nya tidak ditanggung pemerintah. Karena itu, Rozali menyatakan angka produksi buku Indonesia sudah mencapai 6.500 judul per tahun.

Angka itu membuat Mendikbud Wardiman terhenyak karena baru saja tahun lalu disebutkan produksi buku Indonesia hanya 3.000 judul/tahun dan tiba-tiba meningkat 100%.

“Waktu itu saya tanya pada Ketua Umum berapa buku yang telah diterbitkan anggota Ikapi waktu lalu, saya tidak memperoleh jawaban karena tidak ada data. Tetapi, kenapa sekarang bisa muncul angka fantastis 6.500 judul?”

Dengan buku sebanyak itu, kata Menteri, kita tidak perlu lagi mengadakan Bulan Buku karena kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membaca sudah meningkat. Mendikbud dalam hal ini menyatakan agar tidak terjadi pencampuran data antara pencetakan buku sekolah dan buku umum. Minat baca lebih terkait dengan buku-buku umum. Jika data itu tercampur aduk, tidak akan diketahui seberapa tinggi angka minat baca masyarakat sesungguhnya (Setiawan, 1999).

Pelarangan Buku Masa Orde Baru

Patut dicatat pada masa Orde Baru terjadi aktivitas pelarangan buku yang masif dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dalih pelarangan buku pada masa Orde Baru ialah mengganggu ketertiban umum dan mengandung pertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945. Pelarangan buku yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menggunakan Undang-Undang No. 4/PNPS/1963.

Konteks pelarangan buku pada masa Orde Baru mengingatkan kembali beberapa kalangan dengan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda melalui peraturan sensor bacaan dan juga pemerintahan Sukarno

pada masa Demokrasi Terpimpin. Pelarangan buku pada masa Orde Baru ditindaklanjuti dengan pemusnahan buku serta pemidanaan penulis.

Yusuf, dkk. (2010) menjelaskan model pelarangan buku pada masa Orde Baru dilakukan melalui pengaduan lembaga-lembaga lain. Lalu, Kejaksaan Agung menerbitkan SK pelarangan berdasarkan pengaduan tersebut. Dari konsideran surat-surat keputusan pelarangan, memang terlihat bahwa lembaga-lembaga lain, seperti Bakin, Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional), Bais, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), dan Departemen Agama secara rutin mengirimkan pandangan mereka langsung kepada Jaksa Agung. Dalam praktiknya, posisi Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (JAM Intel), yang hampir selalu ditempati oleh perwira tinggi militer, dengan mudah berhubungan dengan semua instansi penyelenggara “ketertiban dan ketentraman umum” untuk mengumpulkan informasi tentang buku-buku “rawan”.

Kejaksaan Agung kemudian membentuk lembaga nonformal pada Oktober 1989 Clearing House yang berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung. Melalui SKNo. Kep-114/ JA/ 10/ 1989, Clearing House secara resmibekerja di bawah Jaksa Agung dan terdiri atas 19 anggota dari JAM Intel dan Subdirektorat bidang pengawasan media massa, Bakorstanas, Bakin, Bais, ABRI (kemudian menjadi BIA), Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Agama.

Selain Kejaksaan Agung, lembaga pemerintah yang juga melarang buku adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI no. 1381/1965 tentang Larangan Mempergunakan Buku-buku Pelajaran, Perpustakaan dan Kebudayaan yang Dikarang oleh Oknum-oknum dan Anggota-anggota Ormas/Orpol yang Dibekukan Sementara Waktu Kegiatannya, disertai dengan dua buah lampiran.

Lampiran pertama berisi 11 daftar buku pelajaran yang dilarang pemakaiannya, antara lain buku-buku karya Soepardo SH, Pramoedya

Ananta Toer, Utuy T. Sontani, Rivai Apin, Rukiyah, dan Panitia Penyusun Lagu Sekolah Jawatan Kebudayaan. Lampiran kedua berisi 52 buku karya penulis-penulis Lekra yang harus dibekukan seperti Sobron Aidit, Jubar Ayub, Klara Akustian/A. S. Dharta, Hr. Bandaharo, Hadi, Hadi Sumodanokusumo, Riyono Pratikto, F. L. Risakota, Rukiah, Rumambi, Bakri Siregar, Sugiati Siswadi, Sobsi, Utuy Tatang, S. Pramodya Ananta Toer, Agam Wispi, dan Zubir A. A. (Yusuf, dkk, 2010).

Pelarangan buku terkait dengan konten bermuatan pornografi juga pernah terjadi pada buku *Adik Baru*. Buku bergambar terjemahan asal Swedia (Peter, Ida, un Mimimum) tentang pendidikan seks untuk anak ini dinyatakan vulgar dan mengandung pornografi. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Midas Surya Grafindo (Misurind), diterjemahkan oleh Swanie Gunawan dengan editor ahli Conny R. Semiawan.

Jaksa Agung Sukartono Marmosudjono melarang buku tersebut. Sebelumnya Menko Polkam pada masa itu, Sudomo, sudah meminta buku itu dilarang.

Kongres Perbukuan Nasional I

Eksistensi Pusat Perbukuan (Pusbuk) makin kuat pada era 1990-an karena merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam masalah perbukuan, utamanya buku pendidikan di Indonesia. Pusbuk terus mengusung gagasan pentingnya buku dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dulu menjadi jargon populer zaman Orde Baru.

Karena itu, pada perayaan Bulan Buku Nasional 1995 yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada 2 Mei di Pontianak serta peringatan 50 Tahun Indonesia Merdeka, Pusat Perbukuan memanfaatkan momentum tersebut untuk menginisiasi penyelenggaraan Kongres Perbukuan Nasional I pada tanggal 29–31 Mei 1995 di Ball Room, Hotel Inonesia. Disebutkan bahwa kongres diselenggarakan oleh Musyawarah Masyarakat Perbukuan Indonesia

(MMPI) dan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Jimly Asshiddiqie yang saat itu menjabat sebagai staf ahli Mendikbud, ditunjuk menjadi ketua umum panitia pelaksana.

Pada masa itu dilaporkan bahwa industri perbukuan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Angka melek huruf masyarakat meningkat pesat. Demikian pula jumlah peserta didik dari SD hingga SMA meningkat drastis mengingat adanya program wajib belajar saat itu.

Berdasarkan data Ikapi tahun 1995 dilaporkan juga bahwa jumlah penerbit telah mencapai 468 penerbit anggota Ikapi dari beberapa provinsi. Jumlah terbesar adalah di DKI (231), menyusul Jabar (71), Jawa Timur (57), dan Jawa Tengah (50). Jadi, penerbit memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di luar Jawa jumlah terbesar adalah di Sumatra Utara (20). Adapun penerbit non-anggota Ikapi sebanyak 76 penerbit.

Jumlah judul buku terbit dari anggota Ikapi dilaporkan pada 1994 mencapai 4.899 judul. Jauh meningkat dari tahun 1983 yang hanya berjumlah 1.609. Kemudian, jumlah toko buku yang dilaporkan tahun 1995 dari 27 provinsi di Indonesia sebanyak 2.902.

Ada hal menarik juga diungkapkan terkait dengan organisasi penulis. Tercatat pada 1994 dilaporkan oleh Himpunan Pengarang Aksara jumlah anggota mereka sebanyak 111 orang dari berbagai provinsi di Indonesia. Jumlah terbesar berada di Jakarta 75 orang dan Bengkulu 20 orang.

Selain itu, ada juga Ikatan Pengarang Indonesia (Ipindo) yang melaporkan jumlah anggotanya pada 1994 sebanyak 103 orang dari berbagai provinsi. Jumlah terbanyak berasal dari DKI (41), Sumatra Utara (11), dan Jawa Tengah (10).

Organisasi lain yang terdata adalah Klub Perpustakaan Indonesia (KPI) yang memiliki 1.651 anggota aktif pada 1994. Anggota terbesar berada di Jawa Timur (285), DKI (251), dan Jawa Barat (251).

Kondisi perbukuan yang sedang bergairah kemudian dimanfaatkan Pusat Perbukuan untuk menggelar Kongres Perbukuan Nasional I. Walaupun demikian, terdapat sejumlah masalah perbukuan yang juga menjadi dasar diselenggarakannya Kongres Perbukuan Nasional I.

Lingkaran Masalah Perbukuan

Dalam himpunan makalah “Kongres Perbukuan Nasional I 29–31 Mei 1995 di Jakarta” disebutkan beberapa permasalahan dunia perbukuan Indonesia sebagai berikut.

- o Dilihat dari jumlah dan mutu buku yang dihasilkan setiap tahun, industri buku Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara terus-menerus meningkat.
- o Profesi penulis/pengarang, penerjemah, editor, ilustrator, perancang buku, dan pedagang/toko buku kurang berkembang.
- o Sistem perdagangan buku belum teratur dan penyebaran buku belum merata.
- o Belum terjaminnya ketersediaan sarana/bahan baku dan perdagangan buku dalam rangka menghasilkan buku yang harganya terjangkau dan merata.
- o Harga buku masih belum terjangkau oleh kebanyakan masyarakat.
- o Undang-Undang Hak Cipta belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sehingga industri perbukuan belum berjalan sebagaimana mestinya.
- o Belum mantapnya kebijakan strategis dalam pengembangan dan pembangunan industri perbukuan.
- o Belum adanya antisipasi dampak perkembangan teknologi penerbitan.
- o Minat baca yang belum merata.

Pusat Perbukuan menyadari bahwa permasalahan perbukuan tidak dapat diselesaikan secara sektoral atau sporadis, tetapi memerlukan usaha yang terintegrasi dan terarah. Analisis terhadap akar masalah perlu dilakukan secara mendasar. Selanjutnya, dapat disusun strategi secara menyeluruh dan terpadu dengan semua unsur masyarakat perbukuan, termasuk pemerintah.

Kongres Perbukuan Nasional I bertujuan merumuskan konsep dan rekomendasi kebijakan pengembangan perbukuan nasional dan merumuskan langkah-langkah operasional pengembangan perbukuan nasional. Karena itu, acara akbar ini melibatkan begitu banyak pihak, termasuk para pejabat

Kongres didukung berbagai elemen perbukuan, di antaranya Badan Pertimbangan dan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN), Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Perpustakaan Nasional, Klub Perpustakaan Indonesia (KPI), Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Gabungan Toko Buku Indonesia (Gatbi), Ikatan Editor Indonesia (Ikapindo), dan organisasi penulis/pengarang (Aksara dan Ipindo), Ikatan Ilustrator Indonesia, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), dan Persatuan Pengusaha Grafika Indonesia (PPGI). Hadir pula pejabat pemerintah, Komisi IX DPR-RI, akademisi dari perguruan tinggi, tokoh penulis/pengarang, tokoh guru, dan tokoh masyarakat.

Para menteri yang hadir memberikan pengarahan, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Penerangan, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Ketua Bappenas, dan Ketua Komisi IX DPR-RI, serta wakil-wakil organisasi perbukuan nasional.

Hadir dalam pembukaan Letjen TNI (Pur.) Ir. H. Azwar Anas selaku Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Adapun Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berhalangan hadir dan diwakili oleh pejabat lain.

Rekomendasi Hasil Kongres Perbukuan Nasional I

Setiap permasalahan dan solusinya dalam Kongres Perbukuan Nasional I dirumuskan oleh komisi-komisi yang terdiri atas Komisi Kebijakan, Komisi Kelembagaan, Komisi Sumber Daya, dan Komisi Baca Tulis. Berikut ini beberapa poin rekomendasi penting yang dihasilkan selama kongres.

1. Kongres merekomendasikan perlunya peraturan perundang-undangan di bidang industri perbukuan sebagai dasar kebijakan bagi pemecahan masalah dan kendala di bidang industri perbukuan. Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini Depdikbud dengan mengikutsertakan BPPBN dan masyarakat perbukuan perlu mulai melakukan inventarisasi bahan-bahan informasi dan permasalahan industri perbukuan, serta mulai merintis proses penyusunan materi peraturan perundang-undangan.
2. Kongres merekomendasikan desentralisasi penerbitan dan pencetakan dengan memperhatikan peningkatan jumlah dan mutu, judul, dan jenis buku yang dicetak dan diterbitkan, serta memperhatikan kemanfaatannya bagi masyarakat. Para penerbit dan pencetak juga perlu mempersiapkan diri menyangkut sumber daya manusia, sarana/ peralatan maupun kelembagaannya.
3. Kongres merekomendasikan standardisasi harga buku untuk menciptakan efisiensi dan upaya meningkatkan minat baca dan gairah tulis masyarakat.
4. Kongres merekomendasikan dikembangkannya sistem informasi buku nasional dan dibangunnya pusat-pusat informasi buku dengan cara mendayagunakan Perpustakaan Daerah yang ada serta didirikannya toko buku di setiap ibu kota provinsi dan kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mendukung pemasyarakatan buku yang telah dan akan diterbitkan.

5. Kongres merekomendasikan perlindungan dan penghargaan terhadap pelaku industri perbukuan dalam menjalankan profesinya, yaitu penulis/pengarang, penerjemah, ilustrator, dan editor.
6. Kongres merekomendasikan perlunya riset/penelitian terpadu secara nasional dan menyeluruh oleh pemerintah dan swasta untuk mengetahui keadaan sesungguhnya tentang berbagai keluhan dan kendala di dalam industri perbukuan.
7. Kongres merekomendasikan dileburnya BPPBN dan Pusat Perbukuan sehingga ditingkatkan menjadi Badan Perbukuan Nasional atau Direktorat Jenderal Perbukuan Nasional dalam struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Kongres merekomendasikan didirikannya segera perguruan tinggi perbukuan dan meningkatkan penyelenggaraan pelatihan, kursus, pembentukan sanggar, dan pemagangan di bidang perbukuan.
9. Kongres merekomendasikan kerja sama dengan pihak luar negeri dalam penyiapan SDM perbukuan sehingga beasiswa dari luar negeri juga mencakup bidang industri perbukuan.
10. Kongres merekomendasikan pemberdayaan keluarga/orangtua, lembaga pendidikan formal maupun nonformal, perpustakaan, kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk memasyarakatkan minat dan gemar baca-tulis. Hal tersebut juga didukung dengan penyediaan sarana bahan bacaan dan pemanfaatan teknologi maju dalam era globalisasi.

Sebagai tindak lanjut, Kongres mengusulkan agar Pemerintah, dalam hal ini Mendikbud untuk membentuk Tim Khusus yang anggotanya terdiri atas unsur instansi pemerintah yang terkait dan masyarakat industri perbukuan, guna menindaklanjuti hasil Kongres Perbukuan Nasional I Tahun 1995 secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat perbukuan dan pemerintah juga disarankan untuk menyelenggarakan lokakarya secara berkala minimal satu kali dalam setahun untuk

mengetahui sampai sejauh mana hasil Kongres Perbukuan Nasional I dilaksanakan.

Pada tanggal 31 Mei 1995 sebagai akhir kongres, dibentuklah Perhimpunan Masyarakat Gemar Membaca (PMGM). Anggota dan pendiri PMGM terdiri atas pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat perbukuan, kalangan intelektual dan budayawan, serta unsur-unsur masyarakat. Bertindak sebagai pelindung adalah Soeharto, Presiden Republik Indonesia.

PMGM sempat menunjukkan kiprah aktifnya selama dua tahun sejak berdiri di antaranya kegiatan pemilihan Putri dan Pangeran Buku tahun 1996 dan 1997. Piala yang diberikan bernama Lontar Nugraha langsung dari Kepala Negara. Adapun rencana pembentukan klub buku (*book club*) dan voucher buku yang sudah direncanakan tidak kunjung dilaksanakan.

Dunia Perbukuan dan Krisis 1998

Indonesia menyusul negara-negara lainnya di Asia, terjerumus pada krisis ekonomi dan moneter Juli tahun 1997. Dalam waktu singkat, nilai tukar rupiah terhadap dolar melonjak drastis yang memicu kenaikan harga dan kenaikan utang impor. Begitu pula kenaikan kertas yang drastis berimbas pada dunia perbukuan. Sebagai ilustrasi, harga kertas koran sebelum krisis Rp2.350,00 per kilogram melonjak 250% menjadi Rp6.000 per kilogram (Setiawan, 2000).

Kompas (12 Januari 1998) melaporkan juga bahwa krisis moneter turut melambungkan harga kertas. Kondisi itu dikeluhkan kalangan penerbit surat kabar, majalah, dan buku, hingga para pelajar dan mahasiswa. Harga kertas HVS di Jakarta naik hampir 100% dan di Yogyakarta sampai 300%.

Kondisi ini menyebabkan banyak penerbit menghentikan produksi bukunya, bahkan mem-PHK karyawan. Beberapa pencetak terpaksa menjual mesin cetaknya.

Data yang dihimpun Setiawan (2000) hingga September 1998, sekira 70% penerbit di Jawa Barat hampir menutup usahanya. Di Jawa Timur sekira 57 dari 64 (sekira 90%) penerbit anggota Ikapi menutup usahanya. Total sejak September 1997 hingga Februari 1998, tercatat 90% penerbit buku di Indonesia terpaksa menghentikan produksinya. Sebagian besar gulung tikar.

Tiga dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada dunia perbukuan menurut Rozali Usman (Ketua Ikapi 1993–1998) sebagai berikut. Pertama, 200 hingga 480 penerbit anggota Ikapi menghentikan kegiatannya. Kedua, terjadi gelombang rasionalisasi karyawan. Sebagian besar editor sudah dirumahkan, di samping karyawan lainnya. Ketiga, penerbit yang memutuskan cetak ulang buku terbitannya terpaksa menaikkan harga sekira 30% (Bisnis Indonesia, 12 Februari 1998).

Usulan Ikapi untuk mengatasi persoalan ini salah satunya agar pemerintah menghapuskan segala jenis pajak yang berkaitan dengan pencetakan dan penerbitan buku. Bahkan, Rozali mengatakan cara ini merupakan satu-satunya solusi menghadapi krisis.

Kalangan industri media kemudian menyelenggarakan sarasehan bertajuk “Dampak Krisis Moneter terhadap Dunia Penerbitan” yang diadakan Badan Pelaksana Gerakan Wakaf Buku dan Pengembangan Masyarakat ICMI di Jakarta, 23 April 1998. Pemimpin Umum *Republika*, Parni Hadi, menyampaikan dunia penerbitan sangat menanti keputusan pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan penerbitan. Parni meminta pemerintah menggelontorkan kredit untuk dunia usaha penerbitan demi menyelamatkan perusahaan-perusahaan tersebut dari kebangkrutan (*Kompas*, 24 April 1998).

Penghargaan dan Program “Darurat” di Tengah Krisis

Patut ditorehkan di sini langkah Ikapi mendirikan Yayasan Adikarya Ikapi pada tahun 1998. Yayasan ini didirikan demi mendorong penulis dan penerbit tetap berkarya menghasilkan buku-buku bermutu. Yayasan Adikarya Ikapi didirikan dengan akta notaris Diah Anggraini, S.H. No. 19 tanggal 20 April 1998. Ada dua program yang dilaksanakan: (1) memberikan penghargaan Adikarya Ikapi untuk buku-buku anak terbaik; (2) melahirkan Program Pustaka.

Penghargaan Adikarya Ikapi telah dimulai sejak tahun 1997 dengan mengutamakan buku bacaan anak-anak yang terbit tahun 1996. Program ini direncanakan berlangsung setiap tahun. Lalu, diselenggarakan pula Program Pustaka yang disokong oleh The Ford Foundation. Yayasan menyediakan dana US\$ 400 ribu untuk menyubsidi penerbitan hingga 80% dari total biaya produksi.

Program Pustaka disebut sebagai “program darurat” guna menyubsidi produksi buku-buku bermutu hasil karya penulis Indonesia atau karya terjemahan. Program Pustaka diselenggarakan hanya satu tahun untuk menyubsidi buku-buku ilmiah atau ilmiah populer di bidang humaniora, seperti antropologi, kesenian, sastra, sejarah, sosial politik, HAM, ilmu kesehatan masyarakat dan kependudukan, sosiologi, kajian wanita, pedagogi, filsafat, serta ilmu komunikasi dan lingkungan.

Ditunjuk sebagai koordinator program ini adalah Alfons Taryadi. Selanjutnya, Program Pustaka membentuk Tim Penilai Naskah (TPN) dari kalangan akademisi dan profesional yang tidak terkait dengan usaha penerbitan buku (*Media Indonesia*, 1 September 1998).

No Tax on Knowledge

Kalangan industri perbukuan yang diwakili oleh Ikapi gencar menyuarakan penghapusan PPn 10% terhadap buku. Pada saat kepemimpinan Rozali Usman, Ikapi terus menyuarakan penghapusan pajak buku yang dibebankan ke penerbit, baik di forum nasional maupun internasional. Menurut Rozali, pajak buku hanya menyebabkan iklim tidak kondusif bagi perkembangan dunia perbukuan di Indonesia.

Pasca lengsernya Soeharto, Ikapi mengengcarkan kembali penghapusan pajak buku. Di dalam Kongres Ikapi XIV September 1998, di hadapan Presiden B. J. Habibie, Ketua Ikapi mempersoalkan masih adanya beban pajak atas penerbitan buku. Presiden Habibie langsung merespons.

“Saya sudah dipanggil oleh Dirjen Pajak untuk menindaklanjuti niat baik pemerintah. Saya berharap pengurus baru Ikapi dapat melanjutkan upaya itu. Sebab SIUPP penerbitan pers saja sekarang ini sudah bebas didapatkan. Pajak buku juga sebetulnya bisa dibebaskan kalau kita sungguh-sungguh menghendakinya,” ujar Rozali (Setiawan, 2000).



BAB 3

PERBUKUAN INDONESIA BARU (1999–Sekarang)

Langsungnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun membawa banyak perubahan pada Indonesia, terutama dunia perbukuan. Dunia perbukuan yang diwakili oleh Ikapi berbenah dengan mengusung konsep Reformasi Perbukuan Nasional yang bebas KKN disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Ikapi, Pengurus Pusat, dan Pengurus Cabang di Hotel Bintang Griyawisata, Jakarta, pada tanggal 4–5 Juni 1998. Ikapi menyoroti beberapa pokok pikiran perbukuan, yaitu kebijakan perbukuan, ekonomi perbukuan, hukum perbukuan, dan budaya baca.

Kebijakan perbukuan mencakup persoalan penghapusan KKN dalam pengadaan buku teks (pelajaran). Ikapi juga meminta fungsi Pusat Perbukuan dioptimalkan dan Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional ditingkatkan menjadi Dewan Buku Nasional.

Ekonomi perbukuan mencakup deregulasi Keppres No. 2/1990 tentang PPN atas penyerahan semua jenis buku produksi dalam negeri ditanggung oleh pemerintah, tanpa kecuali lagi. Begitu pula PPh untuk penulis diturunkan menjadi 0% dan bersifat final. Selain itu, perlu adanya produksi kertas khusus buku dan PPN-nya ditanggung oleh pemerintah.

Hukum perbukuan mencakup penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku pembajakan buku. Hal yang termasuk ranah ini juga tentang dihentikannya pelarangan buku, kecuali buku yang jelas-jelas mengandung pornografi dan bertentangan dengan Pancasila. Ikapi pun mendorong perlunya kajian menuju disusunnya Undang-Undang Perbukuan Nasional.

Budaya baca menurut Ikapi memerlukan adanya pelembagaan untuk meningkatkan minat baca. Sarana perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan daerah serta desa perlu ditingkatkan.

Indonesia baru merupakan harapan baru ketika Indonesia mengalami pergantian kepemimpinan justru menjelang berakhirnya milenium kedua. Dunia perbukuan Indonesia juga berhadapan dengan perkembangan teknologi baru, seperti munculnya teknologi mesin cetak *print on demand* (cetak manasuka), teknologi mesin pracetak dan cetak berbasis komputer (*computer to plate/CTP*), teknologi internet, dan buku elektronik.

Perbukuan pada Masa Awal Reformasi

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia memang menorehkan sejarah baru di banyak bidang. Di bidang perbukuan, patut dicatat sejarah ketika untuk kali pertama Kongres Ikapi dibuka langsung oleh presiden. Kongres Ikapi XIV diselenggarakan di Hotel Indonesia, 21–23 September 1998. Kongres ini dibuka oleh Presiden B. J. Habibie di Istana Negara.

Pada kongres ini, Arselan Harahap (Direktur Utama Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia) terpilih sebagai ketua umum Ikapi.

Perbukuan Indonesia pada masa itu masih menghadapi tantangan pemulihan krisis ekonomi dan moneter, globalisasi, dan perkembangan teknologi dari analog ke digital. Ikapi mencoba merumuskan kembali visi dan misinya sebagai asosiasi profesi perbukuan dengan paradigma baru, yakni menciptakan kemandirian dalam memajukan perbukuan Indonesia.

Penerbitan Buku pada Masa Krisis Moneter

Dampak utama krisis ekonomi dan moneter ialah melonjaknya harga kertas yang memicu peningkatan harga buku. Situasi yang hampir mirip dengan tahun 1965 ini menyebabkan masyarakat lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok daripada buku.

Lahirnya Dewan Buku Nasional

Tumbangnya Orde Baru menjadi jalan para penerbit yang dimotori Ikapi untuk mendorong Reformasi Perbukuan Nasional. Pada masa itu, Ikapi memilih ketua umum barunya, yaitu Drs. Arselan Harahap yang dikenal sebagai Direktur Penerbit LP3ES. Arselan kembali mengemukakan perlunya swastanisasi total buku pelajaran. Penerbitan buku pelajaran (buku teks) yang selama ini dilakukan pemerintah dinilai kurang mempercepat perkembangan usaha perbukuan nasional.

Biarkan mekanisme pasar yang berlaku adalah salah satu alasan Ikapi mendorong swatanisasi buku pelajaran secara total mulai TK, SD, SMP, hingga SMA. Sekolahlah yang diberi kewenangan memilih buku mana yang terbaik untuk mereka gunakan. Dengan demikian, penerbit akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu yang terbaik agar terpilih sebagai buku pelajaran utama.

Usul ini tidak sepenuhnya dapat diterima karena tidak ada jaminan sekolah aman dari praktik kolusi dengan penerbit. Selain

itu, mekanisme pasar justru akan mematikan penerbit-penerbit kecil, termasuk penerbit-penerbit di daerah karena penerbit besar dapat saja mendirikan “penerbit satelit” di daerah.

Walaupun demikian, konsep Reformasi Perbukuan Nasional yang disodorkan Ikapi direspons dengan disetujuinya pembentukan Dewan Buku Nasional (DBN) oleh Presiden B. J. Habibie saat membuka Kongres XIV Ikapi, September 1998 di Istana Negara. Ketua Umum Ikapi, Arselan Harahap, kemudian diundang ke kantor BPPBN untuk menyusun konsep DBN, terutama tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Setahun kemudian, keluar Keppres No. 110/1999 tentang Dewan Buku Nasional, yang mulai berlaku tanggal 13 September 1999. Keppres tersebut terdiri atas empat bab dan sepuluh pasal yang sekaligus menggantikan Keppres No. 5/1978 tentang BPPBN yang dinyatakan tidak berlaku lagi. DBN diposisikan sebagai badan pemerintah nonstruktural yang tugasnya membantu pemerintah dalam hal ini Presiden, untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam pengembangan perbukuan, minat dan kegemaran baca tulis masyarakat, serta kemampuan SDM perbukuan.

Fungsi yang diemban DBN, yaitu merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan (1) industri dan distribusi buku; (2) minat dan kegemaran baca tulis masyarakat; (3) kemampuan SDM perbukuan; (4) pengumpulan dan pengkajian data dan informasi di bidang perbukuan; (5) kerja sama luar negeri di bidang perbukuan; dan (6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbukuan.

DBN langsung diketuai oleh Presiden dan yang menjadi Wakil Ketua adalah Mendikbud. DBN beranggotakan para Menteri, Gubernur BI, dan wakil dari sejumlah asosiasi perbukuan. Tugas yang sedemikian banyak serta diemban oleh pejabat negara membuat DBN menetapkan Pelaksana Harian. Ketua Harian dijabat oleh Mendikbud, dengan dua wakil ketua, yang dijabat masing-masing oleh Kepala Balitbang Pendidikan dan Kebudayaan dan wakil dari asosiasi. Selain itu,

dibentuk pula Kelompok Kerja (pokja) sebagai bagian dari Pelaksana Harian untuk menyelesaikan tugas tertentu dari Ketua Harian.

Sejak keluarnya Keppres, perlu waktu lama dilakukannya pelantikan Pengurus DBN. Boleh dikatakan DBN menjadi sebuah organisasi perbukuan yang sangat ideal melibatkan lintas kementerian, lembaga negara, dan asosiasi perbukuan. Ada harapan DBN dapat menjadi solusi atas segala permasalahan perbukuan di Tanah Air karena dipimpin langsung oleh Presiden.

Namun, dalam perjalanan waktu seiring dengan pergantian presiden dari B. J. Habibie kepada Abdurrahman Wahid lalu Megawati, peran DBN tidak tampak. Sampai kemudian pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY, DBN termasuk lembaga yang dibubarkan karena dianggap tidak efektif lagi.

Lahirnya Badan Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk mengawal pelaksanaan Standar Pendidikan Nasional dibentuklah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Badan ini diposisikan sebagai lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, badan ini ditempatkan sebagai lembaga nonstruktural. Dasar hukum pembentukan BSNP adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. BSNP terbentuk dan bekerja sejak Mei 2005.

PP Nomor 19 Tahun 2005 juga secara resmi memberi tugas kepada BSNP untuk menilai kelayakan buku pelajaran dari segi isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan. Hal ini juga diperkuat dengan Permendikbud No. 96/2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan.

BSNP bertugas menilai buku teks pelajaran. Dengan demikian, secara tidak langsung tugas dan fungsi Pusat Perbukuan yang berlangsung sejak tahun 1980 dalam penilaian buku teks atau buku pelajaran telah beralih ke BSNP.

Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005, Mendiknas Bambang Soedibyo mengeluarkan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. Permendiknas ini menandai terjadinya banyak perubahan kebijakan terkait buku pendidikan. Tiga aspek yang berpengaruh pada dunia perbukuan, yaitu (1) kebijakan pembelian hak cipta buku teks agar buku menjadi lebih murah karena meniadakan komponen royalti; (2) orang perseorangan diperkenankan menggandakan buku dan menjualnya secara bebas dengan harga eceran tertinggi (HET); (3) masa pakai buku ditetapkan selama lima tahun.

Perbukuan setelah Satu Dekade Reformasi

Satu dekade reformasi masih menyisakan beberapa persoalan dalam dunia perbukuan. Desakan untuk melahirkan undang-undang tentang perbukuan menguat karena lingkaran permasalahan industri perbukuan sejak diungkapkan dalam Kongres Perbukuan I 1995 belum juga terurai dan melahirkan solusi berarti.

Lembaga perbukuan seperti Pusat Perbukuan sampai satu dekade reformasi mengalami perubahan organisasi sehingga perannya dalam kebijakan perbukuan tidak sekukuh sebelum reformasi. Pusat Perbukuan bahkan kemudian digabung dengan Pusat Kurikulum.

Penggabungan Pusat Kurikulum dan Pusat Perbukuan

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kali kedua juga berdampak pada Kemendiknas. Mendiknas Mohammad Nuh kemudian mengeluarkan Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 22 Desember 2010. Permendiknas itu menjadi dasar digabungnya Pusat Kurikulum dan Pusat Perbukuan dengan nama baru Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk).

Setelah menyatu, tugas Puskurbuk adalah “melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (Pasal 586). Dalam melaksanakan tugas itu, Puskurbuk menyelenggarakan fungsi, yaitu

1. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, perbukuan, dan sumber belajar lainnya;
2. pengembangan model kurikulum dan metodologi pembelajaran;
3. pengembangan materi buku pelajaran dan sumber pembelajaran lainnya;
4. pengelolaan informasi kurikulum dan materi buku pelajaran serta sumber pembelajaran lainnya;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, perbukuan, dan sumber pembelajaran lainnya;
6. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, perbukuan, dan sumber belajar lainnya;
7. penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, perbukuan, dan sumber pembelajaran lainnya; dan
8. pelaksanaan administrasi Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi tersebut maka entitas perbukuan menjadi fokus kecil di lingkungan Kemendiknas karena dianggap dapat diefisienkan pekerjaannya dengan pengembangan kurikulum. Alhasil, dalam struktur organisasinya juga terlihat penggabungan itu, yaitu (1) Kepala Bidang Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Nonformal, dan Informal; (2) Kepala Bidang Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Dasar; dan (3) Kepala Bidang Kurikulum dan Perbukuan Pendidikan Menengah.

Walaupun demikian, tugas-tugas yang berhubungan dengan perbukuan di luar penilaian masih intens dilakukan, yaitu penyelenggaraan sayembara penulisan naskah. Naskah-naskah buku pemenang sayembara kemudian diolah sehingga dapat dimanfaatkan dan digandakan sebagai bahan bacaan siswa. Pengolahan naskah dilakukan hingga pada tahap naskah siap cetak/CRC (*camera ready copy*).

Selain itu, kegiatan lain adalah pengolahan naskah buku hasil pembelian/pengalihan hak cipta. Ruang lingkup kegiatan ini adalah mengolah *soft copy* buku sehingga siap diunggah ke jaringan internet melalui situs Jardiknas Kemendikbud sebagai Buku Sekolah Elektronik (BSE). Pada tahun anggaran 2012, *soft copy* buku yang diolah sebanyak 302 buku untuk jenjang sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/MA/MAK.

Puskurbuk juga masih meneruskan program pembelian/pengalihan hak cipta buku teks pelajaran. Buku-buku yang dibeli/dialihkan hak ciptanya adalah buku-buku yang sudah dinyatakan layak penggunaannya di sekolah-sekolah oleh Mendiknas melalui penilaian buku yang dilakukan oleh BSNP. Pada tahun anggaran 2012, Puskurbuk menargetkan pembelian/pengalihan hak cipta buku teks pelajaran sebanyak 50 judul, terdiri atas buku pelajaran kejuruan, agama, keterampilan, dan bahasa asing.

Lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan

Sejarah mencatat beberapa ide perlunya sebuah undang-undang yang mengatur perbukuan digelontorkan. Pertama, Ketua Ikapi, Ajip Rosidi, pada tanggal 19 September 1975 di depan anggota DPR menyatakan perlunya Indonesia memiliki “Undang-Undang Buku”. Ajip membandingkan dunia buku dengan dunia pers yang telah lebih dulu memiliki Undang-Undang Pers. Ajip pada masa itu membandingkan dengan Argentina yang telah memiliki Undang-Undang Buku.

Kedua, perlunya undang-undang yang mengatur perbukuan juga dicetuskan di dalam Kongres Perbukuan Nasional I yang diinisiasi oleh Pusat Perbukuan pada tahun 1995. Namun, seiring bergulirnya waktu hingga terjadi reformasi, undang-undang tentang buku itu tidak pernah terwujud.

Sampai kemudian, dalam rapat paripurna tanggal 3 Juli 2014, DPR-RI bersepakat mengajukan RUU Sistem Perbukuan Nasional sebagai inisiatif DPR. Ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU pada masa itu adalah Utut Adianto dari Fraksi PDIP, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR-RI. Namun, kemudian ketua Panja RUU Sistem Perbukuan Nasional diserahkan kepada Sutan Adil Hendra dari Fraksi Gerindra pada tahun 2016.

Pembahasan RUU Sistem Perbukuan dilakukan lebih intens sejak Agustus 2016 hingga kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 27 April 2017. Pada tanggal 29 Mei 2017, Undang-Undang Sistem Perbukuan resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Undang-Undang tersebut diberi nama resmi Undang-Undang RI tentang Sistem Perbukuan yang memuat 14 bab dan 72 pasal.

Lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan merupakan hasil pergulatan pemikiran dari para anggota DPR-RI Komisi X, Pemerintah yang dimotori oleh Kemendikbud dan beberapa

kementerian terkait (Kementerian Agama, Kementerian Ristek Dikti, Kemenpan RB, Kementerian Sekretariat Negara), serta dukungan tim ahli. Di dalam masyarakat perbukuan sendiri juga terdapat pro dan kontra menyambut terbitnya UU tentang Sistem Perbukuan tersebut.

Mereka yang pro merasa bahwa Negara harus hadir dalam praktik-praktik perbukuan dan industri perbukuan yang merupakan tulang punggung bagi pencerdasan bangsa. Hampir semua negara maju tidak mengabaikan pembangunan perbukuan dalam masyarakatnya. Sebuah adagium menyebutkan bahwa “kedekatan masyarakat suatu bangsa terhadap buku berbanding lurus dengan kemajuan masyarakat tersebut”.

Mereka yang kontra merasa urusan buku termasuk ke dalam urusan kebebasan berekspresi sehingga Negara tidak perlu mengatur-atur soal buku. Jika pun ada yang harus diatur, itu adalah buku pendidikan.

Terbentuknya Lembaga Perbukuan

Pembahasan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan memunculkan gagasan tentang perlunya lembaga perbukuan yang independen. Di dalam RUU Sistem Perbukuan sempat termuat kembali wacana Dewan Perbukuan Nasional. Bahkan, sempat tercetus gagasan agar pimpinan dan anggota Dewan Perbukuan ditunjuk melalui *fit and proper test* oleh DPR.

Keinginan DPR untuk membentuk lembaga baru yang dipimpin setingkat menteri terganjal instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Presiden Joko Widodo menghentikan pembentukan lembaga baru non-struktural.

Berdasarkan kesepakatan akhirnya pasal tentang Dewan Perbukuan diubah menjadi akan dibentuknya lembaga perbukuan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, DPR

mengusulkan bahwa lembaga tersebut harus dipimpin pejabat setingkat eselon I.

Bagaimana pun DPR menganggap penting adanya suatu lembaga yang mengurus perkara perbukuan secara komprehensif dan mengawal terlaksananya sistem perbukuan secara nasional. Selain itu, para pelaku perbukuan dan masyarakat juga harus memiliki tempat yang pasti untuk bertanya atau mengonfirmasikan masalah terkait perbukuan yang merupakan salah satu fondasi untuk mencerdaskan bangsa dan mempersiapkan masyarakat andal berbasis pengetahuan.

Pemerintah kemudian diminta oleh DPR untuk memberikan simulasi terkait pengelolaan dan penanganan sistem perbukuan, termasuk terkait muncul buku-buku berkonten tidak patut yang kerap terjadi di masyarakat. Untuk itu, Kemendikbud melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berusaha mengkaji pembentukan lembaga perbukuan ini. Salah satu opsi yang dimunculkan adalah menggabungkan Pusat Perbukuan ke dalam tubuh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Lahirnya Gerakan Literasi

Stigma daya literasi yang rendah, terutama berdasarkan fakta survei internasional mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merancang sebuah program penguatan daya literasi. Mulai tahun 2016, Kemdikbud RI mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Kemdikbud membentuk kelompok kerja Gerakan Literasi Nasional untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan literasi yang dikelola unit-unit kerja terkait.

Secara parsial upaya penumbuhan daya literasi telah dilakukan, seperti Gerakan Literasi Masyarakat yang dikembangkan Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD Dikmas), sebagai tindak lanjut dari program pemberantasan buta aksara yang mendapatkan penghargaan UNESCO pada tahun 2012 (angka melek aksara sebesar 96,51%). Sejak tahun 2015 Ditjen PAUD Dikmas juga menggerakkan literasi keluarga dalam rangka pemberdayaan keluarga meningkatkan minat baca anak.

Bersamaan dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah untuk meningkatkan daya baca siswa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kemudian berinisiatif mengadakan sayembara penulisan buku bacaan literasi sebagai buku-buku pendukung bagi siswa yang berbasis pada kearifan lokal. Tahun 2017 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menggagas Gerakan Satu Guru Satu Buku untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam pembelajaran baca dan tulis.

Pada tahun 2017 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diberi amanah menjadi Koordinator GLN. Beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain penajaman konsep GLN, Diskusi Kelompok Terpumpun dengan pakar dan pegiat literasi, lokakarya penyusunan peta jalan, panduan, dan materi pendukung GLN, Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Kementerian/Lembaga, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan lintas unit utama, dan persiapan pencanangan GLN yang akan digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2017 di Plasa Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 15. Mendikbud Muhadjir Effendi dalam perayaan Hari Buku Sedunia (GLN/Kemdikbud)

Buku Indonesia di Panggung Dunia

Upaya membawa buku Indonesia mampu menarik perhatian internasional telah dilakukan sejak era Orde Baru melalui penerjemahan karya buku penulis Indonesia dan keikutsertaan dalam pameran buku internasional, seperti Frankfurt Book Fair. Salah satu ide besar ialah menempatkan Indonesia sebagai *guest of honor* (tamuhormatan) pada ajang pameran buku internasional terbesar dan tertua sejangat, Frankfurt Book Fair. Ide itu terwujud pada akhir tahun 2015.

Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia akhirnya ditetapkan sebagai tamuhormatan setelah melewati negosiasi yang panjang selama dua tahun. Pada tanggal 4 Juni 2015, Mendikbud Anies Baswedan berkunjung ke Istana Negara bersama 17

jurnalis asal Jerman menemui Presiden Joko Widodo. Mereka adalah jurnalis yang datang secara khusus untuk menulis tentang Indonesia. Selain Anies, mereka juga ditemani Ketua Komite Nasional FBF Fair Goenawan Muhammad dan budayawan Slamet Rahardjo.

Frankfurt Book Fair 2015 diselenggarakan pada tanggal 14–18 Oktober 2015. Indonesia memboyong sekira 270 judul buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa asing lainnya dari hasil kurasi terhadap 2.000 judul buku yang didaftarkan. Perhelatan ini menghabiskan dana 10 juta euro atau setara dengan Rp146 M.

Indonesia mengusung tema *17.000 Islands of Imagination* dalam FBF tahun ini. Stan utama seluas lebih dari 2.000 meter persegi disulap menjadi tujuh pulau besar yang merepresentasikan Indonesia, mulai dunia perbukuan, dongeng anak, naskah kuno maupun teknologi digital, hiburan musik maupun film, sampai rempah makanan.

Setelah Frankfurt Book Fair 2015, tiga tahun berselang, Indonesia menjadi Market Focus Country di ajang bergengsi London Book Fair 2019, tepatnya tanggal 12–14 Maret 2019 di Olympia, Kensington, London. Paviliun Indonesia akan hadir di pameran buku terbesar kedua di dunia itu dengan kembali mengusung tema *17,000 Islands of Imagination*.

Perwakilan pemerintah Indonesia menampilkan 450 judul buku di pameran buku yang sudah digelar sejak tahun 1971 itu. Penyelenggaraan pameran ini merupakan sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Ekonomi Kreatif.

Ketika Tiga Lembaga Mengurusi Perbukuan

Ada masa-masa ketika terdapat tiga lembaga di bawah pemerintah yang mengurus perbukuan. Pertama, Pusat Kurikulum dan Perbukuan di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud. Kedua, Badan Ekonomi Kreatif yang dibentuk dengan Perpres Nomor 6 Tahun 2015. Ketiga, Komite Buku Nasional (KBN) yang dibentuk pada tahun 2016 setelah Indonesia menjadi tamu kehormatan dalam perhelatan Frankfurt Book Fair 2015. KBN berada di bawah Sekretaris Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dipimpin oleh Laura Bangun Prinsloo.

Peran dua lembaga terakhir menyurut pada tahun 2019. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sebagai lembaga di luar kementerian tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dilebur ke dalam Kementerian Pariwisata. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengubah Kementerian Pariwisata pada Kabinet Kerja menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2020. Bersamaan itu terdapat juga Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Demikian pula KBN yang dibentuk di bawah Sekretaris Kemdikbud dibubarkan pada akhir tahun 2019 setelah berdiri sejak 2016. KBN awalnya berfungsi mempromosikan buku-buku nasional ke panggung internasional melalui berbagai program, di antaranya keikutsertaan dalam pameran buku internasional, residensi penulis, dan insentif penerjemahan.

Pembubaran KBN oleh Kemdikbudristek terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Kedua regulasi ini menegaskan adanya satu lembaga yang mengurus perbukuan. Sampai saat ini lembaga resmi yang ditunjuk

oleh pemerintah adalah Pusat Perbukuan di bawah naungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemdikbudristek.

Tantangan Pembajakan Buku

Sisi ekonomi industri perbukuan nasional diperparah dengan pelanggaran hak cipta berupa pembajakan buku laris oleh oknum-oknum untuk tujuan komersial. Negara belum sepenuhnya dapat melindungi para pelaku perbukuan dari pelanggaran hak cipta meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pembajakan buku semakin masif ketika para pembajak juga memanfaatkan teknologi dan lokapasar (*market place*) untuk menjual buku bajakan. Pembajakan buku secara tradisional juga masih terjadi pada buku perguruan tinggi ketika lapak-lapak fotokopi menyediakan layanan memfotokopi satu buku utuh atau bagian-bagian buku bagi mahasiswa. Pada 2019, Ikapi menerima laporan tentang pelanggaran hak cipta dari 11 penerbit dengan potensi kerugian mencapai angka Rp116,050 miliar. Tentu angka ini lebih besar lagi jika semua kasus pembajakan buku dilaporkan.

Pembajakan jenis lain adalah peniruan dan penjiplakan isi buku yang mirip lebih dari 50% dilakukan oleh para penulis dan penerbit pembajak pada buku-buku yang sukses di pasar. Pembajakan jenis ini juga menunjukkan perilaku berbahaya bagi ekosistem perbukuan nasional.

Berita Baik Pajak Perbukuan

Jika sebelumnya persoalan pajak perbukuan banyak diungkit oleh Ikapi mewakili industri perbukuan, suara lantang pada tahun 2017 datang dari para penulis. Dunia perbukuan dihebohkan oleh protes keras dari penulis buku laris, Tere Liye, terhadap pajak penghasilan kepada penulis (*Kompas*, 2017). Demikian pula protes dilancarkan oleh Dewi “Dee” Lestari (*Kontan*, 2017). Tingginya pajak dianggap sebagai penghalang kreativitas bagi para penulis.

Melalui studi pajak perbukuan, para peneliti dari LIPI, Sambodo, dkk. (2018) menyampaikan hasil penelitiannya bahwa pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada pelaku perbukuan. PPN yang diterima dari buku termasuk kecil dan kurang signifikan, seperti tahun 2016 PPN dalam negeri untuk klasifikasi penerbitan buku (KLU 58110) mencapai sebesar Rp7,8 miliar dan PPN hingga Agustus 2017 mencapai Rp6,9 M.

Perbukuan Indonesia berdasarkan kajian dari Badan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu industri kreatif telah menyumbang 6% dari total produksi bidang ekonomi kreatif atau masuk ke dalam lima besar penyumbang setelah kuliner, *fashion*, kriya, serta televisi dan radio (Bekraf & BPS, 2017). Rata-rata nilai ekspor industri perbukuan baru sekira USD 22.235 (Rp302.000.000) atau 0,12% dari total ekspor ekonomi kreatif. Industri penerbitan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2,89% (sekira 460 ribu orang) dari total tenaga kerja di industri kreatif.

Ada angin segar terjadi pada tahun 2020. Pemerintah akhirnya menghapuskan PPN untuk semua jenis buku melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

EPILOG

MEMINTAL KEMBALI BUDAYA BUKU INDONESIA

*P*otret perbukuan nasional kini adalah cermin wajah ekosistem perbukuan di Indonesia. Ekosistem perbukuan sebagaimana dirumuskan pada penjelasan Pasal 2, ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan adalah “tempat tumbuh dan berkembangnya Sistem Perbukuan yang sehat untuk menghasilkan Buku bermutu, murah, dan merata yang ditandai dengan interaksi positif antarpemangku kepentingan perbukuan”.

Interaksi positif antarpemangku kepentingan perbukuan ditengarai belum optimal terjadi. Saat ini tidak semua pelaku perbukuan dari sepuluh yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan memiliki asosiasi profesi. Di antara asosiasi yang tidak memiliki asosiasi khusus bidang perbukuan, yaitu ilustrator, desainer, dan pengembang buku elektronik. Adapun pelaku perbukuan yang telah memiliki asosiasi, yaitu penulis, penerjemah/penyadur, editor, penerbit, pencetak, dan toko buku.

Salah satu pelaku perbukuan yang sangat penting adalah penerbit. Para penerbit kini tergabung di Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) yang telah berdiri sejak tahun 1950. Adapun penerbit perguruan tinggi bergabung di Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) yang berdiri sejak tahun 2010.

Merujuk data yang dirilis oleh Ikapi bahwa dari jumlah anggota sekira 1.800 penerbit, sebagian besar adalah UMKM. Sekira 42,3% (760) penerbit memproduksi buku kurang dari 50 judul per tahun, 16,5% (297) penerbit memproduksi 51–100 judul, dan hanya 1% (180) penerbit yang mampu menerbitkan buku di atas 200 judul per tahun ((Ikapi, 2020).

Minimnya produktivitas penerbit dalam satu dekade terakhir berbanding lurus dengan data penjualan buku di dalam negeri yang juga mengkhawatirkan. Pada tahun 2010, angka pertumbuhan penjualan di jejaring toko buku terbesar di Indonesia masih dapat mencapai di atas 28%, namun setelah itu kemerosotan terjadi secara konsisten dan pada tahun 2017 mencapai titik terendah dengan -0,48%. Pada periode tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan masing-masing 7,38% dan 4,2%, namun setelah itu hingga akhir tahun 2020, tak pernah kembali ke angka pertumbuhan seperti tahun 2010-an.

Kondisi tersebut lebih diperparah dengan adanya wabah pandemi COVID-19 tahun 2020. Dalam kondisi pandemi, kuartal pertama tercatat pertumbuhan penjualan buku -17,27% dan lebih parah pada kuartal kedua dengan -72,40%.

Data Ikapi merupakan data perbukuan secara industri yang dapat ditinjau dari produksi judul buku dan angka pendapatan di toko buku. Secara nasional, data produksi judul buku dapat ditilik dari pengajuan ISBN (International Standard Book Number) di Perpustakaan Nasional RI. Data ini sangat kontras dengan data industri.

Pada tahun 2017 terdapat 62.217 judul buku yang diajukan mendapat ISBN (2.819 adalah buku elektronik). Tahun 2018 terjadi kenaikan mencapai 78.881 (16.036 adalah buku elektronik), lalu tahun 2019 terdapat 95.630 judul buku yang diajukan (17.141 adalah buku elektronik).

Jumlah judul buku yang diajukan untuk ISBN tersebut meskipun mengalami peningkatan, tidaklah mencerminkan kenaikan produksi buku secara ekonomi. Banyak buku yang mendapatkan ISBN tidak dicetak secara massal untuk masuk ke pasar buku karena beberapa hal, seperti penerbitan pemerintah dan penerbitan perseorangan sebagai syarat kinerja dalam bidang akademis atau penelitian.

Harapan Perbukuan Indonesia

Meskipun perbukuan Indonesia mengalami pasang surut dan didera masalah yang tiada henti, para pelaku perbukuan di Indonesia tetap optimistis menghadapi perubahan zaman, terutama upaya memintal kembali budaya buku di Indonesia. Harapan tersebut disandarkan kepada generasi baru pembaca buku dan pegiat buku.

Regulasi perbukuan yang dilahirkan pemerintah hingga 2022 serta “dikawal” oleh Pusat Perbukuan menyiratkan langkah-langkah strategis membangun perbukuan Indonesia menjadi lebih baik. Amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yaitu Buku Bermutu, Murah, dan Merata (3-M) menjadi tujuan pembangunan perbukuan Indonesia. Para pemangku kepentingan perbukuan diharapkan dapat menghasilkan buku-buku bermutu, buku-buku yang terjangkau, dan buku-buku yang merata di seluruh Indonesia.

Sungguh tidaklah mudah mengurus perbukuan di negara besar seperti Indonesia. Perimbangan aktivitas penerbitan buku di seluruh Indonesia juga patut menjadi perhatian karena dalam beberapa dekade, pertumbuhan dan perkembangan penerbit hanya terjadi di Pulau Jawa. Jawa, terutama DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya telah menjadi barometer perbukuan nasional yang sulit diimbangi oleh daerah lain di luar Pulau Jawa.

Untuk itu, hal ini memerlukan kajian dan strategi untuk memajukan perbukuan di berbagai daerah di Indonesia. Dukungan dari pemerintah daerah sangat diharapkan, terutama dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017.

Catatan Akhir



- 1 Polycarpus Swantoro atau lebih dikenal dengan nama pena P. Swantoro (l. 1932–w. 2019) ialah seorang wartawan senior dengan latar belakang pendidikan sejarah dari UGM. P. Swantoro merupakan salah seorang pendiri Kompas Gramedia.
- 2 Program Studi Editing merupakan pendidikan vokasi D-3 yang dibuka di Universitas Padjadjaran sejak tahun 1988. Program ini menghasilkan tenaga ahli madya di bidang penyuntingan dan penerbitan. Program ini resmi ditutup pada tahun 2010.
- 3 Buku modern ialah buku dari hasil mesin cetak yang kali pertama diperkenalkan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1446 di Jerman.
- 4 Buku *Memoir* merupakan autobiografi Mohammad Hatta yang ditulisnya langsung. Buku ini terbit kali pertama tahun 1979 oleh Penerbit Tintamas, setahun sebelum beliau wafat tahun 1980.
- 5 Sosok Djohan Djohor muncul dalam buku *Memoir* Mohammad Hatta. Ia dipanggil Mak Etek (*makcik* atau *om*) oleh Hatta. Djohan Djohor ialah seorang pengusaha pribumi yang sudah memulai usaha sejak tahun 1920-an. Djohan Djohor memiliki sebuah toko di Pasar Senen, Jakarta. Dua minggu sekali Hatta mendatangnya (Swantoro, 2002).
- 6 Buku *Alam Pikiran Yunani* sebagaimana penjelasan Mohammad Hatta ditulis saat pembuangannya di Boven Digul saat Hatta mengajar beberapa orang tentang ekonomi. Prakat buku ditulis Hatta bertanggal Mei 1941 di Bandar Neira. Penerbit Tintamas menerbitkan karya ini kali pertama dalam tiga jilid pada tahun 1980. Tahun 1986 buku tersebut kembali diterbitkan oleh UI Press bekerja sama dengan Tintamas.
- 7 Sukarno menghasilkan naskah drama pada saat dibuang ke Ende (Flores) dan di Bengkulu. Ada 12 naskah drama yang ditulisnya (serta seluruhnya pernah dipentaskan di Ende-Flores) dan beberapa naskah drama yang ditulis di Bengkulu.

Sukarno membentuk grup tonil (teater/sandiwara) bernama Toneel Klub Kelimutu. Sukarno menjadi sutradara dan penulis naskah teater selama pengasingan di Ende.

8 Zubaidah Isa menyebut istilah ‘pemerintahan’ dalam penguasaan VOC atas Hindia. VOC sendiri sejatinya merupakan kongsi dagang antarperusahaan yang diberi kewenangan besar oleh pemerintah Kerajaan Belanda.

9 Istilah *Drukkerij* bermakna percetakan dalam bahasa Belanda.

10 Huruf pegon merupakan modifikasi dari huruf Arab untuk menuliskan bahasa Jawa, Melayu, Sunda, dan sebagainya. Kata ‘pegon’ berasal dari bahasa Jawa *pego* yang bermakna menyimpang. Pegon dianggap menyimpang dari huruf Arab karena tidak menggunakan harakat, tetapi menggunakan huruf vokal. Huruf pegon sering juga disebut huruf Arab gundul atau di Malaysia disebut huruf Arab Jawi. Huruf pegon banyak ditemukan di kitab-kitab Jawa kuno karya para Wali Songo dan ulama lainnya.

11 Dalam “Bahasa Indonesia Bahasa Kita” pada buku *1000 Tahun Nusantara* (Penerbit Buku Kompas, 2000), Aji Rosidi mengungkapkan pada masa lalu bahasa Melayu Pasar lebih banyak digunakan pers Tiongho dan bumiputra. Adapun bahasa Melayu “resmi” merupakan hasil rekayasa para ahli Belanda terbatas digunakan pada majalah-majalah resmi terbitan Balai Poestaka.

12 *Naamloze Vennootschap* disingkat NV merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dalam bahasa Belanda.

Daftar Pustaka

- Arman, Dedi. 2014. “Sejarah Percetakan dan Penerbitan di Riau Abad ke-19–20”. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-percetakan-dan-penerbitan-di-riau-abad-ke-19-20/>>
- Astraatmadja, Atmakusumah dan A. Hadyana Pudjaatmaka. 1989. “Percetakan”, dalam *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Chambert-Loir, Henri. 2018. *Sastra dan Sejarah Indonesia: Tiga Belas Karangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2021. *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*. jilid I—IV. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kongres Perbukuan Nasional I Jakarta 29–31 Mei 1985. Jakarta: Depdikbud.
- (ed.). 1996. *Profil Beberapa Penerbit Buku di Indonesia*. Jakarta: Politeknik Universitas Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2018. *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Farid, Hilmar. 1991 “Kolonialisme dan Budaya: Balai Poestaka di Hindia Belanda”, *Jurnal Prisma*, Oktober 1991.
- Hanna, Willard. 1988. *Hikajat Jakarta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ikatan Penerbit Indonesia. 1966. *Majalah Suara Penerbit Indonesia*, edisi Maret–April 1966, Nomor 6 Tahun XVI.
- Hilman, Arys. 2021. “Literasi di Tengah Pandemi dan Disrupsi”. presentasi Masukan untuk Kongres Perbukuan 2021. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Isa, Zubaidah. 1972. “Printing and Publishing in Indonesia: 1602–1970”, disertasi Indiana University.

- Kleden, Ignas. 2000. "Buku Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik tentang Kebudayaan. dalam *Buku dalam Indonesia Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kristanto, J.B (ed.). 2000. *Seribu Tahun Nusantara*. Jakarta: Penerbit Harian Kompas.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Latif, Yudi. 2009. *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lubis, Koko Hendri. 2018. *Roman Medan: Sebuah Kota Membangun Harapan*. Jakarta: Gramedia.
- Mahayana, Maman S. 2012. *Pengarang Tidak Mati: Peranan dan Kiprah Pengarang Indonesia*. Jakarta: Nuansa.
- Mohamad, Goenawan. "Sebuah Ruang, 17 Ribu Pulau". dalam *Tempo*, h. 32-33. Agustus 2005.
- Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Jakarta: Republik Indonesia.
- . 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rinkes. 2021. "Dr. Douwe Adolf Rinkes". < <https://www.rinkes.nl/genealogie/douwe-adolf-rinkes/>>
- Rosidi, Ajip. 2000. *50 Tahun Ikapi: Membangun Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Sambodo, Maxensius Tri, dkk. 2018. "Telaah Insentif Pajak Penerbitan Buku", *Bina Ekonomi*, Vol. 22 No. 2 2018.
- Samedi A. S., Pudjo. 2011. "Revitalisasi Kepemimpinan Lembaga Pusat Grafika Indonesia: Studi Kasus tentang Keefektifan Kepemimpinan Entrepreneur di Pusgrafin Menuju ke Arah Pengembangan Lembaga yang Maju dan Kompetitif", *Jurnal Manajemen*, Volume XV, No. 03, Oktober 2011: 352-360.
- Santoso, Y. 2008. *Perjalanan Pusat Perbukuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 175/O/2001*. Jakarta: Pusat Perbukuan.
- Scheider, Georg. 1985. *Perihal Cetak Mencetak*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sidharta, Myra. 2004. *Biografi Delapan Penulis Peranakan: Dari Penjaja Tekstil sampai Superwoman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Siswanto, P. 2017. *Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sulistyo, Basuki. 2008. "Sejarah Perpustakaan Nasional Sebuah Kajian". <https://www.perpusnas.go.id/sejarah_kajian.php?lang=idSumedi>
- Taryadi, Alfons (ed.). 1999. *Buku dalam Indonesia Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- . 2015. "Indonesia" dalam *International Book Publishing: Encyclopedia*. New York: Routledge.
- Tim Penulis Sejarah Obor. 2017. *40 Tahun Yayasan Pustaka Obor Indonesia Ikut Menerangi Zaman*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tim Teknis Pusat Perbukuan. 2002. *Pusat Perbukuan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Teknis Puskurbuk. 2017. *Menguk Jendela Ilmu: Dinamika Penerbitan Buku Pendidikan dari Era Orde Baru hingga Reformasi*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Trim, Bambang. 2014. *Apa dan Bagaimana Menerbitkan Buku: Sebuah Pengalaman Bersama Ikapi*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia.
- , Bambang, dkk. 2015. *Industri Buku Indonesia dalam Data dan Fakta*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia.
- Widjanarko, Putut. 2000. *Elegi Gutenberg: Memposisikan Buku di Era Cyberspace*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Yusuf, Iwan Awaluddin, dkk. 2010. *Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Bereksprei*. Jakarta: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).

